



**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP DAYA SAING KOMODITAS PADI
PADA BERBAGAI SISTEM IRIGASI
DI KABUPATEN JEMBER**

*(Studi Kasus di Desa Tisnogambar, Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari, dan
Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)*

**KARYA ILMIAH TERTULIS
(SKRIPSI)**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Pendidikan Program Strata Satu
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jember**

Oleh

**Ahmad Efendi
NIM. 001510201238**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN**

Januari 2005

Pemimbing Anggota : Ir. Evita Soliha Hani, MP
NIP. 131 880 472

Pemimbing Utama : Rudi Hartadi, SP, MSI
NIP. 132 090 694

Dipersiapkan dan disusun dibawah bimbingan:

Ahmad Efendi
NIM. 001510201238

Oleh

*Studi Kasus di Desa Tisnogambar, Desa Langkap Kecamatan Bangsal Sari, dan
Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember*

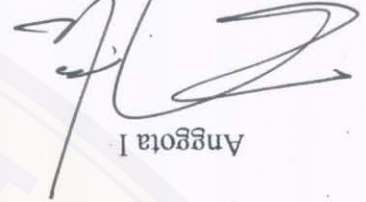
KARYA ILMIAH TERTULIS BERJUDUL
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP DAYA SAING KOMODITAS PADI
PADA BERBAGAI SISTEM IRIGASI
DI KABUPATEN JEMBER

Prof. Dr. Ir. Endang Budi Trisusilowati, MS
NIP. 130 531 982



MENGESAHKAN

Ir. Eviya Solihah Hani, MP
NIP. 131 880 472



Anggota I

Ir. M. Sunarshih, MS
NIP. 130-890-070



Anggota II

Rudi Hartadi, SP, MSI
NIP. 132 090 694



Ketua

TIM PENGUJI

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Telah diuji pada tanggal
19 Januari 2005

Ahmad Efendi
NIM. 001510201238

Oleh

Studi Kasus di Desa Tisngambar, Desa Langkap Kecamatan Bangsalari, dan
Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH
TERHADAP DAYA SAING KOMODITAS PADI
PADA BERBAGAI SISTEM IRIGASI
DI KABUPATEN JEMBER**

KARYA ILMIAH TERTULIS BERJUDUL



Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan

(Tafsir Al Qur'an surat Alam Nasyrh Ayat 6)

Aku dengar Aku lupa, Aku lihat Aku ingat, Aku kerjakan Aku mengerti

(Ahmad Efendi)

Orang yang kuat bukanlah orang yang tidak pernah gagal,

tetapi orang yang mampu bangkit disaat gagal

(Ahmad Efendi)

Teladan lebih kuat dari pada perintah, dan perbaikilah moral orang lain melalui

teladan yang baik dari diri kita sendiri

(Ahmad Efendi)

MOTTO

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT, karya tulis ilmiah ini
kupersembahkan kepada:

- Bapak Sutanjo dan Ibu Jariyah yang selalu memberikan kasih sayang,
do'a, semangat, dan pengorbanan yang tulus.
- Saudara-saudaraku (Mas Heru, Dik Ardian) yang selalu memberikan
dorongan, semangat, dan keceriaan.
- Keluarga besar di Pacitan yang selalu memberikan perhatian dengan
tulus ikhlas
- Djihan Nisrina, SP yang selalu memberikan motivasi, dukungan,
bantuan, serta perhatian yang belum pernah kudapatkan selama ini
selain dari keluargaku sendiri.
- Seluruh teman-temanku Sosek angkatan 2000, semoga persahabatan
kita tidak berhenti sampai di sini.
- Segenap pengurus HIMASETA periode 2002/2003, terima kasih atas
pengorbanan dan kerja samanya selama di dalam kepengurusan.
- Teman-temanku kost "TK Malam" kalem No.75, semoga rasa
kekeluargaan kita selalu menyatu dalam hati.
- Almamater yang kubanggakan

Alhamdulillah hirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah tertulis (skripsi) ini. Penulisan karya ilmiah tertulis (skripsi) yang berjudul "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi Di Kabupaten Jember" ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah tertulis ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, arahan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah tertulis ini
2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember yang telah memberikan bantuan perijinan dalam menyelesaikan karya ilmiah tertulis ini
3. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menyelesaikan karya ilmiah tertulis ini
4. Rudi Hartadi, SP. MSi, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan dalam penyelesaian karya ilmiah tertulis ini
5. Ir. Evita Soliha Hani, MP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah tertulis ini
6. Ir. M. Sunarish, MS, selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberi masukan demi kesempurnaan tulisan ilmiah ini
7. Prof. Dr. Ir. Idha Haryanto S, selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan nasehat yang berharga selama penulis menjalani kegiatan akademis.

8. Ir. Joni Murti Mulyo Aji, M. Rur M, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk kepada penulis dalam penulisan karya ilmiah tertulis ini
9. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis
10. Bapak Camat Kecamatan Bangsalsari dan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis
11. Bapak R. Budie Yuwono dan Ibu Nurlaela selaku Petugas Penyuluh Lapangan yang telah memberikan arahan di lapangan kepada penulis
12. Bapak Kepala Desa Tisnogambar, Bapak Kepala Desa Pringgowirawan, dan Bapak Kepala Desa Langkap beserta staf, dan para petani padi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama melaksanakan penelitian sampai terselesaikannya karya ilmiah tertulis ini.
- Semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Penulis

Jember, Januari 2005

Ahmad Efendi, 001510201238, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, dengan judul "Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Daya Saing Komoditas Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi Di Kabupaten Jember", dibimbing oleh Rudi Hartadi, SP.Msi, selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan Ir. Evita Soliha Hani, MP selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA).

RINGKASAN

Pangan merupakan bagian terpenting untuk kehidupan manusia, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Perkembangan subsektor tanaman pangan bukan saja telah berhasil mencukupi kebutuhan penduduk tetapi juga memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Tanaman padi-padian masih menjadi sumber utama kalori dan protein. Hal ini mudah dipahami mengingat beras merupakan bahan pangan utama. Oleh karenanya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat maka pengembangan tanaman pangan semakin digalakkan terutama terhadap tanaman padi sebagai sumber utama kalori. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah penghasil padi yang potensial untuk dikembangkan. Tanaman padi di Kabupaten Jember diusahakan pada berbagai sistem irigasi antara lain sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana.

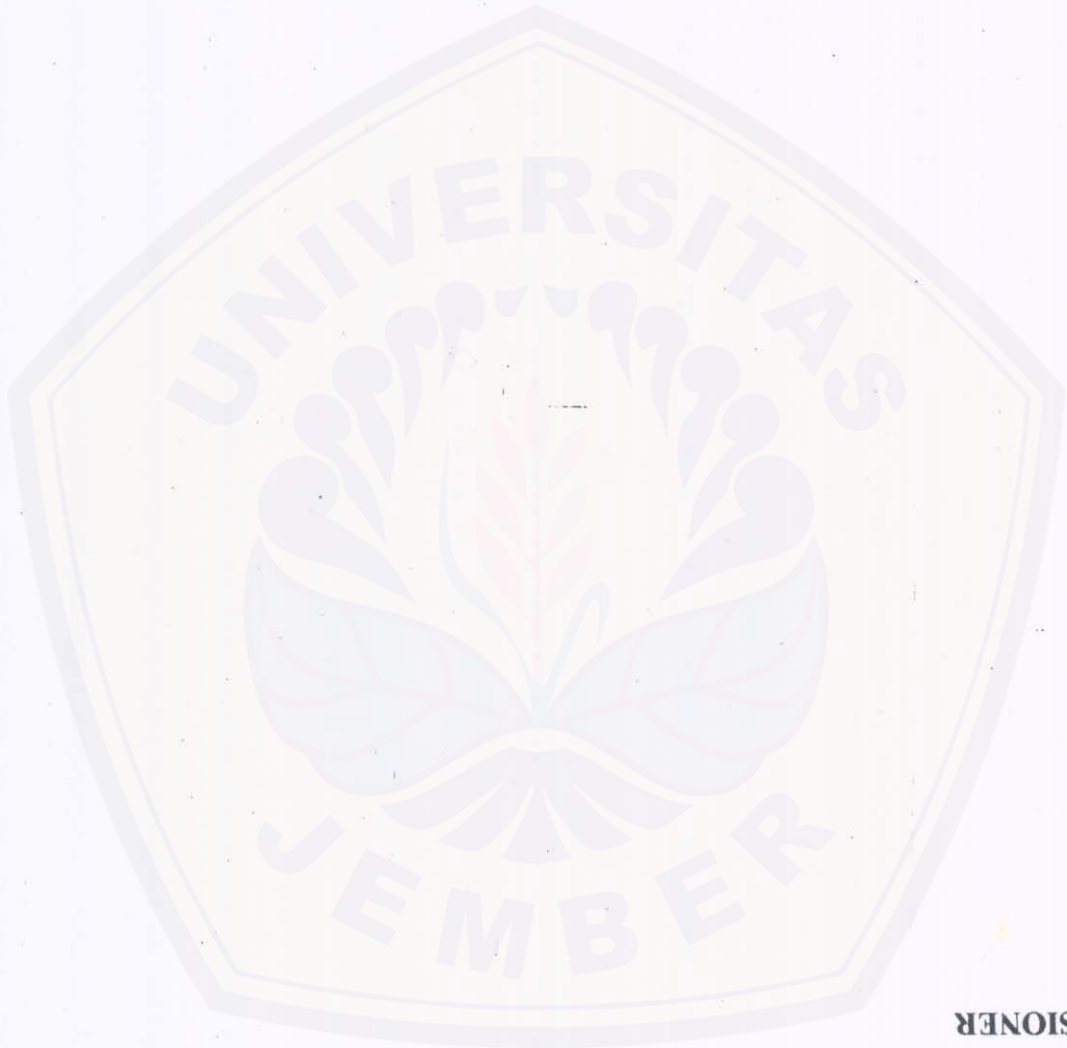
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui efisiensi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, serta dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember. Daerah penelitian ditentukan dengan sengaja (*purpose method*) dan metode penelitian yang digunakan adalah metode analitik, deskriptif, dan komparatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *quota sampling*. Data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara terstruktur dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa dinas atau lembaga terkait terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah Matrik Analisis Kebijakan (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) usahatani padi ada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana, adalah efisien, (2) usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, (3) kebijakan pemerintah secara umum memberikan dampak negatif terhadap usahatani padi.

1	HALAMAN JUDUL
ii	HALAMAN PEMBIMBING
iii	HALAMAN PENGESAHAN
iv	HALAMAN MOTTO
v	HALAMAN PERSEMBAHAN
vi	KATA PENGANTAR
viii	RINGKASAN
ix	DAFTAR ISI
xiii	DAFTAR TABEL
xvi	DAFTAR GAMBAR
xvii	DAFTAR LAMPIRAN
1	I. PENDAHULUAN
1	1.1 Latar Belakang Permasalahan
8	1.2 Identifikasi Masalah
8	1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
8	1.3.1 Tujuan Penelitian
8	1.3.2 Kegunaan Penelitian
9	II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
9	2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
11	2.2 Tinjauan Pustaka
11	2.2.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Pertanian
16	2.2.2 Usahatani Padi
19	2.2.3 Konsep Biaya dan Pendapatan
21	2.2.4 Konsep Efisiensi
23	2.2.5 Tipe Sistem Irigasi
24	2.2.6 Konsep Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif
25	2.2.7 Konsep <i>Policy Analysis Matrix</i> (PAM)

DAFTAR ISI

27	2.2.7.1 Harga Privat Tabel PAM
28	2.2.7.2 Harga Sosial Tabel PAM
32	2.2.7.3 Pengaruh Divergensi Tabel PAM
33	2.3 Kerangka Pemikiran
41	2.4 Hipotesis
42	III. METODOLOGI PENELITIAN
42	3.1 Penentuan Daerah Penelitian
42	3.2 Metode Penelitian
42	3.3 Metode Pengambilan Contoh
43	3.4 Metode Pengumpulan Data
43	3.5 Metode Analisis Data
46	3.6 Terminologi dan Pengukuran
49	IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN
49	4.1 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari
49	4.1.1 Keadaan Geografis
49	4.1.2 Keadaan Iklim
49	4.1.3 Keadaan Penduduk
50	4.1.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur
50	4.1.3.2 Pendidikan Penduduk
53	4.1.3.3 Mata Pencaharian Penduduk
53	4.1.4 Keadaan Tanah
54	4.1.5 Keadaan Pertanian
56	4.1.6 Keadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa
57	4.2 Desa Pringgowitawan Kecamatan Sumberbaru
57	4.2.1 Keadaan Geografis
57	4.2.2 Keadaan Iklim
57	4.2.3 Keadaan Penduduk
58	4.2.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur
58	4.2.3.2 Pendidikan Penduduk

60	4.2.3.3 Mata Pencaharian Penduduk
61	4.2.4 Kadaan Tanah
62	4.2.5 Kadaan Pertanian
63	4.2.6 Kadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa
64	4.3 Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari
64	4.3.1 Kadaan Geografis
64	4.3.2 Kadaan Iklim
64	4.3.3 Kadaan Penduduk
65	4.3.3.1 Kadaan Penduduk Menurut Umur
65	4.3.3.2 Pendidikan Penduduk
68	4.3.3.3 Mata Pencaharian Penduduk
68	4.3.4 Kadaan Tanah
69	4.3.5 Kadaan Pertanian
71	4.3.6 Kadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa
73	V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
73	5.1 Eristensi Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember
77	5.2 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi
77	5.2.1 Keunggulan Komparatif Usahatani Padi
80	5.2.1 Keunggulan Kompetitif Usahatani Padi
82	5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi
82	5.3.1 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap <i>Output</i>
84	5.3.2 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap <i>Input Iradable</i>
87	5.3.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap <i>Input-Output</i>
92	5.3.4 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sistem Irigasi



KUISIONER

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

97 6.2 Saran

96 6.1 Kesimpulan

96 VI. KESIMPULAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Komoditas Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Jember Tahun 2002	3
2.	Ketersediaan dan Konsumsi Masyarakat Terhadap Komoditas Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2003	4
3.	Penggunaan Lahan Sawah Untuk Produksi Padi Berdasarkan Tipe Irigasi Tahun 2003	5
4.	Matrik Analisis Kebijakan	26
5.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Komoditas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2002	35
6.	Matrik Analisis Kebijakan	44
7.	Kadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	50
8.	Kadaan Kualitas Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditematkan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	51
9.	Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	51
10.	Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	52
11.	Kadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencapaian di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	53
12.	Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003	54
13.	Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003	55
14.	Kadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003	58

15.	Keadaan Kualitas Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003.....	59
16.	Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003.....	59
17.	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003.....	60
18.	Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003.....	61
19.	Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Tahun 2003.....	62
20.	Keadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	65
21.	Keadaan Kualitas Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	66
22.	Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	66
23.	Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	67
24.	Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	68
25.	Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	69
26.	Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Tahun 2003.....	70
27.	Nilai Profitabilitas Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	73
28.	Hasil Matrik Analisis Kebijakan Usahatani Padi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	77
29.	Transfer <i>Output</i> Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	82

30.	Transfer <i>Input Tradable</i> Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	85
31.	Nilai NPT, PC dan SRP Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	87
32.	Koefisien Proteksi Efektif Usahatani Padi Pada berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	89



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kurva Keseimbangan Penetapan Harga Dasar	14
2.	Kurva Keseimbangan Penetapan Subsidi	15
3.	Kurva Biaya Produksi	20
4.	Kurva Total Penerimaan, Total Biaya, dan Pendapatan Bersih	21
5.	Skema Kerangka Pemikiran	4i

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Data Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	98
2.	Tabel Asumsi <i>Policy Analysis Matrix</i> Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	104
3.	<i>Input-Output</i> Fisik per Hektar Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	105
4.	Harga Privat Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	106
5.	Anggaran Privat Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	107
6.	Penyesuaian Harga Ekspor/Impor untuk <i>Output</i> dan <i>Input</i> Usahatani Padi di Kabupaten Jember	108
7.	Harga Sosial Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004	110
8.	Anggaran Sosial Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	111
9.	Tabel <i>Policy Analysis Matrix</i> Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	112
10.	Tabel <i>Policy Analysis Matrix</i> Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	113
11.	Rasio <i>Policy Analysis Matrix</i> Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	114
12.	Data Pemasaran Gabah Petani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.....	115
13.	Persentase Pemasaran Gabah Petani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di kabupaten Jember Tahun 2004	116



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Arah kebijakan di bidang pembangunan daerah dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 adalah mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi. Arah kebijakan lain yang akan dilaksanakan adalah mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan pengembangan kelembagaan serta pemanfaatan sumber daya alam (MPR, 1999).

Pembangunan pertanian masih merupakan salah satu bidang andalan untuk menunjang pembangunan bidang lain, terutama pembangunan ekonomi. Pembangunan pertanian menyangkut pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Keseluruhan sub sektor ini perlu lebih ditingkatkan lagi melalui berbagai usaha diantaranya diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi, dan rehabilitasi secara terpadu (Simatupang dan Purwoto, 1990).

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari sekitar 17% Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional diperoleh dari sektor pertanian dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3%. Kedudukan sub sektor tanaman pangan dan sektor pertanian sangat menonjol karena merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 62% pada tahun 1990. Selain itu sektor pertanian juga merupakan penyerap tenaga kerja terbesar sekitar 35,45 juta tenaga kerja atau 72% dari total tenaga kerja yang tersedia (Noor, 1996).

Melihat peran penting sektor pertanian tersebut, pembangunan pertanian dilaksanakan dengan memberdayakan perekonomian rakyat melalui pendekatan agribisnis yang terpadu, sehingga makin mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan serta kebutuhan bahan baku industri. Untuk itu dibutuhkan penyesuaian yang mendasar dalam kegiatan

sektor pertanian agar menghasilkan produk komoditas pertanian yang bercirikan; *pertama*, produktivitas tinggi dan berkesinambungan, *kedua*, mempunyai daya saing yang kuat terhadap produk sejenis, dan *ketiga*, menyesuaikan permintaan pasar (Noor, 1997).

Pada tahun-tahun mendatang Indonesia mulai diikat oleh komitmen dalam GATT yang mengakibatkan produk-produk pertanian dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk impor dari luar negeri. Mengingat potensi sumber daya yang besar dan beragam di sektor pertanian ini maka dimasa mendatang sektor ini masih merupakan sektor paling penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi pertanian akan lebih tepat apabila dikaitkan dengan perubahan-perubahan dalam memilih dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya masyarakat secara efisien dan bijaksana untuk mencapai swasembada dalam arti yang lebih luas (Noor, 1996).

Kabupaten Jember merupakan salah satu bagian wilayah Propinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup tinggi. Kabupaten Jember memiliki 9 sektor ekonomi yang dikelompokkan menjadi 3 sektor, yaitu: (1) sektor primer terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan; (2) sektor sekunder terdiri dari, sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan konstruksi, sektor listrik, gas dan air minum; (3) sektor tersier atau sektor jasa terdiri dari sektor jasa perdagangan, jasa perhotelan dan restoran, jasa sewa rumah, jasa pemerintah dan hankam serta jasa-jasa perorangan. Di dalam kegiatan pembangunan, sektor-sektor ekonomi tersebut ternyata mampu menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda, tergantung dari kemampuan masing-masing sektor tersebut (Badan Pusat Statistik, 2002).

Pembagian sektor pertanian ke dalam subsektor mengikuti pembagian yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memperkirakan produksi dari sektor tersebut. Pembagian sektor pertanian kedalam subsektor meliputi: subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan dan hasil-hasilnya, subsektor kehutanan, dan subsektor perikanan. Penggolongan komoditi tanaman pangan meliputi padi, ubi kayu, ubi rambat, jagung, kacang tanah, dan kedelai (Shinici, 1992).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember (2002), jumlah produksi, produktivitas dan luas panen komoditas tanaman pangan di Kabupaten Jember pada tahun 2002 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Komoditas Subsektor Tanaman Pangan Kabupaten Jember Tahun 2002

Komoditas Subsektor Tanaman Pangan	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)	Luas Panen (ha)
Padi	761.523	53,67	141.880
Jagung	225.470	41,67	54.105
Kedelai	19.043	1,36	140.055
Kacang Tanah	4.867	11,37	4.280
Ubi Kayu	51.695	119,61	4.322
Ubi.jalar	10.357	92,31	1.122

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2002.

Berdasarkan Tabel 1, jumlah produksi, produktivitas, dan luas panen subsektor tanaman pangan di Kabupaten Jember tahun 2002, komoditas padi adalah komoditas subsektor tanaman pangan yang mampu memproduksi melebihi komoditas subsektor tanaman pangan yang lainnya yaitu sebesar 761.523 ton. Luas panen tanaman padi juga merupakan luas panen yang tertinggi diantara berbagai luas panen komoditas tanaman pangan lainnya yaitu sebesar 141.880 ha. Hal ini berarti bahwa tanaman padi merupakan tanaman pangan yang diusahakan oleh banyak petani di Kabupaten Jember.

Perkembangan subsektor tanaman pangan bukan saja telah berhasil mencukupi kebutuhan penduduk tetapi juga memperbaiki pola konsumsi masyarakat. Tanaman padi-padian masih menjadi sumber utama kalori dan protein. Hal ini mudah dipahami mengingat beras merupakan bahan pangan utama (Dunairy, 1996).

Menurut Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jember (2003), ketersediaan dan konsumsi masyarakat terhadap komoditas komoditas dari subsektor tanaman pangan di Kabupaten Jember pada tahun 2003 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketersediaan dan Konsumsi Masyarakat Terhadap Komoditas Subsektor Tanaman Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2003

Komoditas Subsektor Tanaman Pangan	Ketersediaan (ton)	Konsumsi (kg/kap/th)
Beras	424.898,19	91,054
Jagung	282.862,72	7,955
Kedelai	16.805,60	10,839
Kacang tanah	3.262,91	0,844
Ubi kayu	14.071,94	16,548
Ubi jalar	7.340,06	2,808

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Jember 2003

Tabel 2 menunjukkan ketersediaan dan konsumsi terhadap komoditas subsektor tanaman pangan di Kabupaten Jember tahun 2003. Konsumsi komoditas subsektor tanaman pangan berupa beras merupakan komoditas yang paling banyak dikonsumsi, hal ini terjadi karena mayoritas makanan pokok penduduk Kabupaten Jember adalah beras. Beras merupakan bahan makanan yang dihasilkan dari padi. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk maka juga diperlukan peningkatan produksi padi sebagai makanan pokok.

Usaha untuk meningkatkan produksi padi dilakukan dengan menerapkan berbagai teknologi. Penerapan teknologi dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan memberikan bimbingan kepada petani mengenai panca usaha tani, intensifikasi khusus dan lain sebagainya. Semua ini bermaksud untuk mengimbangi laju permintaan pangan (AAK, 1990).

Panca usaha tani meliputi beberapa hal yaitu: (1) perbaikan cara bercocok tanam; (2) pemakaian bibit unggul; (3) penggunaan pupuk; (4) pengendalian hama dan penyakit tanaman; (5) pengairan atau irigasi yang baik. Jadi dalam program ini irigasi merupakan syarat disamping penyuluhan untuk meningkatkan produksi. Walaupun perbaikan dan perluasan irigasi selama ini berhasil meningkatkan produksi beras hingga terwujud swasembada beras bukan berarti tidak ada masalah. Salah satu masalah pokok dalam irigasi ini adalah kelemahan manajemen. Kelemahan ini terjadi karena perhatian dalam membangun irigasi hanya tertuju kepada hal-hal fisik bangunan irigasi (Varley, 1995).

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional, tujuan utama dari pembangunan pengairan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan subsektor irigasi untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan sasaran utama swasembada beras. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sehingga keberhasilan pembangunan pengairan akan menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat tani (Siskel dan Hutapea, 1996).

Subsektor tanaman pangan, khususnya padi memiliki peranan tersendiri terhadap perekonomian Kabupaten Jember. Sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Timur, Kabupaten Jember memberikan perhatian pada subsektor ini untuk terus meningkatkan produksi padi diantaranya dengan memperhatikan aspek irigasi didalam usahatani. Pengusahaan tanaman padi di Kabupaten Jember menggunakan berbagai tipe sistem irigasi. Tipe irigasi yang digunakan untuk usahatani padi di Kabupaten Jember antara lain: sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana dan lain sebagainya. Penyebaran masing masing tipe sistem irigasi di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Sawah Untuk Produksi Padi Berdasarkan Tipe Sistem Irigasi Tahun 2003

No Kecamatan	Irigasi Teknis		Irigasi Semiteknis		Irigasi Sederhana	
	Kecamatan	Luas (ha)	Kecamatan	Luas (ha)	Kecamatan	Luas (ha)
1	Bangsalsari	3.800	Sumberbaru	1.607	Ledokombo	1.334
2	Kencong	3.622	Sumberjambe	255	Bangsalsari	686
3	Balung	2.933	Arjasa	155	Panti	564
4	Rambipuji	2.904	Patrang	121	Sukorambi	552
5	Tanggul	2.603	Jelbuk	48	Suberjambe	532

Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Jember 2003

Tabel 3 menunjukkan bahwa Kecamatan Bangsalsari merupakan daerah yang paling banyak menggunakan sistem irigasi teknis yaitu dengan luas area 3800 hektar, sedangkan sistem irigasi semiteknis banyak terdapat di daerah Kecamatan Sumberbaru dengan luas area 1607 hektar, dan Kecamatan Ledokombo merupakan daerah yang paling banyak menggunakan sistem irigasi

sederhana yaitu seluas 1334 hektar kemudian diikuti oleh Kecamatan Bangsalsari yaitu seluas 686 hektar.

Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sebagian besar petani padi menggunakan sistem irigasi teknis sehingga petani di Desa Tisnogambar tidak mengalami kesulitan dalam mengatur kebutuhan akan air bagi tanaman padi yang diusahakan sedangkan di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari tipe sistem irigasi yang lebih dominan adalah sistem irigasi sederhana. Hal tersebut ditandai dengan saluran irigasi yang masih belum permanen dalam hal tampilan fisik yaitu masih berupa galengan dari tanah sawah.

Desa Pringgowirawan merupakan daerah utara dari Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Daerah utara dari Kecamatan Sumberbaru ini umumnya menggunakan sistem irigasi semiteknis, hal ini dikarenakan sumber mata air dan relief berbeda dengan daerah selatan Kecamatan Sumberbaru. Pada daerah selatan Kecamatan Sumberbaru tipe sistem irigasi yang digunakan adalah sistem irigasi teknis.

Usahatani padi di Kecamatan Bangsalsari dan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember apabila secara ekonomis dikelola dengan lebih baik maka akan lebih menguntungkan. Keberhasilan ini tidak lain harus didukung oleh beberapa hal yaitu: penggunaan varietas unggul, benih bermutu, pengelolaan tanaman yang optimal dengan perbaikan cara tanam, pemupukan yang berimbang, spesifik lokasi, pengolahan tanah yang benar, mempertahankan potensi produksi melalui pengendalian hama terpadu, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dan tepat, permodalan yang memadai dalam mencukupi sarana produksi, pengelolaan tanaman, dan irigasi yang baik.

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari peran seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki daerah masing-masing. Sebagai upaya untuk memperbesar peran dan kemampuan daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri didalam mendefinisikan serta mendanai kegiatan operasional rumah tangganya melalui kebijakan harga, ketahanan pangan, pengembangan pertanian, sarana penelitian pertanian, serta kebijakan lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

berdampak pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif komoditas pertanian khususnya padi.

Salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas komoditas padi adalah dengan pembangunan infrastruktur salah satunya adalah saluran irigasi. Ketersediaan sarana irigasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi didalam usahatani padi, mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif atau daya saing dari komoditas padi.

Kemajuan teknologi dibidang budidaya padi (penyediaan sarana irigasi) menyebabkan terjadinya banyak peningkatan produksi komoditas padi. Namun dimasa sekarang ini juga masih terdapat petani yang berusahatani padi dengan menggunakan sistem irigasi semiteknis dan sederhana. Hal ini akan mengakibatkan tidak optimalnya produksi padi jika tidak diimbangi dengan penggunaan teknologi lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui apakah usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana merupakan usahatani yang efisien, mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif serta bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas padi pada berbagai sistem irigasi. Hal ini disebabkan karena pada saat ini kita memasuki era perdagangan bebas dimana untuk dapat bertahan dalam persaingan bebas diperlukan adanya efisiensi, keunggulan kompetitif dan komparatif. Apabila usahatani padi ternyata sudah efisien dan mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif, maka petani padi bisa tetap bertahan dalam persaingan bebas atas produk padi yang bermutu. Namun dilain pihak apabila usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana tidak mempunyai keunggulan, maka bisa dipastikan komoditas padi yang dihasilkan tidak laku di pasar domestik dan di dalam perdagangan bebas. Apabila hal ini terjadi sangat penting bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan di bidang pertanian yang nantinya akan mendorong meningkatnya efisiensi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif produk pertanian sehingga peningkatan taraf hidup masyarakat tani dapat tercapai.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakan efisiensi usahatani padi pada sistem irigasi teknis, irigasi semiteknis, dan irigasi sederhana?
2. Apakah terdapat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam usahatani padi?
3. Apakah kebijakan pemerintah memberikan dampak terhadap usahatani padi ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui efisiensi usahatani padi pada sistem irigasi teknis, irigasi semiteknis, dan irigasi sederhana.
2. Untuk mengetahui adanya keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam usahatani padi.
3. Untuk mengetahui dampak dari kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi.

1.3.2 Kegunaan

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, pemerintah/instansi terkait dengan pengembangan usahatani padi dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan wilayah khususnya di Kabupaten Jember.
2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya tentang kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi.



II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Soetrisno (1998), yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Padi Dalam Mendukung Agroindustri di Kabupaten Jember, diteliti masalah efisiensi, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah terhadap usahatani padi. Analisis yang digunakan adalah Matrik Analisis Kebijakan (PAM) yaitu matrik yang disusun untuk meneliti dampak dari berbagai kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi memperoleh keuntungan privat (keuntungan usahatani padi di tingkat petani) sebesar Rp 896.373 per ha. Sedangkan keuntungan sosialnya (keuntungan di tingkat dunia/tanpa distorsi kebijakan) sebesar Rp 932.339 per ha. Hal ini memberikan arti bahwa usahatani padi di Kabupaten Jember adalah usahatani yang efisien.

Hasil penelitian lain yang menggunakan pendekatan Matrik Analisis Kebijakan (PAM) yang dilakukan Pearson, Bahri, dan Gotsch (2003), dengan judul *Is Rice Production In Indonesia Still Profitable* yang dilakukan di salah satu daerah di Jawa Timur tepatnya di Kabupaten Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis di Propinsi Jawa Timur adalah efisien. Hal ini ditunjukkan oleh nilai keuntungan privat atau keuntungan usahatani padi di tingkat petani adalah sebesar Rp 1.633.700 per ha. Sedangkan keuntungan sosial atau keuntungan usahatani padi di tingkat dunia adalah sebesar Rp 2.437.000 per ha.

Hasil penelitian lain yang bertujuan untuk mengetahui efisiensi usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana dilakukan oleh Pujiastutik (1999) yang berjudul *Peranan Pola Tanam Pada Berbagai Sistem Irigasi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah R/C rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usahatani padi pada sistem irigasi teknis lebih efisien daripada usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana. Hal ini ditunjukkan dari nilai R/C rasio sebesar 2,88 pada sistem irigasi

teknis, R/C rasio sebesar 2,22 pada sistem irigasi semiteknis, R/C rasio sebesar 1,46 pada sistem irigasi sederhana.

Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif merupakan ukuran untuk mengetahui apakah suatu komoditas mempunyai daya saing. Berdasarkan hasil penelitian Rijanto (1994) dengan judul Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Produksi Beras Di Indonesia, diperoleh hasil bahwa produksi padi di Indonesia secara ekonomi efisien dan mempunyai keunggulan komparatif. Hasil analisis dengan menggunakan kriteria DRC (*Domestic Resource Cost*) menunjukkan Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi yang mempunyai keunggulan komparatif dalam usahatani padi. Hal ini dapat diketahui dari koefisien DRC (*Domestic Resource Cost*) yaitu sebesar 0,78. Jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah dengan koefisien DRC (*Domestic Resource Cost*) sebesar 0,84 dan Propinsi Jawa Barat dengan koefisien DRC (*Domestic Resource Cost*) sebesar 0,83. Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi yang mempunyai keunggulan komparatif tertinggi dibandingkan kedua propinsi tersebut dalam usahatani padi.

Hasil penelitian lain mengenai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif seperti yang dilakukan Soetriono (1998). Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani padi di Kabupaten Jember mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai DRC sebesar 0,65 yang berarti bahwa usahatani padi mempunyai keunggulan komparatif, dan nilai PCR sebesar 0,63 yang berarti bahwa usahatani padi mempunyai keunggulan kompetitif.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan Matrik Analisis Kebijakan (PAM) yang dilakukan Pearson dkk (2003), diperoleh hasil bahwa usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis di Propinsi Jawa Timur mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai DRC sebesar 0,54 yang berarti bahwa usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis mempunyai keunggulan komparatif, dan nilai PCR sebesar 0,64 yang berarti bahwa usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis mempunyai keunggulan kompetitif.

Dampak kebijakan pemerintah bisa berdampak positif jika kebijakan pemerintah mampu meningkatkan daya saing dan keuntungan dari sistem usahatani, dan berdampak negatif jika kebijakan pemerintah menurunkan daya saing dan keuntungan dari sistem usahatani. Berdasarkan hasil penelitian Rijanto (1994), kebijakan harga padi/beras berdampak menaikkan harga produksi beras nasional yang mengurangi impor beras dan menghemat cadangan devisa. Subsidi pupuk mendorong naiknya penggunaan pupuk yang pada gilirannya mendorong kenaikan produksi padi. Hal ini berarti kebijakan harga dan kebijakan subsidi memberikan dampak positif bagi usahatani padi.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Soetriono (1998), menunjukkan bahwa dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi secara keseluruhan (terhadap *input output*) tidak berdampak positif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai transfer bersih kebijakan (NPT) sebesar -35.967, nilai koefisien proteksi efektif (EPC) sebesar 0,98, dan nilai koefisien keuntungan (PC) sebesar 0,96, serta nilai subsidi bagi produsen (SRP) sebesar -0,1.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Pertanian

Menurut Wibowo (1993), kebijakan pada dasarnya merupakan campur tangan pemerintah yang mempengaruhi tingkat dan stabilitas harga *input output* yang dapat mempengaruhi biaya dan penerimaan. Selanjutnya Reksoprayitno (2000), mengemukakan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut terbagi ke dalam tiga fungsi pokok. Fungsi *pertama*, adalah fungsi alokasi, yang maksudnya adalah untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat sedemikian rupa sehingga kebutuhan masyarakat akan apa yang disebut *public goods and service* terpenuhi. Fungsi *kedua*, adalah fungsi distribusi yang pada pokoknya mempunyai tujuan berupa terselenggaranya pendapatan nasional secara adil. Fungsi *ketiga* adalah fungsi stabilisasi, termasuk di dalamnya adalah tujuan untuk

terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga yang relatif stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai.

Kebijakan yang bertujuan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, dan menghindari masalah inflasi adalah tujuan kebijakan makro ekonomi. Beberapa kebijakan yang dapat dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan melaksanakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Sukirno, 2001).

Menurut Sukirno (2001), kebijakan yang dijalankan oleh bank pusat untuk mengatur jumlah uang di dalam perekonomian dinamakan kebijakan moneter. Selanjutnya Rahardja dan Manurung (2000), mengemukakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengendalikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berupa pajak, pembangunan sarana prasarana publik, pembayaran gaji pegawai negeri, beasiswa, subsidi dan sebagainya.

Di dalam perekonomian, kebijakan moneter dan fiskal digunakan oleh pemerintah untuk mencapai beberapa tujuan yaitu (Sukirno, 2001):

1. Untuk mengatasi masalah-masalah pokok makro ekonomi yang selalu timbul, yaitu masalah pengangguran, masalah kenaikan harga, dan masalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.
2. Untuk menjamin agar faktor-faktor produksi yang digunakan dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara efisien.
3. Untuk memperbaiki keadaan distribusi pendapatan yang tidak setara yang selalu tercipta di dalam masyarakat yang kegiatan-kegiatan ekonominya terutama yang diatur oleh sistem pasar bebas.

Menurut Baharsjah dalam Bambang (1999), dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disusun kebijakan yang dikelompokkan dalam 3 aspek utama yaitu:

1. Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kelembagaan.
2. Kebijakan yang berkaitan langsung dengan triologi pembangunan yang meliputi upaya peningkatan produksi, agroindustri, sistem distribusi, dan perdagangan pengembangan wilayah dan instansi pertanian.
3. Kebijakan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan pertanian dan kerjasama lintas sektoral dan internasional.

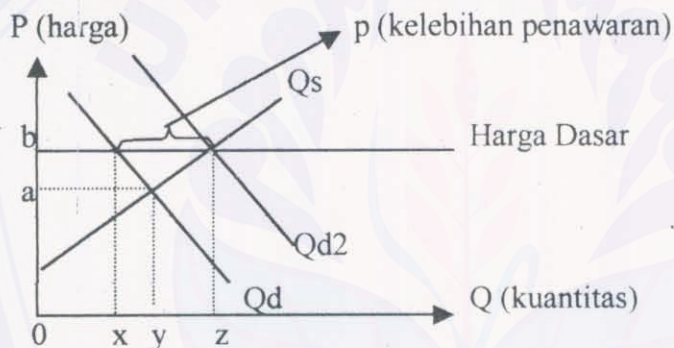
Ketiga kelompok kebijakan tersebut menyiratkan bahwa pertanian dalam arti luas akan terus dikembangkan agar semakin maju, efisien, dan tangguh, dan dilaksanakan dengan memberdayakan perekonomian rakyat melalui pendekatan sistem agribisnis yang terpadu, sehingga makin mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta keanekaragaman hasil pertanian, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi.

Kebijakan dibidang pertanian pada dasarnya adalah kesejahteraan petani, kesejahteraan konsumen, dan ketahanan pangan yang mantap. Kesejahteraan petani semakin meningkat dan tidak tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin tinggi tingkat kemakmuran dan sekaligus tingkat kesejahtraannya (Sumodiningrat dan Kuncoro, 1990).

Kebijakan pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura merupakan elemen kritical dalam menentukan tingkat pertumbuhan dan pola dari pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, fasilitas irigasi, transportasi sangat berpengaruh terhadap produktivitas subsektor tanaman pangan dan hortikultura. Kebijakan ini terbagi atas 2 aspek, aspek *pertama* adalah kebijakan yang memperkuat struktur sektor antara lain berkaitan dengan upaya-upaya: a) peningkatan produktivitas lahan, b) penumbuhan dan pengembangan kelembagaan tani, pembenihan, perlindungan tanaman, pemasaran dan jasa pertanian, c) peningkatan kualitas sumberdaya manusia sektor pertanian, dan d) layanan penelitian dan penyuluhan. Aspek yang *kedua* adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan daya saing komoditas pertanian, baik di pasar lokal maupun di pasar dunia. Aspek ini meliputi kebijakan yang berkaitan

dengan perpajakan, subsidi, pengendalian terhadap beberapa jenis *input* dan *output*, serta kebijakan yang mempengaruhi harga antara lain pengaturan bunga bank, upah buruh, dan nilai tukar rupiah (Rasahan dkk, 1999).

Menurut Siregar (2003), untuk komoditas pangan instrumen kebijakan yang menonjol adalah kebijakan harga dasar, stabilisasi harga dalam negeri, dan perdagangan. Selanjutnya Rahardja dan Manurung (1999), menyatakan bahwa kebijakan harga dasar adalah campur tangan pemerintah untuk menjamin tingkat harga minimum yang diterima produsen. Jika pemerintah menetapkan harga dasar maka konsumen harus membeli dari produsen dengan harga serendah-rendahnya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Dampak kebijakan harga dasar terhadap keseimbangan pasar dapat dilihat pada Gambar 1:

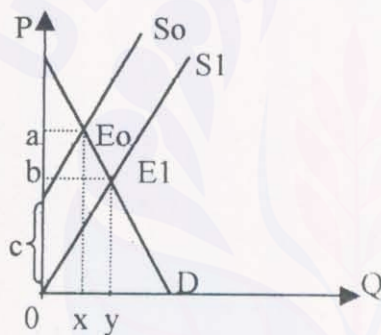


Gambar 1. Kurva Keseimbangan Penetapan Harga Dasar

Gambar 1 menunjukkan bahwa keseimbangan pasar terjadi pada saat harga sebesar a , sedangkan jumlah barang yang tersedia sebesar y . Andaikan pemerintah merasa bahwa jumlah barang terlalu sedikit dan ingin menambah untuk masa yang akan datang dengan menetapkan harga dasar sebesar b , maka akan terjadi kelebihan penawaran sebesar p , sebab penawaran naik sebesar z sedangkan permintaan turun menjadi x . Agar harga tetap pada titik b maka pemerintah harus membeli kelebihan penawaran (p) tersebut. Pembelian pemerintah memperbesar permintaan yang disebut Q_{dp} . Akibatnya kurva permintaan bergeser ke Q_{d2} yang besarnya merupakan $Q_d + Q_{dp}$. Besarnya anggaran yang harus disediakan pemerintah sebesar $p \times b$. Penetapan harga dasar oleh pemerintah merupakan bentuk perlindungan terhadap produsen. Adanya kebijakan harga dasar maka, harga di tingkat produsen akan meningkat dari titik a

(sebelum ada kebijakan) menjadi harga di titik b (setelah ada kebijakan harga dasar).

Menurut Rachman (1990), salah satu kebijakan fiskal yang termasuk dalam pengeluaran kas pemerintah adalah subsidi. Tingkat subsidi adalah biaya per unit yang dibayar kepada barang yang disubsidi, sedangkan total subsidi dihitung dengan mengalikan tingkat subsidi dengan jumlah produksi atau konsumsi yang disubsidi. Selanjutnya Rahardja dan Manurung (1999), mengemukakan bahwa tujuan subsidi adalah membuat harga pada mekanisme pasar lebih rendah dan produsen akan menikmati harga yang lebih tinggi serta konsumen akan menikmati harga yang lebih rendah. Dampak kebijakan subsidi terhadap keseimbangan pasar dapat dilihat pada Gambar 2:



Gambar 2. Kurva Keseimbangan Subsidi

Gambar 2 menunjukkan bahwa E_0 adalah keseimbangan pasar awal yaitu pertemuan antara permintaan (D) dan penawaran awal (S_0). Harga awal (sebelum ada kebijakan subsidi) pada titik a sedangkan jumlah barang yang diminta sebesar x . Agar banyak masyarakat yang mampu membeli suatu produk, pemerintah bermaksud menurunkan harga produk dari a menjadi b . Pada harga setingkat b (setelah ada kebijakan subsidi) maka permintaan meningkat menjadi y , sehingga keseimbangan pasar setelah ada kebijakan subsidi sebesar c bergeser ke titik E_1 dan kurva penawaran S_0 bergeser ke S_1 . Kebijakan subsidi ini akan menguntungkan bagi konsumen karena konsumen menerima harga yang lebih rendah. Hal ini juga berlaku pada mekanisme pasar *input* dimana petani berlaku sebagai konsumen dan perusahaan penyedia *input* berlaku sebagai produsen.

2.2.2 Usahatani Padi

Tanaman padi merupakan tanaman semusim, termasuk golongan rumput-rumputan dengan genus *Oryza Linn*, famili *Gramineae (Poaceae)* dan spesies *Oriza sativa L*. Ada berbagai usaha untuk meningkatkan produksi padi antara lain dengan cara melaksanakan: pola tanam secara ketat, pengaturan pergiliran tanam, dengan tanaman tumpangsari, pengairan, penggunaan zat pengatur tumbuh, menerapkan dengan berbagai teknologi yang lebih maju, seperti supra insus (AAK, 1990).

Menurut Suparyono dan Setyono (1994), berdasarkan ketersediaan air, sawah dapat digolongkan menjadi dua golongan besar, yaitu sawah tadah hujan dan sawah irigasi. Proses usahatani padi pada sawah irigasi sebagai berikut:

1. Persiapan sebelum tanam

Untuk lahan sawah irigasi, persiapan diawali dengan pembajakan yang dapat dilakukan dengan traktor tangan, kerbau atau dicangkul dengan tenaga manusia. Tujuan utama ialah untuk perbaikan tanah agar memperoleh sirkulasi udara dan penyinaran matahari.

2. Pembibitan

Berbeda dengan padi gogo, padi sawah kadang memerlukan pembibitan atau persemaian. Kegiatan pembibitan biasanya dilakukan menurut urutan pemilihan benih, penyiapan lahan persemaian, dan pemeliharaan persemaian.

Pemilihan Benih

Salah satu budidaya padi terletak pada kualitas benih yang ditanam. Benih padi dibagi menjadi empat kelas, yaitu benih penjenis (*breeder seed*), benih dasar (*foundation seed*), benih pokok (*registred seed*) dan benih sebar (*extention seed*).

Persiapan Lahan untuk Persemaian

Tempat persemaian sebaiknya dipilih di salah satu bagian dari lahan yang akan ditanami. Pemilihan tempat untuk persemaian harus mempertimbangkan kemudahan pengaturan air.

Penaburan Benih

Benih yang tersedia di toko merupakan benih yang siap sebar. Sebelum disebar di tempat persemaian, benih direndam dulu kira-kira 48 jam. Selanjutnya, benih disebar di persemaian secara hati-hati dan merata di permukaan persemaian.

Pemeliharaan Persemaian

Persemaian harus dipelihara dengan sebaik-baiknya agar kebutuhan tanaman akan nitrogen, fosfor dan kalium harus dicukupi dengan baik. Sampai bibit berumur satu minggu kebutuhan haranya masih dapat dicukupi oleh kandungan zat dalam keping biji. Sesudah periode itu, bibit perlu tambahan sumber nutrisi dari luar.

3. Penanaman

Cara penanaman padi di lahan sawah dapat dilakukan dengan sebar langsung (*direct seeding*) dan pindah bibit (*transplanting*). Cara sebar langsung dilakukan karena keterbatasan tenaga kerja atau karena tenaga yang mahal.

Cara penanaman pindah bibit merupakan yang paling umum dilakukan di Indonesia. Budidaya padi pindah bibit dilakukan dengan cara memindahkan bibit padi dari persemaian, pada saat bibit berumur antara 18 – 25 hari.

4. Pemeliharaan

Langkah-langkah untuk memberikan lingkungan yang optimal sering dikenal dengan istilah pemeliharaan. Suatu varietas padi akan mampu menampilkan potensi genetiknya kalau ia ditumbuhkan pada kondisi lingkungan yang sesuai. Faktor lingkungan tersebut antara lain sumber makanan, air, suhu, kelembaban, sinar matahari, populasi tanaman persatuan luas, serta keadaan hama dan penyakit. Agar faktor ini baik maka dilakukan pemupukan, pengaturan air, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit serta pengelolaan pasca panen.

Tanaman padi (*Oriza sativa L*) dapat hidup dengan baik di daerah yang berhawa panas dan mengandung uap air. Tanaman padi (*Oriza sativa L*) membutuhkan curah hujan yang baik, rata-rata 200 mm/bulan atau lebih dengan distribusi selama 4 bulan. Curah hujan yang baik akan membawa dampak positif dalam pengairan, sehingga genangan air yang diperlukan tanaman padi (*Oriza sativa L*) sawah dapat tercukupi. Pada ketinggian daerah 0-650 m dari

permukaan laut padi dapat tumbuh dengan baik dengan suhu antara $22,5^{\circ}\text{C}$ - $26,5^{\circ}\text{C}$. Sedangkan pada daerah dengan ketinggian antara 650-1500 m dari permukaan laut dengan suhu antara $18,7^{\circ}$ - $22,5^{\circ}\text{C}$ juga masih cocok untuk tanaman padi (*Oriza sativa L*) (Suparyono dan Setyono, 1994).

Menurut Wirawan dan Wahyuni (2002), padi (*Oriza sativa L*) di Indonesia masih merupakan tanaman pangan utama yang dikonsumsi tidak kurang dari 200 juta penduduk. Selanjutnya Suparyono dan Setyono (1994), mengemukakan bahwa arti penting padi (*Oriza sativa L*) sebagai sumber makanan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang menyebabkan adalah sebagai berikut:

1. Penduduk dunia selalu meningkat. Walaupun sudah dipercayakan melalui program keluarga berencana, kenaikan jumlah penduduk di Indonesia masih tinggi (2% per tahun). Hal ini berarti jumlah orang yang perlu makan juga akan selalu meningkat sehingga usaha pencukupan pangan semakin hari semakin berat.
2. Penciutan lahan pertanian. Dampak negatif dari perkembangan manusia dimanapun ialah perubahan fungsi lahan, dari pertanian ke non pertanian. Di Indonesia diperkirakan 35.000 ha lahan pertanian tiap tahun berubah menjadi tempat mendirikan bangunan, baik perumahan atau pabrik. Umumnya lahan yang berubah fungsi adalah lahan yang sudah sangat bagus untuk produksi padi (*Oriza sativa L*). Oleh karena itu, walaupun diganti dengan luasan yang sama, kehilangan produksi padi belum akan tertutup untuk waktu yang lama.
3. Sumber genetika semakin terbatas. Hal tersebut akan menyebabkan usaha perakitan varietas baru yang diharapkan akan meningkatkan produksi padi (*Oriza sativa L*) sulit untuk dilaksanakan.
4. Penyusutan sumber daya alam. Disamping lahan, air, dan bahan mineral yang merupakan daya dukung alam terhadap produksi padi (*Oriza sativa L*) juga makin berkurang.
5. Kejenuhan tanaman padi (*Oriza sativa L*) terhadap input teknologi. Hal ini akan menyebabkan produksi padi (*Oriza sativa L*) mengalami pelandaian

kenaikan (*levelling off*) yang berarti walaupun *input* dinaikkan, produksi padi (*Oriza sativa L*) sulit ditingkatkan.

2.2.3 Konsep Biaya dan Pendapatan

Input adalah masukan ke dalam proses produksi, seperti tanah yang dipergunakan, tenaga kerja petani dan keluarganya, serta setiap pekerja yang diupah, perencanaan dan manajemen, benih tanaman, pupuk, insektisida, serta alat pertanian. *Output* adalah hasil tanaman yang dihasilkan dari proses budidaya. *Input* dan *output* menyangkut biaya (*cost*) dan penerimaan (*revenue*) (Suwandari dkk, 2002).

Menurut Mulyadi (1999), biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau akan terjadi untuk tujuan tertentu. Selanjutnya Soekartawi (1995), menyatakan bahwa biaya usahatani biasanya diklasifikasikan menjadi yaitu (a) biaya tetap (*fixed cost*) dan (b) biaya tidak tetap (*variable cost*). Biaya tetap (*fixed cost*) didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, contohnya adalah alat pertanian, biaya pajak, iuran irigasi, dan lain sebagainya. Biaya tidak tetap (*variable cost*) didefinisikan sebagai biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, contohnya adalah pupuk, bibit, obat-obatan, dan upah tenaga kerja. Biaya total merupakan penjumlahan antara total biaya tetap dan total biaya variabel, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

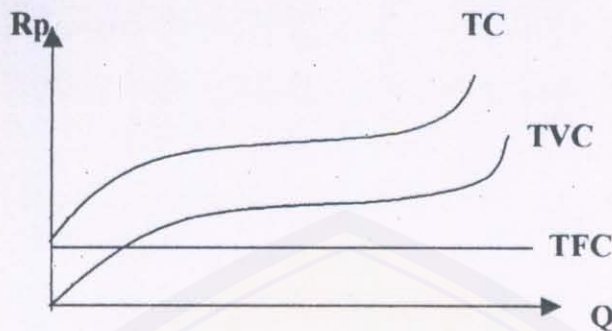
Keterangan:

TC = Total biaya usahatani (Rp)

TVC = Total biaya variabel usahatani (Rp)

TFC = Total biaya tetap usahatani (Rp)

Kurva biaya-biaya untuk faktor produksi dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kurva Biaya Produksi

Pada Gambar 3 bentuk kurva TC sama dengan bentuk kurva TVC, sebab apa yang digambarkan sebagai kurva TC itu tidak lebih dan tidak kurang daripada kurva TVC yang bergeser ke atas, pergeseran itu adalah sebesar biaya tetap yang ada. Jadi selisih antara biaya total dan biaya variabel untuk setiap tingkat *output* adalah sebesar biaya tetap (Rosyidi, 1991).

Perhitungan biaya usahatani dilakukan melalui dua cara, antara lain: perhitungan biaya berdasarkan *analisis finansial* yang merupakan penghitungan biaya yang tidak memperhitungkan penggunaan sumberdaya pribadi, dan penghitungan biaya yang didasarkan pada *analisis ekonomi*, yang merupakan perhitungan dengan menilai seluruh biaya yang dikeluarkan serta manfaat yang diperoleh selama berusahatani (Soekartawi, 1995).

Pendapatan petani akan menjadi lebih besar apabila petani dapat menekan biaya variabel yang dikeluarkan dan diimbangi dengan produksi yang tinggi. Untuk menghitung pendapatan dideteksi dengan rumus (Soekartawi, 1995):

$$\pi = TR - TC$$

$$TR = P \cdot Q$$

$$TC = TFC + TVC$$

Keterangan:

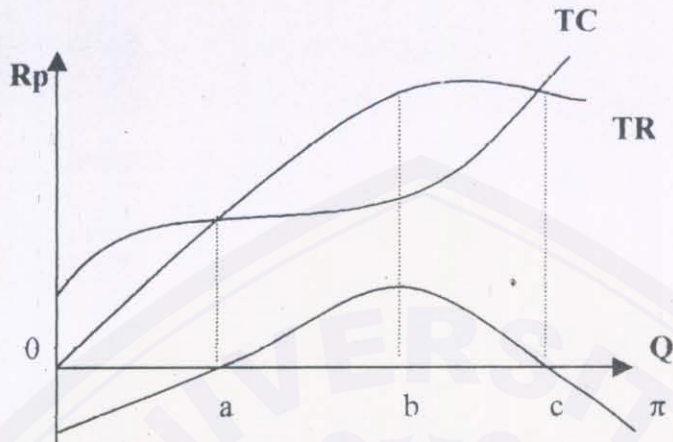
π = Pendapatan bersih (Rp)

TR = Total penerimaan usahatani (Rp)

P = Harga (Rp/Kg)

Q = Produksi (Kg)

Kurva pendapatan bersih (π) dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Kurva TR, TC dan Pendapatan Bersih

Pada Gambar 4 menurut Rahardja dan Manurung (1999), terlihat bahwa tingkat *output* yang memberikan laba adalah antara titik a sampai titik c. Interval titik a sampai titik c dalam teori produksi disebut sebagai daerah produksi ekonomis. Pendapatan bersih maksimum (π maks) akan tercapai jika tingkat produksinya sebesar kuantitas (Q) di titik b. Sebaliknya jika *output* dibawah titik a atau melebihi titik c maka kegiatan produksi akan mengalami kerugian karena $TR < TC$.

2.2.4 Konsep Efisiensi

Efisiensi merupakan tujuan esensial dalam alokasi sumberdaya. Setiap usahatani memiliki tujuan yaitu memaksimalkan keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Menurut Downey (1989), efisiensi didefinisikan sebagai peningkatan rasio antara keluaran dan masukan. Kriteria efisien dalam proses produksi dapat diukur melalui empat cara yaitu:

1. Apabila keluaran tetap sementara masukan yang digunakan berkurang
2. Apabila keluaran meningkat sementara itu masukan yang digunakan tetap
3. Apabila keluaran meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan masukan
4. Apabila keluaran menurun lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan penurunan masukan.

Prinsip optimalisasi penggunaan faktor produksi pada prinsipnya adalah bagaimana menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien. Dalam terminologi ilmu ekonomi, pengertian efisiensi dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif (efisiensi harga), dan efisiensi ekonomis. Suatu penggunaan faktor produksi dikatakan efisien secara teknis (efisiensi teknis) bila faktor produksi yang dipakai menghasilkan produksi yang maksimum. Apabila produsen mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan usahanya, misalnya karena pengaruh harga, maka produsen tersebut dikatakan mengalokasikan faktor produksinya secara efisiensi harga. Selanjutnya dikatakan efisiensi secara ekonomis, kalau usaha yang dilakukan produsen mencapai efisiensi teknis sekaligus juga mencapai efisiensi harga (Soekartawi, 1995).

Alokasi sumberdaya dikatakan efisien dan optimal apabila sumberdaya tersebut tidak dapat ditransfer pada penggunaan lain sehingga mengakibatkan seseorang menjadi lebih baik atau sejahtera (*better-off*), dan pada saat yang sama, tanpa mengakibatkan yang lainnya mengalami kemunduran (*worse-off*). Dalam hal ini harus ada keinginan yang saling menguntungkan untuk melakukan transaksi (Soekartawi, 1995).

Menurut Monke dan Pearson (1989) dalam Aji (1997), untuk mengukur efisiensi ekonomi pada pendekatan PAM (*Policy Analisis Matrix*) dilihat atau dicerminkan secara langsung melalui profitabilitas sosial. Profitabilitas sosial merupakan perbedaan antara penerimaan dan biaya produksi didasarkan atas harga harga sosialnya. Suatu aktifitas dikatakan efisien bilamana menggunakan sumberdaya dengan memberikan tingkat *output* dan pendapatan yang paling tinggi. Profitabilitas sosial dijadikan parameter untuk mengukur efisiensi ekonomi karena *output* dan *input* dinilai atas dasar harga yang mencerminkan nilai kelangkaanya atau pengorbanan sosialnya.

2.2.5 Tipe Sistem Irigasi

Pengertian irigasi secara umum yaitu pemberian air kepada tanah untuk memasok lengas esensial bagi pertumbuhan tanaman. Menurut Pusposutardjo (2001), tujuan umum irigasi yaitu:

1. Menjamin keberhasilan produksi tanaman dalam menghadapi kekeringan jangka pendek
2. Mendinginkan tanah dan atmosfer sehingga sesuai untuk pertumbuhan tanaman
3. Mengurangi bahaya kekeringan
4. Mencuci/melarutkan garam dalam tanah
5. Mengurangi bahaya pemipaan tanah
6. Melunakan lapisan olah dan gumpalan-gumpalan tanah
7. Menunda pertunasan dengan cara pendinginan lewat evaporasi.

Pertanian beririgasi di Indonesia ditandai dengan keanekaragaman kondisi baik dari segi hakikat sumber utama irigasi, tingkat pengaturan air, luas jaringan irigasi, maupun struktur organisasi bagi operasi dan pemeliharaan. Adapun tipe sistem irigasi di Indonesia adalah sebagai berikut (Varley, 1995):

1. Irigasi Teknis

Tipe irigasi ini merupakan kategori utama dipandang dari luas sawah yang teririgasi melalui jaringan primer, sekunder, dan tersier yang biasanya bersumber dari sebuah sungai. Jaringan irigasi ini mempunyai bangunan permanen (dam, bangunan-bangunan bagi atau *diversion box*, bangunan pematah arus atau *break structure*, pintu air) dan kemampuan mengukur dan mengendalikan aliran air.

2. Irigasi Semiteknis

Tipe irigasi ini mempunyai bangunan semi permanen yang tidak menyeluruh pada saluran irigasi, dan masih belum dilengkapi pintu-pintu pengendali yang menghubungkan saluran-saluran. Pada sistem jaringan irigasi semiteknis penjadwalan/rotasi/pengukuran debit air canggih tidak dapat dipenuhi.

3. Irigasi Sederhana

Tipe irigasi ini dapat lebih baik dari apa yang disebut irigasi teknis. Jaringan irigasi sederhana umumnya terletak di dataran tinggi, petak sawah yang lebih

sempit, sumber utama airnya umumnya terletak lebih dekat dengan sumber utama air pegunungan, dan jaringan irigasi tidak permanen.

2.2.6 Konsep Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif

Menurut Sutawi (2002), keunggulan komparatif merupakan ukuran normatif, yaitu mengukur daya saing pada kondisi pasar persaingan bebas, tanpa distorsi. Selanjutnya Saptana dkk (2002), mengemukakan bahwa suatu sistem dikatakan memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang dan jasa jika dalam memproduksi barang dan jasa itu menggunakan komponen dalam negeri lebih besa dari pada menggunakan komponen luar negeri.

Menurut Boediono (2001), ada tiga faktor utama yang menentukan atau yang mempengaruhi keunggulan komparatif suatu negara yaitu:

1. Tersedianya sarana produksi atau faktor produksi dalam macam atau jumlah yang berbeda antara negara satu dengan negara lain atau perbedaan dalam *endowment factor*.
2. Adanya kenyataan bahwa dalam cabang cabang produksi tertentu suatu negara bisa memproduksi secara lebih efisien (lebih murah) apabila skala produksi semakin besar atau adanya *economies of scale*.
3. Adanya perbedaan dalam corak dan laju kemajuan teknologi atau *technological progress*.

Keunggulan kompetitif merupakan ukuran aktual, yaitu mengukur daya saing pada kondisi pasar yang berlaku tanpa mempermasalahkan ada tidaknya distorsi pasar. Salah satu indikator keunggulan kompetitif yang paling sederhana adalah rasio harga produksi dalam negeri dengan produk yang sama di luar negeri. Suatu produk yang memiliki keunggulan komparatif bisa terjadi tidak memiliki keunggulan kompetitif apabila ada hambatan hambatan yang bersifat disinsentif. Sebaliknya suatu produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif bisa terjadi memiliki keunggulan kompetitif apabila pemerintah memberikan proteksi terhadap produk yang bersangkutan. Proteksi perdagangan mencakup semua insentif perdagangan baik kuota, tarif, maupun subsidi. Semua bentuk

perdagangan ini dapat menimbulkan distorsi pasar yaitu mencegah terjadinya pasar persaingan bebas (Sutawi, 2002).

Keunggulan komparatif berkaitan dengan kelayakan ekonomi, sedangkan keunggulan kompetitif berkaitan dengan kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan kelayakan ekonomi yaitu menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menerima manfaat tersebut. Konsep yang sesuai untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau sering disebut *revealed competitive advantage* yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menunjukkan keunggulan baik dalam potensi alam, penguasaan teknologi, maupun kemampuan manajerial dalam kegiatan yang bersangkutan (Sumaryanto dan Supena, 2003).

2.2.7 Konsep Policy Analysis Matrix (PAM)

Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditi padi, dapat menggunakan PAM (*Policy Analysis Matrix*) yang dikemukakan oleh Monke dan Pearson (1989) yaitu merupakan sistem analisis dengan memasukkan berbagai kebijakan yang mempengaruhi penerimaan dan biaya produksi pertanian. PAM disusun untuk mempelajari masing-masing sistem produksi pertanian dengan menggunakan data usahatani, pemasaran dari petani ke pengolah, pengolahan dan pemasaran dari pengolah ke pedagang. Dampak kebijakan komoditi dan ekonomi makro dapat ditaksir dengan cara membandingkan dengan kondisi tanpa adanya kebijakan. Untuk lebih jelasnya pada tabel matrik berikut ini:

Tabel 4. Matrik Analisis Kebijakan

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Input Tradable</i>	Faktor Domestik	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Pengaruh Divergensi	I	J	K	L

Tabel 4 menunjukkan bahwa Matrik Analisis Kebijakan terdiri dari komponen penerimaan, biaya yang meliputi biaya *input tradable* dan biaya *input non tradable* (faktor domestik) dan keuntungan. Penerimaan merupakan hasil yang diterima petani yang diperoleh dari perkalian antara produksi dengan harga jualnya sebelum dikurangi dengan biaya. *Input tradable (tradable goods)* adalah semua *input* yang dapat diperdagangkan secara internasional yaitu bibit, pupuk dan obat-obatan. *Input non tradable* atau disebut juga faktor domestik merupakan semua *input* yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional. Dalam *Policy Analysis Matrix*, yang termasuk dalam *input non tradable* adalah modal, tenaga kerja dan lahan. Sedangkan keuntungan merupakan selisih antara penerimaan dengan nilai *input* yang dikeluarkan dalam usahatani. Menurut Kadariah (1978) dalam Sumaryanto dan Supena (2003) yang disebut dengan *tradable good* adalah barang yang: (1) sekarang diimpor atau diekspor; (2) bersifat pengganti yang erat hubungannya dengan jenis lain yang diekspor atau diimpor; (3) komoditas selain di atas dan dilindungi oleh pemerintah, yang sebenarnya dapat diperdagangkan secara internasional.

Menurut Pearson (1976) dalam Sumaryanto dan Supena (2003), pendekatan yang digunakan untuk mengalokasikan biaya kedalam komponen domestik dan asing, yaitu melalui pendekatan langsung. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seluruh *input tradable*, baik diimpor maupun produksi domestik, dinilai sebagai komponen biaya asing. Pendekatan ini dipergunakan apabila tambahan permintaan *input tradable* baik barang yang di impor maupun produksi domestik dapat dipenuhi dari perdagangan internasional.

Penyusunan matrik PAM dilakukan setelah seluruh data pada tingkat petani dan pelaku tataniaga diperoleh. Penyusunan matrik PAM dilakukan dengan menggunakan struktur *input-output* ditingkat usahatani dan pelaku tataniaga.

Dengan perhitungan ini dapat diperoleh keuntungan baik finansial maupun ekonomi. Dampak kebijakan pemerintah yang diterapkan baik kepada *input*, *output* secara bersama dapat diketahui. Hasil analisis PAM akan memberikan informasi tentang *profitabilitas* di tingkat petani dan di tingkat sosial, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif suatu komoditas, dampak kebijakan pemerintah terhadap sistem komoditas tersebut. Matriks Analisis kebijakan (*Policy Analysis Matrix, PAM*) dapat disajikan pada Tabel 4. Agar mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang matrik analisis kebijakan dapat diuraikan dalam sub bab berikut.

2.2.7.1 Harga Privat Tabel PAM

Baris pertama matrik analisis kebijakan menunjukkan tingkat keunggulan kompetitif yang merujuk pada nilai *revenue* dan biaya *input tradable*, *input non tradable* serta *profit* berdasarkan harga pasar yaitu harga yang mencerminkan nilai-nilai yang di pengaruhi oleh semua kebijakan dan kegagalan pasar. *Profitabilitas Privat* merupakan perbedaan antara *revenue* dan biaya produksi yang didasarkan atas harga yang berlaku di tingkat petani saat itu. Harga pupuk, harga bibit, tenaga kerja dan lain-lain dihitung berdasarkan harga yang berlaku di daerah penelitian (Monke dan pearson, 1989)

Data yang dimasukkan dalam baris pertama dari tabel PAM didasarkan kompilasi data *budget* usahatani. Data pendapatan dan biaya (*budget*) diperlukan untuk ke empat aktivitas pada setiap sistem, pertama untuk tingkat usahatani, kedua *marketing* dari tingkat petani ke pengolah, ketiga pengolahan dan keempat *marketing* dari tingkat pengolahan ke pedagang besar. Data *budget* tersebut dimaksudkan untuk mencerminkan keadaan usahatani atau perilaku petani saat penelitian. Data dalam *budget* mencerminkan rata-rata pendapatan dan biaya (Pearson dkk, 2003).

Dalam melakukan estimasi harga privat maupun harga sosial, prinsip *opportunity cost* harus diterapkan secara konsisten dan komprehensif. *Private opportunity cost* merefleksikan *market choices*. *Opportunity cost* untuk tenaga kerja upahan misalnya adalah upah tenaga kerja (*market wage rate*) dengan

memperhitungkan nilai makan serta biaya lain yang di bayarkan oleh petani, pedagang, ataupun pengolah. *Opportunity cost* tenaga kerja dalam keluarga dinilai setara dengan upah tenaga kerja upahan (karena apabila dia tidak bekerja di sawahnya sendiri, dia bisa mendapatkan upah di tempat lain dengan tingkat upah yang sama). Nilai sewa lahan untuk berbagai kualitas dan lokasi lahan amat tergantung kepada tingkat produktivitas lahan tersebut dalam menghasilkan berbagai macam produk pertanian, dan akan tercermin dari nilai sewa lahan, atau setara nilai sewa lahan bila lahan tersebut menggunakan sistem bagi hasil (Pearson dkk, 2003).

2.2.7.2 Harga Sosial Tabel PAM

Baris kedua matrik analisis kebijakan menunjukkan keunggulan komparatif yang merujuk pada nilai *revenue*, *input tradable*, *input non tradable* dan *profit* yang dinyatakan dalam harga sosial atau harga efisiensinya yang diasumsikan tanpa adanya kebijakan pemerintah dan kegagalan pasar di dalamnya. *Profitabilitas sosial* merupakan perbedaan antara *revenue* dan biaya produksi yang didasarkan atas harga-harga sosialnya, merupakan kriteria tingkat efisiensi tingkat ekonomi. Investasi baru yang menurunkan biaya sosial juga akan meningkatkan profit sosialnya. Susunan *profitabilitas sosial* berbagai sistem produksi akan mengurangi analisis manfaat dan biaya yang diperlukan untuk memilih berbagai alternatif investasi. *Profitabilitas* sebagai perbedaan antar *revenue* dan biaya dan pengaruh divergensi berkenaan dengan perubahan kebijakan merupakan identitas matrik analisis kebijakan. *Profitabilitas sosial* merupakan ukuran efisiensi, sebab *output* dan *input* dinilai atas dasar harga yang mencerminkan nilai kelangkaannya atau pengorbanan sosialnya (*social opportunity cost*). Sistem usahatani yang dibandingkan menghasilkan *output* yang berbeda, kriteria investasi relatif dapat ditentukan dengan menggunakan cara pendekatan sumber daya domestik (DRC) (Monke dan Pearson, 1989)

Menurut Sumaryanto dan Supena (2003), Penentuan harga sosial dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian terhadap penyimpangan harga yang terjadi, baik sebagai akibat kebijakan pemerintah (subsidi, pajak, tarif,

kebijakan harga) maupun distorsi pasar. Dalam penentuan harga sosial diasumsikan perdagangan di pasar dunia adalah persaingan sempurna, maka penentuan harga bayangan untuk *input* dan *output* yang bersifat *tradable goods* menggunakan harga batas (*border price*), seperti dilakukan Gettinger (1986) yaitu Untuk barang yang *exportable* atau potensial ekspor akan digunakan harga FOB. Harga barang tersebut menunjukkan *opportunity cost* satu unit tambahan produksi domestik karena unit tersebut untuk di ekspor, bukan untuk konsumsi dalam negeri. Sedangkan untuk barang yang di impor akan menggunakan harga CIF. Untuk sebuah barang yang *importable* harga impor barang tersebut menunjukkan *opportunity cost* untuk menghasilkan tambahan satu unit produk untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Selanjutnya harga batas tersebut dilakukan penyesuaian sampai ditingkat mana analisis dilakukan.

Ketika menentukan harga dunia untuk *input tradable* dan *output tradable*, peneliti harus mempertimbangkan tiga hal yaitu lokasi, waktu dan kualitas (bentuk) dari komoditas yang diteliti. Harga domestik dan harga dunia untuk komoditas yang diteliti harus diperbandingkan pada lokasi yang sama. Bila tidak, harga-harga tersebut tidak bisa diperbandingkan (tidak *comparable*) karena kesalahan akan timbul dari biaya. Transformasi atas lokasi, waktu dan bentuk adalah tiga fungsi utama dari pemasaran komoditas pertanian. Oleh karena itu, perbandingan harga domestik dengan harga dunia harus dilakukan untuk titik yang sama pada rantai tataniaga (Pearson dkk, 2003).

Bila efek divergensi tidak begitu signifikan pada kegiatan transportasi dari petani ke pengolah, pengolah dan transportasi dari pengolahan ke pedagang besar, akan lebih mudah bila ke empat aktivitas tersebut di gabungkan ke dalam satu tabel PAM sehingga perbandingan harga domestik dan harga dunia cukup dilakukan pada tingkat petani saja. Sehingga perlu mencari harga paritas impor untuk barang-barang substitusi impor dan harga paritas ekspor untuk barang-barang yang memasuki pasar ekspor. Menurut Pearson dkk (2003), untuk harga paritas impor, biaya transportasi dan *handling* di dalam negeri harus ditambahkan kepada harga impor di tingkat pelabuhan karena harga impor tersebut harus dibawa ke pasar pedagang besar terdekat untuk berkompetisi dengan produk

dalam negeri. Sebaliknya untuk harga paritas ekspor, biaya transportasi dan *handling* domestik harus di kurangkan dari harga di pelabuhan karena produk dalam negeri harus dibawa ke pelabuhan dari pasar pedagang besar terdekat untuk bisa diekspor.

Perhitungan harga sosial untuk barang *non tradable* berbeda dengan barang *tradable*. Seperti halnya barang *tradable*, harga privat untuk *non tradable* di ambil dari tabel privat *budget* di tingkat petani. Namun, tidak ada harga dunia (*border price*) untuk *non tradable* yang bisa digunakan sebagai harga efisiensi, seperti halnya barang *tradable*. Oleh karena itu, harga sosial untuk barang *non tradable* diestimasi dengan mengurangkan divergensi yang terjadi (baik karena distorsi kebijakan maupun kegagalan pasar) dari nilai privatnya (Pearson dkk, 2003).

Biaya faktor domestik diperlakukan berbeda dengan *tradable input* karena tidak ada harga internasional untuk faktor domestik, yang seharusnya digunakan sebagai nilai *sosial opportunity cost* nya. Sebagian dari faktor domestik, seperti modal dan tenaga kerja, memang ada yang bekerja dan mendapat penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Namun *opportunity cost* dari faktor domestik tersebut ditentukan di dalam negeri, bukan di pasar internasional. Upah, tingkat bunga dan sewa lahan amat ditentukan oleh permintaan dan penawaran (atas faktor domestik) di dalam negeri, bukan oleh *opportunity* mempekerjakan faktor faktor tersebut di luar negeri. Dengan kata lain, faktor domestik tersebut tidak sepenuhnya *tradable* secara internasional, dan tidak ada harga internasional yang dapat digunakan sebagai angka perkiraan yang baik untuk *opportunity cost* dalam negeri.

Menurut Pearson dkk (2003), faktor domestik dapat diestimasi lebih rinci sebagai berikut :

1. Estimasi Tingkat Upah Privat dan Sosial

Dalam menyusun *budget* usahatani yang rinci, tenaga kerja bisa di klasifikasikan kedalam beberapa kategori, misalnya menurut jenis kelamin, golongan umur, tingkat ketrampilan. Isu utamanya adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan produktivitas antar kategori, yang bisa

menyebabkan tingkat upah yang berbeda. Data aktual tentang tingkat upah privat (dikalikan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan) dimasukkan kedalam cel C pada Tabel PAM.

Tingkat divergensi di pasar tenaga kerja pedesaan di Indonesia sangat kecil. Distorsi tidak begitu signifikan, karena peraturan tentang upah minimum tidak bisa berlaku di sektor pertanian dan tidak memiliki dampak yang berarti dalam perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, harga privat untuk upah tenaga kerja pedesaan untuk seluruh kategori merupakan penduga yang baik untuk harga sosial upah tenaga kerja.

2 Estimasi Tingkat Bunga Privat dan Sosial

Tingkat bunga, baik sosial maupun privat, harus diestimasi dalam analisis PAM. Wawancara baik dengan petani, pedagang, ataupun pengolahan, diharapkan dapat menggali informasi tentang sumber kredit atau sumber modal serta tingkat bunga yang harus dibayar untuk setiap sumber kredit ataupun modal tersebut. Ada empat sumber kredit yang umumnya ditemukan di negara berkembang yaitu: (1) tabungan keluarga; (2) lembaga perkreditan formal seperti bank pemerintah, baik bank komersil atau lembaga keuangan lainnya; (3) pemilik toko/kios/warung serta pedagang yang menjual pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya; (4) pelepas uang (rentenir).

Pemerintah juga memberikan subsidi kredit pertanian. Tingkat bunga bersubsidi amat jarang mencerminkan tingkat bunga privat yang dihadapi petani karena program subsidi umumnya tidak berhasil menyentuh sebagian besar petani. Peneliti lapangan harus yakin betul akan efektivitas kredit bersubsidi tersebut untuk menentukan tingkat bunga yang di bayar petani pada sistem pertanian yang sedang diteliti.

Biaya modal dalam analisis PAM diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu modal kerja (*working capital*) dan modal investasi (*investment capital*). Modal kerja adalah biaya produksi (tunai atau cash) yang harus di bayar petani. Modal investasi adalah pengeluaran atas aset yang memberikan kegunaan (*productive services*) lebih dari satu tahun. Untuk mengestimasi tingkat bunga sosial modal kerja dan modal investasi, peneliti harus

menggunakan cara yang bersifat *arbitrary rule of thumb* yaitu pengalaman dari negara berkembang atau negara maju lainnya pada saat negara-negara tersebut berada pada tingkat pembangunan yang sama dengan negara yang sedang menjadi fokus penelitian. Tingkat bunga sosial untuk modal investasi di Indonesia sekitar 10 – 15 persen setahun (ditambah tingkat inflasi). Untuk modal kerja, tingkat bunga privat juga bervariasi cukup besar. Berdasarkan pengalaman negara lain, tingkat bunga privat untuk modal kerja diperkirakan sekitar 15 – 20 persen per tahun (ditambah tingkat inflasi).

3. Estimasi Harga Sewa Lahan Sosial

Penentuan harga sosial dari lahan mengikuti prinsip *social opportunity cost*. Di lihat dari sudut pandang perekonomian nasional, nilai sosial dari sewa lahan adalah sama dengan keuntungan sosial (H) lahan yang diperoleh dari komoditas alternatif terbaik sebelum dikurangi nilai sewa lahan.

Nilai privat sewa lahan pertanian di Indonesia bervariasi sesuai dengan kualitas lahan dan lokasi (biasanya mencerminkan tingkat profitabilitas privat usahatani). Bila memungkinkan, nilai sosial sewa lahan diperoleh dengan menghitung nilai keuntungan sosial dari komoditas alternatif terbaik. Bila tidak memungkinkan, biaya lahan dikeluarkan baik dari perhitungan keuntungan privat maupun sosial, sehingga keuntungan privat dan sosial didefinisikan sebagai balas jasa bagi lahan dan manajemen (*return to land and management*).

2.2.7.3 Pengaruh Divergensi Tabel PAM

Baris ketiga matrik analisis kebijakan menunjukkan pengaruh divergensi yang mencerminkan dampak dari adanya kebijakan pada suatu sistem. Campur tangan pemerintah dapat dilihat dari besarnya *transfer output* dan *transfer input*. *Transfer output* menunjukkan besarnya perbedaan penerimaan usahatani yang benar-benar di terima dengan penerimaan yang menggunakan harga sosialnya (tanpa kebijakan atau pasar bebas). *Transfer input* menunjukkan besarnya perbedaan *input* usahatani yang benar-benar di terima dengan *input* yang menggunakan harga sosialnya (tanpa kebijakan atau pasar bebas). *Net transfer*

adalah selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar di terima (privat) dengan keuntungan bersih sosial (dengan asumsi pasar persaingan sempurna). Transfer bersih menyatakan tambahan surplus produsen atau sebaliknya berkurang surplus produsen yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Keunggulan komparatif dalam proses produksi suatu komoditas akan terjadi bilamana total biaya sosial lebih kecil dari total penerimaan sosial (Monke dan Pearson, 1989).

Menurut Saptana, Supena dan Purwantini (2002), kebijakan pemerintah yang di analisis dalam *Policy Analysis Matrix* terhadap *input* dapat berupa kebijakan perdagangan serta subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya dapat disebabkan adanya kegagalan pasar. Kebijakan pemerintah terhadap *output* dapat berupa kebijakan perdagangan yang berupa pajak ekspor, tarif impor serta kebijakan subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya dapat disebabkan adanya kegagalan pasar.

Kegagalan pasar terjadi apabila pasar gagal menciptakan suatu *competitive outcome* dan harga efisiensi. Jenis kegagalan pasar yang umum adalah monopoli, *externality*, dan pasar faktor produksi yang tidak sempurna. Kebijakan yang distortif adalah intervensi pemerintah yang menyebabkan harga pasar berbeda dengan harga efisiensinya. Pajak/subsidi, hambatan perdagangan, atau regulasi harga bisa menimbulkan divergensi. Kebijakan yang distortif umumnya dilakukan dalam rangka mencapai tujuan non-efisiensi (pemerataan atau ketahanan pangan) (Pearson dkk, 2003).

2.3 Kerangka Pemikiran

Padi tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis. Untuk padi sawah, ketersediaan air yang mampu menggenangi lahan tempat penanaman sangat penting. Oleh karena air menggenangi terus menerus maka tanah sawah harus memiliki kemampuan menahan air. Untuk kebutuhan air tersebut, diperlukan sumber mata air yang besar, kemudian ditampung dalam bentuk waduk (danau) (Suparyono dan Setyono, 1997).

Padi merupakan bahan makanan pokok yang menghasilkan beras. Bahan makanan ini merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan lainnya. Karena padi memiliki posisi tersendiri yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia (AAK, 1990).

Menurut Noor (1996), padi merupakan tanaman paling luas dibudidayakan meliputi sekitar 143,5 juta ha, diantaranya sekitar 90% lebih berada di kawasan Asia. Luas areal padi pada setiap negara sangat tergantung kepada kebijakan (*politic will*) masing-masing pemerintah. Walaupun ada kecenderungan luas areal padi semakin menyempit, tetapi permintaan terhadap komoditas ini cenderung meningkat. Diperkirakan hampir 40% (hampir sekitar satu miliar) penduduk dunia menggantungkan sumber kalori utama pada padi.

Perkembangan amat pesat pada pola konsumsi pangan yang bersandar pada bahan makanan pokok beras, sehingga permintaan akan beras melebihi kapasitas produksinya. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan juga perbaikan pola konsumsi pangan dari semula beragam menjadi pola pangan pokok beras, impor beras meningkat tajam (Rijanto, 1997).

Permintaan beras yang cenderung meningkat, membuka peluang bagi petani dan pedagang untuk mengusahakan komoditas padi. Oleh karenanya pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Jember diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil sektor pertanian tanaman pangan khususnya tanaman padi.

Untuk itu kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi dilaksanakan dengan mengembangkan sentra produksi komoditas padi di Kabupaten Jember. Daerah yang potensial bagi pengembangan produksi komoditas padi di Kabupaten Jember adalah Kecamatan Bangsalsari dan Kecamatan Sumberbaru, mengingat luas panen, produktivitas, dan produksi kedua daerah tersebut merupakan dua daerah terbesar yang menghasilkan komoditas padi. Luas panen, produktivitas, dan produksi padi di Kabupaten Jember tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Komoditas Padi di Kabupaten Jember Tahun 2002

No	Kecamatan	Luas Panen (ha)	Produktivitas (kw/ha)	Produksi (kw)
1.	Sumberbaru	7.802	54,69	426.690
2.	Bangsalsari	7.778	53,24	414.080
3.	Rambipuji	7.048	52,21	368.010
4.	Jenggawah	6.650	52,89	351.720
5.	Umbulsari	6.308	55,69	351.300

Sumber: Badan Pusat Statistik 2002.

Berdasarkan Tabel 5 Kecamatan Sumberbaru merupakan penghasil padi terbesar yaitu 426.690 kw pada tahun 2002, dan diikuti dengan Kecamatan Bangsalsari di urutan kedua yaitu sebesar 414.080 kw pada tahun 2002. Beragamnya sumber daya terutama luas lahan yang terdapat pada tiap tiap kecamatan mempengaruhi kemampuan produksi komoditas padi. Namun secara umum di Kabupaten Jember merupakan sentra produksi komoditas padi dengan wilayah yang menyebar di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Jember.

Sebagai upaya dalam meningkatkan produksi komoditas padi di Kabupaten Jember untuk memenuhi kebutuhan komoditas padi/beras dalam negeri dan meningkatkan ekspor, maka perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan petani. Untuk meningkatkan produksi komoditas padi maka diupayakan program intensifikasi dan ekstensifikasi. Menurut Rijanto (1997), program intensifikasi akan meningkatkan produktivitas lahan yang menggunakan *input* produksi yang optimal dan berkualitas. Program ekstensifikasi dapat memberikan sumbangan cukup besar dalam upaya peningkatan perluasan areal panen.

Dalam usaha intensifikasi ini diterapkan teknologi panca usaha tani yang meliputi: (1) penyediaan air untuk sawah-sawah dan jumlah yang cukup serta waktu yang tepat, (2) penggunaan bibit unggul yang mempunyai ketahanan hidup yang tinggi dan masa tumbuh relatif pendek, (3) tersedianya pupuk yang cukup, (4) pengendalian hama terpadu, dan (5) cara bercocok tanam yang baik (Rasahan dkk, 1999).

Pengairan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peningkatan produksi pertanian melalui panca usahatani. Air adalah syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman. Air dapat dari hujan atau harus melalui

pengairan yang diatur oleh manusia, kedua hal tersebut harus disesuaikan agar benar-benar tanaman mendapat air secukupnya, tidak kurang tetapi juga tidak terlalu banyak. Pengairan meliputi pengaturan kebutuhan air bagi tanaman sehingga di dalamnya termasuk juga drainase dan banyak yang menamakan pengairan yaitu dengan membawa air dari sungai ke sawah-sawah.

Perbaikan irigasi mempengaruhi produksi, baik dengan memperluas areal yang dapat ditanami pada musim kemarau maupun memperbaiki hasil produksi dan memperkecil kekurangan air. Hubungan antara kemudahan memperoleh air dan pemakaian varietas unggul, dapat diamati bahwa para petani yang tidak memiliki air yang terjamin sering lebih menyukai varietas unggul yang cenderung lebih peka terhadap kekeringan air, mempunyai musim tanam yang pendek, dan karenanya mengurangi kemungkinan mengalami kekeringan dimusim kemarau. Akan tetapi tidak ada tipologi sistem irigasi yang dapat dikaitkan dengan varietas yang ditanam (Varley, 1995).

Menurut Rijanto (1997), peranan air irigasi terhadap penggunaan pupuk adalah sangat besar, karena kondisi kecukupan tersedianya air irigasi akan mendorong penggunaan pupuk lebih meningkat. Penggunaan pupuk sebagai sarana produksi merupakan hal yang sangat penting. Penggunaan pupuk yang optimal disamping dipengaruhi kondisi lahan, juga kondisi kemampuan pemberian pupuk yang dapat disediakan, oleh karena itu peranan pemerintah untuk mendorong penggunaan pupuk yang optimal dan kebijakan harga pupuk yang sangat memadai sangat penting.

Ketersediaan air merupakan salah satu syarat tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Pasokan air yang optimal akan meningkatkan produksi tanaman padi. Sistem pengairan/irigasi yang digunakan petani di Desa Tisnogambar dan Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari merupakan sistem irigasi teknis dan sistem irigasi sederhana. Sedangkan di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru banyak menggunakan sistem irigasi semiteknis. Selanjutnya Pasandaran (1991), mengemukakan bahwa peranan air irigasi untuk tanaman padi sawah selain secara langsung dapat meningkatkan produksi per hektar dan intensitas tanaman padi,

juga merangsang penggunaan varietas unggul, pupuk kimia serta efektivitas dan efisiensi teknologi.

Tingginya hasil sawah beririgasi disebabkan dua hal. Pertama, produktivitas sawah beririgasi lebih tinggi dari pada sawah tidak beririgasi (tadah hujan). Kedua, intensitas tanaman sawah beririgasi juga lebih tinggi dari pada sawah tidak beririgasi (tadah hujan). Tingginya produktivitas sawah beririgasi karena dosis pupuk kimia yang digunakan juga lebih tinggi sebab resiko kegagalan panen lebih kecil. Sebaliknya sawah tadah hujan, dosis pemupukan kimia jauh lebih rendah karena resiko kekurangan air lebih besar sehingga resiko kegagalan panen juga lebih besar. Disamping itu respon varietas unggul terhadap pupuk kimia sawah irigasi lebih baik dari pada sawah tadah hujan yang airnya tidak terjamin baik jumlah maupun keteraturanya.

Produksi yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh petani dalam setiap kegiatan usaha, akan tetapi dengan produksi yang tinggi belum tentu dapat dikatakan efisien dan dapat meningkatkan pendapatan petani padi meskipun petani sudah menggunakan system irigasi yang baik. Pendapatan yang tinggi bisa diperoleh, jika petani padi mampu mempertimbangkan harga jual produksi dengan melakukan perhitungan terhadap semua unsur biaya dan mengurangi hasil produksi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya, sehingga akan didapatkan nisbah dari nilai hasil dan biaya. Semakin tinggi nisbah tersebut maka usahatani padi akan lebih efisien.

Peningkatan efisiensi merupakan usaha yang sangat penting, karena peningkatan efisiensi di setiap tingkat kegiatan produksi akhirnya dapat meningkatkan daya saing. Selanjutnya menurut Sutawi (2002), daya saing dicirikan antara lain berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya di pasar internasional, mengandalkan produktivitas, nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital driven*), pemanfaatan teknologi (*innovation driven*) serta kreativitas sumber daya manusia (*skill driven*) dan bukan lagi mengandalkan kelimpahan sumber daya alam dan tenaga kerja yang tak terdidik (*factor driven*).

Daya saing suatu produk di pasar internasional pada umumnya diukur dengan dua cara yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Salah satu indikator keunggulan komparatif adalah analisis biaya sumber daya domestik (BSD) atau *Domestic Resource Cost Analysis* (DRC). Analisis BSD atau DRC ini digunakan untuk mengukur berapa besarnya satu satuan devisa yang dapat dihemat bila produk tersebut di produksi dalam negeri. Nilai BSD atau DRC lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa suatu produk memiliki keunggulan komparatif dan jika nilai BSD atau DRC lebih dari satu berarti produk tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif (Sutawi, 2002).

Salah satu indikator keunggulan kompetitif yang paling sederhana adalah rasio harga produk yang diproduksi dalam negeri dengan produk yang sama produksi luar negeri. Jika harga produk yang diproduksi di dalam negeri lebih rendah atau lebih murah dari harga produk yang diproduksi diluar negeri maka produk tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Menurut Monke dan Pearson (1989), dalam pendekatan PAM untuk mengukur keunggulan kompetitif dapat memperhatikan *Profit Cost Ratio* (PCR) yaitu perbandingan antara biaya faktor domestik dan nilai tambah menurut harga pasar yang berlaku. Nilai PCR kurang dari satu menunjukkan bahwa sistem usahatani memiliki keunggulan kompetitif. Sedangkan PCR lebih dari satu menunjukkan bahwa sistem usahatani tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Menurut Sopater dkk (1998), berlangsungnya liberalisasi perdagangan membawa peluang dan tantangan baru bagi agribisnis nasional. Dengan diminimumkan tarif perdagangan, maka pasar produk agribisnis pada setiap negara akan semakin terbuka, sehingga persaingan antara produsen produk agribisnis akan semakin ketat. Jika agribisnis komoditas padi di Kabupaten Jember mampu bersaing, maka agribisnis-komoditas padi di Kabupaten Jember akan mampu meningkatkan pangsa pasar ditingkat regional, nasional dan internasional. Sebaliknya jika agribisnis komoditas padi di Kabupaten Jember tidak mampu bersaing, maka bukan hanya pangsa pasar yang hilang di pasar nasional dan internasional tetapi juga di pasar regional akan terdesak.

Produksi komoditas padi pada dasarnya bisa ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan menuju swasembada beras, jika petani secara aktif terdorong untuk meningkatkan produksinya. Salah satu perangsang yang secara efektif dapat mendorong petani meningkatkan hasil produksi yang bersifat ekonomis adalah perbandingan harga antara hasil usahatani dan harga *input* yang dibeli.

Pembangunan pertanian khususnya peningkatan produksi tanaman pangan (beras) bertujuan memantapkan swasembada pangan (beras) sekaligus meningkatkan mutu pangan dengan meningkatkan penyediaan protein nabati. Selanjutnya menurut Amang (1995), kebijakan dibidang pangan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan, khususnya kebijakan dibidang harga.

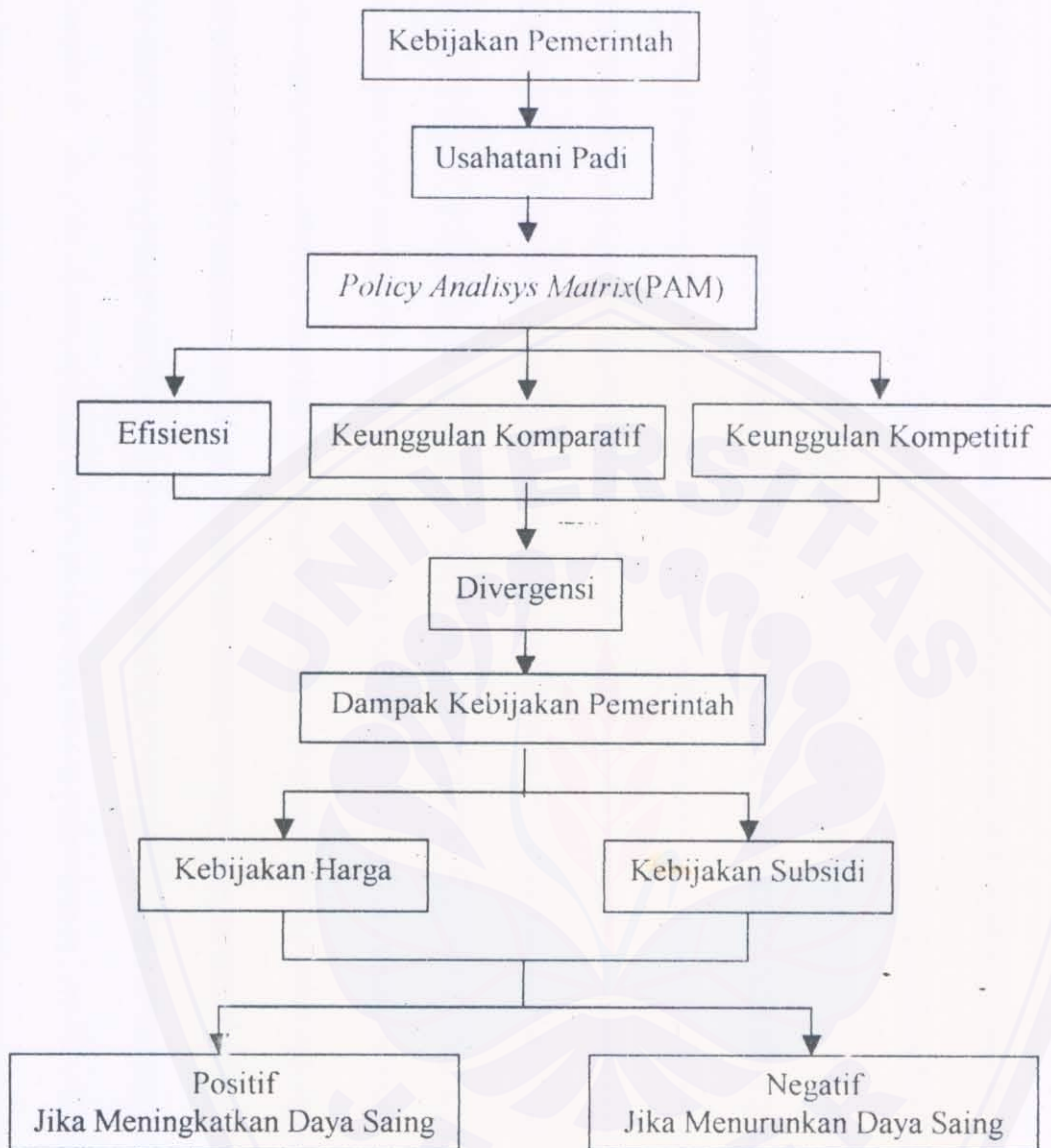
Kebijakan harga yang dilakukan pemerintah pada dasarnya memiliki dua sisi yaitu, sisi yang menunjang produksi dan sisi yang mengarahkan distribusi. Kebijakan dibidang pertanian produksi bertujuan untuk meningkatkan produksi beras antara lain dilakukan pemerintah melalui program intensifikasi, pembangunan irigasi, riset dan pengembangan teknologi. Sedangkan kebijakan dibidang distribusi adalah untuk mengarahkan agar ketimpangan produksi antar waktu dan antar tempat dapat diatasi melalui mekanisme harga (Amang, '993).

Kebijakan harga merupakan instrumen pokok kebijakan pengadaan pangan dengan sasaran adalah: (a) melindungi produsen dari kemerosotan harga pasar yang biasanya terjadi pada musim panen, (b) melindungi konsumen dari kenaikan harga yang melebihi daya beli khususnya pada musim paceklik, serta (c) mengendalikan inflasi melalui stabilitas harga (Amang, 1995).

Selain itu, upaya untuk mendorong petani agar tetap menggunakan *input* sesuai dengan anjuran pemerintah, maka pemerintah banyak memberikan subsidi kepada petani atas dasar harga *input*. Menurut Amang (1995), khusus untuk *input* pupuk, bahan kimia, serta benih unggul pemerintah menetapkan harga subsidi kepada petani dengan harapan petani dapat menerapkan jenis teknologi tersebut kedalam usahatannya.

Beberapa aspek di atas menarik untuk di pelajari tentang efisiensi, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif komoditas padi serta sejauh mana dampak kebijakan *input output* yang telah diambil pemerintah khususnya terhadap komoditas padi di Kabupaten Jember. Penelitian ini akan mengulas ketiga hal tersebut terutama yang berkaitan dengan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap komoditas padi di Kabupaten Jember dengan menggunakan metode analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*).

Melalui pendekatan PAM (*Policy Analysis Matrix*) diatas, tentunya akan diketahui dampak kebijakan *input* dan produksi di tingkat usahatani komoditas padi terhadap keseluruhan sistem usahatani. Jika hasil menunjukkan dampak positif berarti kebijakan harga dan subsidi mampu meningkatkan daya saing serta profit dari sistem usahatani komoditas padi, namun jika menunjukkan hasil yang negatif berarti kebijakan harga dan subsidi pemerintah justru akan menurunkan daya saing dan profit dari suatu sistem usahatani padi. Adapun skema dari kerangka pemikiran di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Skema Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

1. Usahatani padi pada sistem irigasi teknis lebih efisien dari pada usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan usahatani pada sistem irigasi sederhana.
2. Terdapat keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam usahatani padi.
3. Kebijakan pemerintah memberikan dampak positif terhadap usahatani padi.



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tisnogambar, Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive method*) dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah-daerah sentra produksi padi (*Oriza sativa L*) yang potensial dengan berbagai alternatif sistem irigasi. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 5.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, analitik, dan komparatif. Metode deskriptif merupakan metode yang memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, menguji hipotesis, mendapatkan makna dan implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan. Metode analitik digunakan dengan menerapkan beberapa analisis yang berkaitan dengan penelitian dengan cara menyusun data terlebih dahulu, kemudian dianalisis dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam. Metode komparatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena-fenomena dan membandingkan fenomena-fenomena tertentu dimana data yang dikumpulkan setelah semua kejadian selesai berlangsung (Nazir, 1999).

3.3 Metode Pengambilan Contoh

Metode pengambilan contoh pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Menurut Purwadi (2000), *Purposive Sampling* adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan secara *non probability* dengan sampel yang diambil sesuai dengan kriteria tertentu. Tipe *Purposive Sampling* yang digunakan yaitu *Quota Sampling*, berarti bahwa populasi dibagi menjadi sejumlah segmen. Pembagian segmen pada penelitian ini yaitu berdasarkan tipe sistem irigasi pada usahatani padi (irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana).

Jumlah sampel ditetapkan 30 responden yang terdiri atas 10 responden yang menggunakan sistem irigasi teknis yang berada di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, 10 responden yang menggunakan sistem irigasi semiteknis yang berada di Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru, dan 10 responden yang menggunakan sistem irigasi sederhana yang berada di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari.

Metode *Quota Sampling* digunakan untuk mengambil sejumlah sampel yang berasal dari tiap-tiap segmen populasi yang sesuai dengan quota pada masing-masing segmen. Peneliti diberi kebebasan memilih responden yang sesuai dengan karakteristik segmen yang menjadi quotanya. Pada *Quota Sampling* tidak diperlukan data mengenai karakteristik seluruh anggota populasi sebagai dasar pembentukan segmen (Sukandarrumidi, 2002).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dimana :

1. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan metode wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah ditentukan.
2. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber instansi yang terkait yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Kecamatan Bangsalsari, dan Kecamatan Sumberbaru.

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*), dimana matrik analisis kebijakan ini akan mampu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data-data dan kenyataan di lapang (Monke dan Pearson, 1989).

Tabel 6. Matrik Analisis Kebijakan

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		<i>Input Tradable</i>	Faktor Domestik	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Pengaruh Divergensi	I	J	K	L

3.5.1 Efisiensi Usahatani Padi

Untuk mengetahui efisiensi usahatani padi (*Oriza sativa L.*) digunakan nilai profitabilitas dengan rumus (Monke dan Pearson, 1989)

$$\text{Profitabilitas Privat (D)} = A - B - C$$

$$\text{Profitabilitas Sosial (H)} = E - F - G$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Profitabilitas positif, maka usahatani padi (*Oriza sativa L.*) dikatakan efisien.
- Profitabilitas negatif, maka usahatani padi (*Oriza sativa L.*) dikatakan tidak efisien.

3.5.2 Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komparatif Usahatani Padi (*Oriza sativa L.*)

Untuk mengetahui keunggulan kompetitif komoditas padi (*Oriza sativa L.*) menurut Monke dan Pearson (1989), digunakan Rasio Biaya Privat (PCR) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PCR} = C / (A - B)$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- $\text{PCR} < 1$, maka terdapat keunggulan kompetitif dalam usahatani padi (*Oriza sativa L.*)
- $\text{PCR} > 1$, maka tidak terdapat keunggulan kompetitif dalam usahatani padi (*Oriza sativa L.*)

Untuk mengetahui keunggulan komparatif usahatani padi (*Oriza sativa L*) menurut Monke dan Pearson (1989), digunakan Rasio Biaya Sumber Daya Domestik (DRC) dengan rumus sebagai berikut :

$$DRC = G / (E - F)$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- DRC < 1, maka terdapat keunggulan komparatif dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*)
- DRC > 1, maka tidak terdapat keunggulan komparatif dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*)

3.5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi (*Oriza sativa L*)

3.5.3.1 Kebijakan Pemerintah Terhadap Output

Kebijakan ini diterangkan dengan *Nominal Protection Coefficient Output* (NPCO). Menurut Monke dan Pearson (1989), nilai NPCO menunjukkan dampak insentif dari kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai *output* yang diukur dengan harga privat dan harga sosial. Nilai NPCO juga merupakan indikator dari transfer *output* dengan rumus:

$$NPCO = A / E$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- NPCO > 1, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- NPCO < 1, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

3.5.3.2 Kebijakan Pemerintah Terhadap Input Tradable

Menurut Monke dan Pearson (1989), untuk mengetahui seberapa besar campur tangan pemerintah terhadap petani juga untuk melihat seberapa besar subsidi yang diberikan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) maka indikator yang digunakan *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI) dengan rumus

$$NPCI = B / F$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- NPCI < 1, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah
- NPCI > 1, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah

3.5.3.3 Kebijakan Pemerintah Terhadap *Input* dan *Output*

Untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terhadap *input* dan *output* dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) menurut Monke dan Pearson (1989), digunakan indikator Transfer Bersih Kebijakan (NPT), Koefisien Keuntungan (PC), Koefisien Proteksi Efektif (EPC) dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) dengan rumus:

$$NPT = D - H$$

$$PC = D/H$$

$$EPC = (A - B) / (E - F)$$

$$SRP = L / E$$

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- SRP dan NPT positif, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- SRP dan NPT negatif, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- PC dan EPC > 1, terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.
- PC dan EPC < 1, tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah.

3.6 Terminologi dan Pengukuran

1. Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani padi yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu petani padi dengan sistem irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana.
2. Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku, sikap atau hasil dari suatu proses yang diakibatkan oleh keluaran kebijakan.
3. Kebijakan pertanian adalah rangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Usahatani padi (*Oriza sativa L*) adalah organisasi dari alam, tenaga kerja dan modal yang ditujukan pada produksi padi di lahan pertanian dengan cara atau teknik pengelolaan yang terarah dan tepat.

5. Produksi adalah seluruh hasil yang diperoleh petani dalam standar sebelum ongkos atau pengeluaran usahatani (ton) pada musim tanam kering satu yaitu bulan Maret sampai Juni Tahun 2004.
6. Pendapatan petani adalah selisih nilai *output* usahatani dengan nilai *input* yang diperlukan dalam memperoleh *output* (Rp).
7. Keunggulan komparatif adalah keunggulan dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) yang disebabkan oleh rendahnya biaya sumber daya domestik.
8. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) yang disebabkan oleh pengelolaan/usahatani padi (*Oriza sativa L*) yang maksimal.
9. Efisiensi adalah penggunaan *input*/faktor-faktor produksi yang sekecil kecilnya dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) untuk mendapatkan *output*/produksi yang maksimal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.
10. *Input Tradable* adalah *input* dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) dapat diperdagangkan secara internasional yaitu bibit padi (*Oriza sativa L*), pupuk, dan obat-obatan (Rp).
11. *Input Non Tradable* atau Biaya Domestik adalah *input* dalam usahatani padi (*Oriza sativa L*) yang tidak dapat diperdagangkan secara internasional yaitu modal, lahan dan tenaga kerja (Rp).
12. *Domestic Resources Cost* (DRC) merupakan salah satu kriteria investasi untuk menentukan kelayakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
13. Total biaya produksi adalah semua korbanan yang digunakan untuk satu kali proses produksi dimana total biaya produksi terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel (Rp).
14. Harga privat adalah harga yang diterima petani setelah ada campur tangan dari berbagai pihak termasuk kebijakan pemerintah (Rp).
15. Harga sosial adalah harga yang seharusnya diterima petani atau harga pada pasar persaingan sempurna (harga dunia) (Rp). Untuk *input* dan *output* yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga sosial dihitung berdasarkan harga perdagangan nasional. Untuk komoditi yang diimpor dipakai harga CIF

(*Cost Insurance and Freight*), sedangkan komoditi yang diekspor digunakan harga FOB (*Free On Board*).

16. Pengaruh divergensi adalah perbedaan nilai individual dan nilai sosial terhadap penerimaan, biaya, dan keuntungan usahatani yang dilakukan (Rp).
17. Keuntungan sosial adalah keuntungan yang diterima sesuai dengan harga dunia (harga yang seharusnya diterima petani) (Rp).
18. Keuntungan privat adalah keuntungan yang didasarkan pada harga yang berlaku pada saat berlaku kebijakan pemerintah (harga yang benar-benar diterima oleh petani) (Rp).
19. Biaya sosial adalah korbanan yang dikeluarkan berdasarkan harga sosialnya atau harga dunia (Rp).
20. Biaya privat adalah korbanan yang dikeluarkan berdasarkan pada harga yang berlaku pada saat berlaku kebijakan pemerintah (Rp).
21. Irigasi teknis adalah jaringan irigasi yang mempunyai bangunan permanen (dam, bangunan bagi, bangunan pemataharus, pintu air) dan mempunyai kemampuan mengukur dan mengendalikan aliran air.
22. Irigasi semiteknis adalah jaringan irigasi yang mempunyai bangunan semipermanen, dan masih belum dilengkapi dengan pintu-pintu pengendali yang menghubungkan dengan saluran-saluran.
23. Irigasi sederhana adalah jaringan irigasi yang dibuat dengan sistem dan peralatan tradisional baik yang terbuat dari bambu atau juga dari bahan yang tidak permanen.



IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari

4.1.1 Keadaan Geografis

Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur terletak 4 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 16 km dari pusat kabupaten, dan berjarak 181 km dari ibukota propinsi. Batas-batas wilayah Desa Tisnogambar ialah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari
- Sebelah Selatan : Desa Curahlele, Kecamatan Balung
- Sebelah Barat : Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari
- Sebelah Timur : Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari

Desa Tisnogambar terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatisari, dan Dusun Siraan dengan luas daerah 1.031,04 ha. Wilayah Desa Tisnogambar bertopografi datar dengan tingkat produktivitas cukup tinggi, serta memiliki ketinggian 48 m diatas permukaan air laut.

4.1.2 Keadaan Iklim

Wilayah Desa Tisnogambar termasuk daerah yang memiliki iklim tropis, dengan rata-rata suhu 31⁰C. Curah hujan rata-rata 3.000 mm per tahun. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan Oktober atau Nopember, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan Juni atau Juli.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tisnogambar pada tahun 2003 ialah sebanyak 10.629 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.209 orang, perempuan sebanyak 5.420 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.283 orang.

4.1.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur

Keadaan penduduk menurut umur dapat dikelompokan dalam dua kelompok umur, yaitu kelompok usia penduduk dan kelompok usia kerja. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut golongan usia penduduk dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No	Golongan Usia (tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 2	180	1,69
2	2 – 4	808	7,60
3	5 – 6	315	2,96
4	7 – 12	637	5,99
5	13 – 15	476	4,48
6	16 – 18	894	8,41
7	19 – 25	831	7,82
8	26 – 35	1.574	14,81
9	36 – 45	1.406	13,23
10	46 – 50	982	9,24
11	51 – 60	917	8,63
12	61 – 75	801	7,54
13	>75	808	7,60
Total		10.629	100

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tisnogambar berada pada kelompok usia 26 – 35 tahun, yaitu sebesar 14,81%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan penduduk Desa Tisnogambar adalah penduduk yang produktif, dalam arti berada pada usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan bagian dari keseluruhan penduduk yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi, untuk Indonesia usia kerja terhitung pada usia 10 tahun ke atas.

4.1.3.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penunjang dalam pembangunan pertanian adalah peningkatan pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri khas dari sebagian besar masyarakat pedesaan. Begitu pula halnya dengan yang ditemui di daerah penelitian. Hal

tersebut dapat dilihat dari penyebaran tingkat pendidikan usia kerja dan banyaknya lembaga pendidikan di Desa Tisnogambar.

Tabel 8. Keadaan Kualitas Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Buta aksara dan angka	1.907	23,72
2.	Tidak tamat SD	1.671	20,78
3.	Tamat SD/ sederajat	2.874	35,74
4.	Tamat SLTP/ sederajat	1.071	13,32
5.	Tamat SLTA/ sederajat	448	5,57
6.	Tamat akademi	41	0,51
7.	Tamat perguruan tinggi	29	0,36
Total		8.041	100

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tisnogambar yang berada pada usia kerja hanya tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 35,74% dari seluruh penduduk yang tergolong pada usia kerja. Hal ini akan berakibat pada kurangnya respon masyarakat terhadap adanya suatu teknologi. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Desa Tisnogambar dalam meningkatkan pendidikan adalah sedikitnya lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut. sehingga untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA masih belum tercapai, faktor jarak serta sarana transportasi merupakan faktor penghambat karena letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/ Madrasah	6
3.	SMP	-
4.	SMU	-
5.	Pondok Pesantren	10
Total		17

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani, masyarakat Desa Tisnogambar terutama petani membentuk kelompok-kelompok tani yang secara keseluruhan berjumlah 16 kelompok tani. Melalui kelompok-

kelompok tani ini para petani mendapat berbagai macam informasi yang berhubungan dengan praktek usahatani, baik itu langsung dari Petugas Penyuluh Lapang (PPL), maupun melalui sesama anggota kelompok tani yang diperoleh melalui kursus atau pelatihan.

Tabel 10. Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (orang)
1.	Makin makmur I	71
2.	Makin makmur II	40
3.	Tani makmur I	76
4.	Tani makmur II	90
5.	Rukun makmur I	49
6.	Rukun makmur II	38
7.	Rukun Tani I	35
8.	Rukun Tani II	42
9.	Sido Makmur I	43
10.	Sido Makmur II	35
11.	Sido Hasil I	42
12.	Sido Hasil II	40
13.	Barokah	41
14.	Sumber Rejeki	49
15.	Sumber Makmur I	32
16.	Sumber Makmur II	41
Total		786

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Pembentukan kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya kesadaran yang bersumber pada kesadaran petani yang tergabung dalam kelompok tani, agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pertumbuhan kelompok tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. Namun, keaktifan kelompok tani juga harus diikuti oleh keaktifan Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

Kerjasama antara PPL dan kelompok tani di Desa Tisnogambar cukup baik. Mereka rutin mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai kendala yang dialami oleh petani dalam melakukan usahataniya ataupun untuk memberikan informasi atas adanya suatu inovasi bidang pertanian yang disampaikan oleh PPL kepada ketua kelompok tani. Pertemuan rutin ini diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 5. Selain itu kelompok-kelompok tani

tersebut juga mengadakan arisan kelompok tani yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pertemuan kelompok tani.

4.1.3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Mata pencapaian penduduk Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari berasal dari berbagai sumber mata pencapaian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencapaian di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis Mata Pencapaian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	91	0,86
2	Pegawai Kelurahan/desa	17	0,16
3	ABRI/TNI	53	0,50
4	Swasta	85	0,80
5	Wiraswasta/Pedagang	82	0,77
6	Pertukangan	86	0,81
7	Buruh tani/petani	4.899	46,09
8	Pensiunan	55	0,52
9	Peternak/buruh ternak	2.108	19,83
10	Jasa	122	1,15
11	Lain-lain	3.031	28,52
Total		10.629	100

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia pada umumnya mempunyai mata pencapaian utama dari sektor pertanian. Hal ini juga terjadi di daerah penelitian, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan utama sebagai petani atau buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting di Desa Tisnogambar.

4.1.4 Keadaan Tanah

Luas lahan pertanian di Desa Tisnogambar adalah 1.031,04 ha dimana sebagian besar merupakan tanah sawah dan sisanya berupa lahan pekarangan dan tegalan. Dengan demikian tanah sawah menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian petani dalam pengelolaannya.

Tabel 12. Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	81	7,86
2	Bangunan	24,25	2,35
3	Pertanian sawah		
	• Sawah pengairan irigasi	529,15	51,32
	• Sawah tadah hujan	-	-
4	Ladang/tegalan	234,08	22,70
5	Perkebunan	12	1,16
6	Hutan	-	-
7	Lapangan bola volly	1,22	0,12
8	Kolam	4	0,39
9	Lain-lain	145,34	14,10
	Total	1.031,04	100

Sumber : Profil Desa Tisnogambar, 2003

Tabel 12 menunjukkan bahwa Desa Tisnogambar merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tanah sawah yaitu sebesar 51,32% dari keseluruhan luas wilayah desa. Tanah sawah ini merupakan sawah dengan pengairan irigasi baik sistem irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana. Selain lahan sawah, lahan yang dominan di daerah ini yaitu ladang atau tegalan yaitu sebesar 22,70% dari keseluruhan luas wilayah. Hal ini berarti di Desa Tisnogambar sektor pertanian masih dominan jika dibandingkan dengan sektor lain.

4.1.5 Keadaan Pertanian

Ditinjau dari segi pertumbuhan tanaman, maka Desa Tisnogambar sangat potensial untuk tanaman pangan dan palawija, terutama untuk tanaman padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Pola tanam setahun yang dominan di Desa Tisnogambar pada lahan sawah yaitu Padi-Padi-Kedelai, Padi-Padi-Jagung, dan Padi-Padi-Kacang tanah. Sedangkan tanaman lain yang diusahakan di tanah kering (tegalan atau pekarangan) adalah Ubi kayu, Ubi Jalar, Pisang, Rambutan, Mangga, dan Kelapa.

Tabel 13. Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis tanaman	Produktivitas (ton/ha)	Produktivitas Rata-Rata Kabupaten Jember (ton/ha)
1	Padi	6,7	5,4
2	Kedelai	1,4	1,6
3	Jagung	4	5,1
4	Kacang tanah	0,8	0,7
5	Ubi Jalar	3,7	6,7
6	Ubi kayu	3	12,4

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian, 2003

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa produktivitas padi di Desa Tisnogambar Tahun 2003 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produktivitas rata-rata Kabupaten Jember. Hal ini berarti Desa Tisnogambar merupakan daerah yang memiliki produktivitas relatif tinggi jika di bandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini juga berarti bahwa Desa Tisnogambar termasuk sentra penghasil padi.

Pengelolaan usahatani di Desa Tisnogambar sebagian besar dilakukan dengan sistem kedok. Artinya, bahwa pengelolaan usahatani diserahkan pada orang lain yang dianggap mampu mengelolanya. Pengelolaan tersebut dilakukan mulai dari penanaman benih sampai dengan panen. Sedangkan mengenai hasil panen nantinya dibagi untuk pemilik atau penyewa lahan dengan pendedok dengan sistem 5 : 1. Arti dari sistem kedok 5 : 1 ialah setiap 5 kuintal hasil produksi akan dibayarkan sebesar 1 kuintal kepada pendedok.

Usahatani yang dilakukan dengan sistem kedok ini pengelolaannya dilakukan oleh pendedok dibawah pengawasan pemilik atau penyewa lahan, sedangkan tenaga kerja diserahkan kepada pendedok. Usahatani dengan sistem kedok ini selain dapat memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja diwilayah tersebut, juga memberi keringanan bagi pemilik atau penyewa lahan dalam hal tenaga dan waktu.

4.1.6 Keadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tisnogambar adalah petani. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan usaha produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat, aparat desa beserta masyarakat setempat telah mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi guna menunjang pembangunan pertanian dan pembangunan selain pertanian. Salah satunya adalah dengan mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD) yang diberi nama KUD Manunggal, puskesmas pembantu, posyandu, toko, serta warung.

Keberadaan KUD (Koperasi Unit Desa) di Desa Tisnogambar berperan dalam hal simpan pinjam, penyewaan angkutan (truk), penggilingan gabah, serta pembayaran rekening telepon. Sedangkan untuk penjualan hasil produksi petani kurang memanfaatkan jasa KUD karena petani cenderung menjual hasil panennya kepada pedagang, ataupun tengkulak.

Usaha di sektor peternakan masih dilakukan secara tradisional dan hanya sebagai usaha sampingan saja. Usaha peternakan yang dilakukan misalnya ternak ayam kampung, itik, sapi, dan kambing. Mengingat hampir semua penduduk Desa Tisnogambar beragama islam, maka kelembagaan non formal cukup berkembang. Diantaranya ialah kelompok pengajian, majelis taklim, karang taruna dan PKK. Selain itu berkembang juga kelembagaan desa, yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan BKD (Badan Kredit Desa). BPD merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengawas apabila di Desa Tisnogambar ada kegiatan proyek, baik proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun proyek kerjasama dalam kegiatan usahatani. LPM merupakan lembaga yang berperan dalam hal penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek. Sedangkan BKD merupakan lembaga yang berperan dalam pemberian kredit yang bekerja sama dengan KUD.

4.2 Desa Pringgowirawan Kecamatan Sumberbaru

4.2.1 Keadaan Geografis

Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Jawa Timur terletak 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 37 km dari pusat kabupaten, dan berjarak 159,5 km dari ibukota propinsi. Batas-batas wilayah Desa Pringgowirawan ialah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru
Sebelah Selatan	: Desa Rowo Tengah, Kecamatan Sumberbaru
Sebelah Barat	: Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru
Sebelah Timur	: Desa Pondok Dalem, Kecamatan Semboro

Desa Tisnogambar terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Wedusan, Dusun Sumber Uling, Dusun Racekan, dan Dusun Sumber Kijing dengan luas daerah 8.635,52 ha. Wilayah Desa Pringgowirawan mempunyai topografi perbukitan dengan tingkat produktivitas sedang, serta memiliki ketinggian 38 m di atas permukaan air laut.

4.2.2 Keadaan Iklim

Wilayah Desa Pringgowirawan termasuk daerah yang memiliki iklim tropis, dengan rata-rata suhu 25-27⁰C. Curah hujan rata-rata 2566 mm per tahun. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan Oktober atau Nopember, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan Juni atau Juli.

4.2.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tisnogambar pada tahun 2003 ialah sebanyak 12.639 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 5.917 orang, perempuan sebanyak 6.722 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.540 orang.

4.2.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur

Keadaan penduduk menurut umur dapat dikelompokkan dalam dua kelompok umur, yaitu kelompok usia penduduk dan kelompok usia kerja. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut golongan usia dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No	Golongan Usia (tahun)	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	0 – 2	523	4,14
2	2 – 4	776	6,14
3	5 – 6	1.285	10,17
4	7 – 12	1.435	11,35
5	3 – 15	1.503	11,89
6	16 – 18	1.092	8,64
7	19 – 25	1.063	8,41
8	26 – 35	1.067	8,44
9	36 – 45	1.033	8,17
10	46 – 50	928	7,34
11	51 – 60	1.357	10,74
12	61 – 75	275	2,18
13	>75	302	2,39
Total		12.639	100

Sumber : Profil Desa Pringgowirawan, 2003.

Dari Tabel 14 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pringgowirawan berada pada kelompok usia 13 – 15 tahun, yaitu sebesar 11,89%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan penduduk Desa Pringgowirawan adalah penduduk yang produktif, dalam arti berada pada usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan bagian dari keseluruhan penduduk yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi, untuk Indonesia usia kerja terhitung pada usia 10 tahun ke atas.

4.2.3.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penunjang dalam pembangunan pertanian adalah peningkatan pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri khas dari sebagian besar masyarakat pedesaan. Begitu pula halnya dengan yang ditemui di daerah penelitian. Hal

tersebut dapat dilihat dari penyebaran tingkat pendidikan usia kerja dan banyaknya lembaga pendidikan di Desa Pringgowirawan.

Tabel 15. Keadaan Kualitas Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Buta aksara dan angka	3.392	32,32
2.	Tidak tamat SD	2.705	25,77
3.	Tamat SD/ sederajat	3.878	36,95
4.	Tamat SLTP/ sederajat	356	3,39
5.	Tamat SLTA/ sederajat	142	1,35
6.	Tamat akademi	20	0,19
7.	Tamat perguruan tinggi	3	0,03
Total		10.496	100

Sumber : Profil Desa Pringgowirawan, 2003

Dari Tabel 15 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Pringgowirawan yang berada pada usia kerja hanya tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 36,95% dari keseluruhan jumlah penduduk yang tergolong dalam usia kerja. Hal ini akan berakibat pada kurangnya respon masyarakat terhadap adanya suatu teknologi. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Desa Pringgowirawan dalam meningkatkan pendidikan adalah sedikitnya lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut, sehingga untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA sulit untuk dilakukan, faktor jarak serta sarana transportasi merupakan faktor penghambat karena letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No.	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	1
2.	SD/Madrasah	5
3.	SMP	1
4.	SMU	-
5.	Pondok Pesantren	-
Total		7

Sumber : Profil Desa Pringgowirawan, 2003

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani, masyarakat Desa Pringgowirawan terutama petani membentuk kelompok-kelompok tani yang secara keseluruhan berjumlah 7 kelompok tani dengan nama:

Tani Makmur I, Tani Makmur II, Suka Maju I, Sumber Pulih, Suka Maju, suka Damai, dan Sumber Buah. Namun pada saat penelitian berlangsung kelompok tani yang telah di bentuk tidak aktif sehingga petani tidak bisa untuk mendapatkan informasi tentang teknologi di dalam usahatani dan informasi mengenai permasalahan usahatani khususnya padi yaitu misalnya petani tidak mengetahui tatacara pemberantasan hama yang melanda tanaman mereka.

Peranan PPL di Desa Pringgowirawan masih kurang aktif, hal ini dapat dilihat dari tatacara bercocok tanam petani dan tatacara pemeliharaan petani terhadap tanaman. Belum ada pertemuan antara petani atau kelompok tani dengan PPL yang sifatnya rutin. Sehingga dengan demikian, petani sangat kesulitan untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh petani dalam melakukan usahatannya. Petani juga kesulitan untuk mendapatkan informasi atas adanya suatu inovasi bidang pertanian.

4.2.3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru berasal dari berbagai sumber mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	86	0,68
2	Pegawai Kelurahan/desa	18	0,14
3	ABRI/TNI	24	0,19
4	Swasta	225	1,78
5	Wiraswasta/Pedagang	930	7,36
6	Pertukangan	154	1,22
7	Buruh tani/petani	7.002	55,40
8	Pensiunan	30	0,24
9	Peternak/buruh ternak	35	0,28
10	Jasa	126	1,00
11	Lain-lain	4.009	31,72
Total		12.639	100

Sumber : Profil Desa Pringgowirawan, 2003

Masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia pada umumnya mempunyai mata pencaharian utama dari sektor pertanian. Hal ini juga terjadi di daerah penelitian, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan utama sebagai petani atau buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting di Desa Pringgowirawan.

4.2.4 Keadaan Tanah

Luas lahan pertanian di Desa Pringgowirawan adalah 8.635,52 ha dimana sebagian besar merupakan tanah sawah dan tegalan serta sisanya berupa lahan pekarangan. Dengan demikian tanah tegalan dan tanah sawah menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian petani dalam pengelolaannya. Untuk mengetahui luas dan penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No.	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	947,55	10,97
2	Bangunan	203,5	2,36
4	Pertanian sawah		
	• Sawah pengairan irigasi	2.750	31,85
	• Sawah tadah hujan	1.818,51	21,06
4	Ladang/tegalan	1.900	22,00
5	Perkebunan	-	
6	Hutan	-	
7	Lapangan	5	0,58
8	Kolam	3	0,35
9	Lain-lain	935,96	10,84
	Total	8.635,52	100

Sumber : Profil Desa Pringgowirawan, 2003

Tabel 18 menunjukkan bahwa Desa Pringgowirawan merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tanah sawah pengairan irigasi yaitu sebesar 31,85% dari keseluruhan luas wilayah desa. Tanah sawah ini merupakan sawah dengan pengairan irigasi baik sistem irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana. Selain lahan sawah, lahan yang dominan di daerah ini yaitu ladang atau tegalan yaitu sebesar 22,00% dari keseluruhan luas wilayah. Hal ini berarti di Desa Pringgowirawan sektor pertanian masih dominan jika dibandingkan dengan sektor lain.

4.2.5 Keadaan Pertanian

Ditinjau dari segi pertumbuhan tanaman, maka Desa Pringgowirawan sangat potensial untuk tanaman pangan, dan tanaman perkebunan terutama untuk tanaman padi, kedelai, jagung, kacang tanah, ubi kayu dan tebu. Dalam kegiatan melakukan usahatannya petani pada umumnya melakukan pola tanam di tanah sawah dalam satu tahun yang paling dominan yaitu Padi – Padi – Padi, dan terkadang pola tanamnya Padi-Padi-Palawija. Tanaman palawija yang di tanam ialah jagung dan kedelai tetapi kebanyakan tanah sawah petani sepanjang tahun ditanamai padi, karena ketersediaan air yang melimpah pada daerah ini. Sedangkan pola tanam dominan dalam satu tahun pada kering (tegalan atau pekarangan) yaitu Ubi kayu-Kacang tanah-Jagung, Ubi kayu-Jagung-Ubi jalar, dan Ubi jalar-Kedelai-Ubi kayu, dan terkadang juga ditanami Tebu. Tanaman Tebu ditanam karena lokasi penelitian yang dekat dengan pabrik gula sehingga terkadang petani mengusahakan tanaman Tebu untuk memenuhi permintaan dari pabrik gula tersebut. Jenis tanaman dan produksi tanaman di Desa Pringgowirawan dapat di lihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Tahun 2003

No.	Jenis tanaman	Produktivitas (ton/ha)	Produktivitas Rata-Rata Kabupaten Jember (ton/ha)
1	Padi	5,5	5,4
2	Kedelai	2	1,6
3	Jagung	2	5,1
4	Kacang tanah	1,25	0,7
5	Ubi jalar	4	6,7
6	Ubi kayu	3,5	12,4

Sumber : Bali Penyuluh Pertanian, 2003

Pada Tabel 19 dapat dilihat bahwa produktivitas padi relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produktivitas rata-rata Kabupaten Jember. Hal ini berarti bahwa Desa Pringgowirawan merupakan daerah yang potensial untuk menghasilkan padi. Hal ini juga di tunjang oleh ketersediaan air untuk usahatani padi.

Pengelolaan usahatani di Desa Pringgowirawan sebagian besar dilakukan dengan sistem upah terhadap buruh tani. Namun pada saat-saat tertentu petani tidak mengupahkan pekerjaannya kepada buruh tani yaitu pada saat pemupukan

dan pemberantasan hama. Jadi selain mengupah buruh petani terkadang melakukan sendiri usahataniya. Petani biasanya mengeluarkan biaya untuk tenaga kerja mulai dari pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, sampai pemeliharaan. Pada saat panen dan pasca panen umumnya petani tidak mengeluarkan biaya karena mereka menjual hasil padi dengan sistem tebas.

4.2.6 Keadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Pringgowirawan adalah petani. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan usaha produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat, aparat desa beserta masyarakat setempat telah mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi guna menunjang pembangunan pertanian dan pembangunan selain pertanian. Salah satunya adalah dengan adanya pasar, puskesmas pembantu, posyandu, toko, serta warung.

Untuk memenuhi kebutuhan simpan pinjam, maupun proses pemasaran *input* yang berupa pupuk dan obat-obatan atau *output* berupa hasil pertanian Desa Pringgowirawan belum terpenuhi karena KUD di desa ini sudah tidak aktif lagi. Hal tersebut menyebabkan petani menggantungkan pemenuhan kebutuhan usahataniya kepada kios-kios untuk membeli *input* serta menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak.

Usaha disektor peternakan masih dilakukan secara tradisional dan hanya sebagai usaha sampingan saja. Usaha peternakan yang dilakukan misalnya ternak ayam kampung, itik, sapi, dan kambing. Mengingat hampir semua penduduk Desa Pringgowirawan beragama islam, maka kelembagaan non formal cukup berkembang. Diantaranya ialah kelompok pengajian, majelis taklim, dan PKK. Selain itu berkembang juga kelembagaan desa, yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan BKD (Badan Kredit Desa). BPD merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengawas apabila di Desa Pringgowirawan ada kegiatan proyek dan sebagai pengawas kinerja dari aparat desa, baik proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun proyek kerjasama dalam kegiatan usahatani. LPM merupakan lembaga yang berperan dalam hal penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan

proyek. Sedangkan BKD merupakan lembaga yang berperan dalam pemberian kredit. Karena KUD di Desa Pringgowirawan tidak aktif maka BKD bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank, dan lain sebagainya.

4.3 Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari

4.3.1 Keadaan Geografis

Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur terletak 2,5 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 17 km dari pusat kabupaten, dan berjarak 179,5 km dari ibukota propinsi. Batas-batas wilayah Desa Tisnogambar ialah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari
- Sebelah Selatan : Desa Curahlele, Kecamatan Balung
- Sebelah Barat : Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari
- Sebelah Timur : Desa Tisnogambar, Kecamatan Bangsalsari

Desa Langkap terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Tegalan, dan Dusun Sumber Gebang dengan luas daerah 712,1 ha. Wilayah Desa Langkap bertopografi datar dengan tingkat produktivitas cukup tinggi, serta memiliki ketinggian 48 m diatas permukaan air laut.

4.3.2 Keadaan Iklim

Wilayah Desa Tisnogambar termasuk daerah yang memiliki iklim tropis, dengan rata-rata suhu 30⁰C. Curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun. Musim hujan biasanya dimulai pada bulan Oktober atau Nopember, sedangkan musim kemarau dimulai pada bulan Juni atau Juli.

4.3.3 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Langkap pada tahun 2003 ialah sebanyak 6.184 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 3.061 orang, perempuan sebanyak 3.123 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.567 orang.

4.3.3.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur

Keadaan penduduk menurut umur dapat dikelompokkan dalam dua kelompok umur, yaitu kelompok usia penduduk dan kelompok usia kerja. Untuk mengetahui jumlah penduduk menurut usia dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Usia Penduduk di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No	Golongan Usia (tahun)	Jumlah..... (Orang)	Prosentase (%)
1	0 – 2	178	2,9
2	2 – 4	334	5,4
3	5 – 6	248	4,0
4	7 – 12	604	9,8
5	13 – 15	282	4,6
6	16 – 18	279	4,5
7	19 – 25	666	10,8
8	26 – 35	880	14,2
9	36 – 45	878	14,2
10	46 – 50	426	6,9
11	51 – 60	726	11,7
12	61 – 75	342	5,5
13	>75	341	5,5
Total		6.184	100

Sumber : Profil Desa Langkap, 2003

Dari Tabel 20 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Langkap berada pada kelompok usia 26 – 35 tahun, yaitu sebesar 14,2%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keadaan penduduk Desa Langkap adalah penduduk yang produktif, dalam artian berada pada usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan bagian dari keseluruhan penduduk yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan ekonomi, untuk Indonesia usia kerja terhitung pada usia 10 tahun ke atas.

4.3.3.2 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penunjang dalam pembangunan pertanian adalah peningkatan pendidikan masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang rendah merupakan ciri khas dari sebagian besar masyarakat pedesaan. Begitu pula halnya dengan yang ditemui di daerah penelitian. Hal tersebut dapat dilihat dari penyebaran tingkat pendidikan usia kerja dan banyaknya lembaga pendidikan di Desa Langkap.

Tabel 21 Keadaan Kualitas Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Buta aksara dan angka	396	7,05
2.	Tidak tamat SD	1.902	33,85
3.	Tamat SD/ sederajat	2.194	39,05
4.	Tamat SLTP/ sederajat	679	12,08
5.	Tamat SLTA/ sederajat	388	6,91
6.	Tamat akademi	34	0,61
7.	Tamat perguruan tinggi	26	0,46
Total		5.619	100

Sumber : Profil Desa Langkap 2003

Dari Tabel 21 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Langkap yang berada pada usia kerja hanya tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 39,05% dari seluruh penduduk yang tergolong dalam usia kerja. Hal ini akan berakibat pada kurangnya respon masyarakat terhadap adanya suatu teknologi. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat Desa Langkap dalam meningkatkan pendidikan adalah sedikitnya lembaga pendidikan yang ada di daerah tersebut, sehingga untuk meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti SLTP dan SLTA sulit untuk terealisasi, faktor jarak merupakan faktor penghambat karena letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Jenis dan Jumlah Lembaga Pendidikan di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD/Madrasah	7
3.	SMP	2
4.	SMU	2
5.	Pondok Pesantren	4
Total		17

Sumber : Profil Desa Langkap 2003

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani, masyarakat Desa Langkap terutama petani membentuk kelompok-kelompok tani yang secara keseluruhan berjumlah 9 kelompok tani. Melalui kelompok-kelompok tani inilah para petani mendapat berbagai macam informasi yang berhubungan dengan praktek usaha tani, baik itu langsung dari Petugas Penyuluh Lapangan

(PPL), maupun melalui sesama anggota kelompok tani yang diperoleh melalui kursus atau pelatihan.

Tabel 23. Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota (orang)
1.	Barokah I	55
2.	Barokah II	47
3.	Barokah III	45
4.	Tegalan I	63
5.	Tegalan II	47
6.	Tegalan III	45
7.	Sumber Gebang I	49
8.	Sumber Gebang II	41
9.	Sumber Gebang III	48
Tota		440

Sumber : Profil Desa Langkap, 2003

Pembentukan kelompok tani diarahkan pada tumbuhnya kesadaran yang bersumber pada kesadaran petani yang tergabung dalam kelompok tani, agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Pertumbuhan kelompok tani dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan petani sendiri. Namun, keaktifan kelompok tani juga harus diikuti oleh keaktifan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Kerjasama antara PPL dan kelompok tani di Desa Langkap cukup baik. Mereka rutin mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai kendala yang dialami oleh petani dalam melakukan usahataniya ataupun untuk memberikan informasi atas adanya suatu inovasi bidang pertanian yang disampaikan oleh PPL kepada ketua kelompok tani. Pertemuan rutin ini diselenggarakan setiap bulan pada tanggal 5. Selain itu kelompok-kelompok tani tersebut juga mengadakan arisan kelompok tani yang dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pertemuan kelompok tani. Namun ada juga petani dari Desa Langkap yang juga mengikuti kelompok tani keluar desa mereka yaitu ikut kelompok tani yang berada di Desa Tisnogambar

4.3.3.3 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari berasal dari berbagai sumber mata pencaharian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 29. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	PNS	19	0,31
2	Pegawai Kelurahan/desa	17	0,27
3	ABRI	2	0,03
4	Swasta	302	4,88
5	Wiraswasta/Pedagang	38	0,61
6	Pertukangan	42	0,68
7	Buruh tani/petani	3.050	49,32
8	Pensiunan	8	0,13
9	Peternak/buruh ternak	680	11,00
10	Jasa	23	0,37
11	lain-lain	2.003	32,39
Total		6.184	100

Sumber : Profil Desa Langkap, 2003

Masyarakat di daerah pedesaan di Indonesia pada umumnya mempunyai mata pencaharian utama dari sektor pertanian. Hal ini juga terjadi di daerah penelitian, dimana sebagian besar penduduknya mempunyai pekerjaan utama sebagai petani atau buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting di Desa Langkap.

4.3.4 Keadaan Tanah

Luas lahan pertanian di Desa Langkap adalah 712,1 ha dimana sebagian besar merupakan tanah sawah dan sisanya berupa lahan pekarangan dan tegalan. Dengan demikian tanah sawah menjadi prioritas utama yang mendapat perhatian petani dalam pengelolaannya. Luas dan jenis penggunaan tanah di Desa Langkap dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Luas dan Jenis Penggunaan Tanah di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Penggunaan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Pemukiman	136	19,10
2.	Bangunan	4,2	0,59
3.	Pertanian sawah		
	• Sawah pengairan irigasi	335	47,04
	• Sawah tadah hujan	16	2,25
4.	Ladang/tegalan	66	9,27
5.	Perkebunan	-	-
6.	Hutan	-	-
7.	Lapangan	4,9	0,69
8.	Kolam	-	-
9.	Lain-lain	150	21,06
Total		712,1	100

Sumber : Profil Desa Langkap, 2003

Tabel 25 menunjukkan bahwa Desa Langkap merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya didominasi oleh tanah sawah beririgasi yaitu sebesar 47,04% dari keseluruhan luas wilayah desa. Tanah sawah ini merupakan sawah dengan pengairan irigasi baik sistem irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana. Hal ini berarti di Desa Langkap sektor pertanian masih dominan jika dibandingkan dengan sektor lain.

4.3.5 Keadaan Pertanian

Ditinjau dari segi pertumbuhan tanaman, maka Desa Langkap sangat potensial untuk tanaman pangan dan palawija, terutama untuk tanaman padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan ubi kayu. Dalam kegiatan usahatannya pola tanam dominan dalam satu tahun di tanah sawah adalah Padi – Padi – Kedelai, Padi-Padi-Jagung, dan Padi-Padi-Kacang tanah. Sedangkan tanaman lain yang diusahakan di tanah kering (tegalan atau pekarangan) adalah Ubi kayu, Ubi jalar, Pisang, Rambutan, Mangga, dan Kelapa.

Tabel 26. Jenis Tanaman dan Produksi Tanaman di Desa Langkap, Kecamatan Bangsalsari, Tahun 2003

No.	Jenis tanaman	Produktivitas (ton/ha)	Produktivitas Rata-Rata Kabupaten Jember (ton/ha)
1	Padi	6,7	5,4
2	Kedelai	1,5	1,6
3	Jagung	4	5,1
4	Kacang tanah	0,8	0,7
5	Ubi jalar	4,1	6,7
6	Ubi kayu	3	12,7

Sumber : Balai Penyuluh Pertanian, 2003

Pada Tabel 26 dapat dilihat bahwa produktivitas padi di Desa Langkap Tahun 2003 relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan produktivitas rata-rata Kabupaten Jember. Hal ini berarti Desa Langkap merupakan daerah yang memiliki produktivitas relatif tinggi jika di bandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini juga berarti bahwa Desa Langkap juga termasuk sentra penghasil padi.

Pengelolaan usahatani di Desa Langkap sebaian besar dilakukan dengan sistem kedok. Artinya, bahwa pengelolaan usahatani diserahkan pada orang lain yang dianggap mampu mengelolanya. Pengelolaan tersebut dilakukan mulai dari penanaman benih sampai dengan panen. Sedangkan mengenai hasil panen nantinya dibagi untuk pemilik atau penyewa lahan dengan pendedok dengan sistem 5 : 1. Arti dari sistem kedok 5 : 1 ialah setiap 5 kuintal hasil produksi akan dibayarkan sebesar 1 kuintal kepada pendedok.

Usahatani yang dilakukan dengan sistem kedok ini pengelolaannya dilakukan oleh pendedok dibawah pengawasan pemilik atau penyewa lahan, sedangkan tenaga kerja diserahkan kepada pendedok. Usahatani dengan sistem kedok ini selain dapat memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja di wilayah tersebut, juga memberi keringanan bagi pemilik atau penyewa lahan dalam hal tenaga dan waktu.

4.3.6 Keadaan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Desa

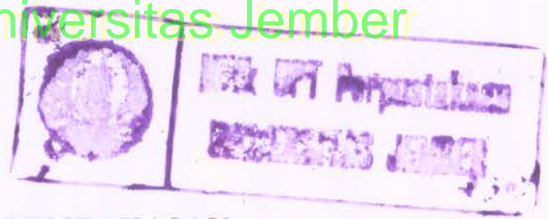
Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Langkap adalah petani. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan usaha produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat, aparat desa beserta masyarakat setempat telah mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi guna menunjang pembangunan pertanian dan pembangunan selain pertanian. Salah satunya adalah dengan mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD). Namun saat penelitian berlangsung KUD di Desa Langkap tidak aktif dan petani harus bergabung dengan KUD di Desa Tisnogambar. Koperasi Unit Desa (KUD) tersebut diberi nama KUD Manunggal yang berarti bahwa KUD yang berasal dari penggabungan beberapa desa. Selain KUD, sarana dan prasarana yang ada di Desa Langkap antara lain: puskesmas pembantu, posyandu, toko, serta warung.

Keberadaan KUD (Kopersi Unit Desa) di Desa Langkap tidak aktif sehingga harus bergabung dengan KUD Manunggal di Desa Tisnogambar yang berperan dalam hal simpan pinjam, penyewaan angkutan (truk), penggilingan gabah, penjualan hasil produksi, serta pembayaran rekening telepon. Namun karena faktor jarak yang cukup jauh dengan Desa Tisnogambar para petani Desa Langkap kurang memanfaatkan KUD ini sebagai mana mestinya. Sedangkan untuk penjualan hasil produksi petani juga kurang memanfaatkan jasa KUD karena petani cenderung menjual hasil panennya kepada pedagang dalam desa, ataupun tengkulak.

Usaha di sektor peternakan masih dilakukan secara tradisional dan hanya sebagai usaha sampingan saja. Usaha peternakan yang dilakukan misalnya ternak ayam kampung, itik, sapi, dan kambing. Mengingat hampir semua penduduk Desa Langkap beragama islam, maka kelembagaan non formal cukup berkembang. Diantaranya ialah kelompok pengajian, majelis taklim, karang taruna dan PKK. Selain itu berkembang juga kelembagaan desa, yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan BKD (Badan Kredit Desa). BPD merupakan lembaga yang bertindak sebagai pengawas apabila di Desa Tisnogambar ada kegiatan proyek, baik proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun proyek kerjasama dalam kegiatan usahatani.

LPM merupakan lembaga yang berperan dalam hal penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan proyek. Sedangkan BKD merupakan lembaga yang berperan dalam pemberian kredit yang bekerja sama dengan KUD.





V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Efisiensi Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember

Efisiensi usahatani padi menunjukkan bagaimana faktor-faktor produksi yang berupa *input tradable* dan *input non tradable* dikelola secara optimal sehingga mendapatkan *output* atau hasil panen padi yang maksimal yang dicerminkan oleh tingkat keuntungan yang tinggi. Efisiensi usahatani padi dalam *Policy Analysis Matrix* dapat diketahui berdasarkan pada indikator profitabilitas. Nilai profitabilitas privat dan profitabilitas sosial dari usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 27

Tabel 27. Nilai Profitabilitas Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004 (Rp/hektar)

	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domestik	Keuntungan
Irigasi Teknis				
Privat	7389386,28	826144,81	3973317,97	2589923,50
Sosial	8712813,25	939219,67	3933863,77	3839729,80
Divergensi	-1323426,97	-113074,86	39454,19	-1249806,31
Irigasi Semiteknis				
Privat	4031855,33	1038250,99	2357165,60	636438,74
Sosial	5367446,28	1131651,79	2331152,59	1904641,90
Divergensi	-1335590,95	-93400,80	26013,02	-1268203,16
Irigasi Sederhana				
Privat	5964023,33	769755,73	4264842,59	929425,02
Sosial	7038580,50	891293,76	4228536,64	1918750,10
Divergensi	-1074557,17	-121538,04	36305,95	-989325,08

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2004, Lampiran 10.

Berdasarkan Tabel 27 tersebut menunjukkan bahwa dari sisi keuntungan, besarnya keuntungan yang dinikmati oleh petani, baik pada sawah irigasi teknis, semiteknis, dan sederhana adalah lebih rendah dari keuntungan sosialnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa harga *output* yang diterima oleh petani lebih rendah dari harga sosialnya. Hasil perhitungan menunjukkan nilai profitabilitas privat untuk usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi

teknis sebesar Rp 2.589.923,50 per hektar, dan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi semiteknis sebesar Rp 636.438,74 per hektar, serta usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi sederhana sebesar Rp 929.425,02. Hal ini memberikan arti bahwa komoditas padi mampu bersaing. Dalam kaitannya dengan kebijakan, efisiensi dari suatu sistem usahatani secara langsung dicerminkan dari nilai profitabilitas sosialnya, yaitu profitabilitas yang dinilai berdasarkan harga sosialnya dimana tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Nilai profitabilitas sosial untuk usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi teknis sebesar Rp 3.839.729,80 per hektar, dan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi semiteknis sebesar Rp 1.904.641,90 per hektar, serta usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi sederhana sebesar Rp 1.918.750,10 per hektar. Nilai tersebut menunjukkan bahwa usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember efisien karena memiliki nilai profitabilitas sosial positif. Usahatani padi di Kabupaten Jember efisien karena Kabupaten Jember memiliki topografi yang sesuai dengan syarat pertumbuhan padi dan kemampuan petani dalam mengalokasikan sumber-sumber biaya untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi maupun tenaga kerja dengan baik.

Berdasarkan nilai tersebut diketahui pula bahwa usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi teknis lebih efisien dibandingkan dengan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi semiteknis, dan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi sederhana. Namun ada hal yang menarik dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu bahwa usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi sederhana lebih efisien jika dibandingkan dengan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi semiteknis. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kondisi atau keadaan yang mempengaruhi efisiensi usahatani padi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya fenomena di atas, *pertama*, terkait dengan pola tanam yang diterapkan oleh petani di daerah penelitian. Pada daerah penelitian dengan lahan sawah beririgasi teknis memiliki pola tanam setahun padi-padi-palawija, hal yang sama juga terjadi pada daerah penelitian dengan lahan sawah beririgasi sederhana, sedangkan pada daerah

penelitian dengan sawah beririgasi semiteknis pola tanam yang diterapkan dalam setahun adalah padi-padi-padi. Pola tanam padi-padi-padi sepanjang tahun akan menyebabkan produktivitas lahan berkurang. Berkurangnya produktivitas lahan ini disebabkan oleh meningkatnya kadar asam di dalam tanah yang akan mengurangi produktivitas tanaman.

Faktor *kedua* yang menyebabkan usahatani padi pada lahan sawah beririgasi teknis dan lahan sawah beririgasi sederhana lebih efisien dari usahatani padi pada lahan sawah beririgasi semiteknis yaitu dalam hal penggunaan sarana produksi atau *input*. Pada usahatani padi di sawah beririgasi semiteknis beragam jenis sarana produksi yang dipakai khususnya obat-obatan (fungisida, herbisida, dan insektisida). Kondisi semacam ini akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan semakin besar sehingga akan mengurangi besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu, akan terdapat dampak kumulatif terhadap penggunaan sarana produksi dari bahan kimia. Unsur kimia yang sulit terdekomposisi akan menyebabkan lapisan tanah mengeras, dan penggunaan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan kebalnya hama tanaman terhadap pestisida sehingga secara langsung akan menurunkan produktivitas yang diperoleh.

Hal *ketiga*, yang menyebabkan usahatani padi pada sawah beririgasi teknis dan usahatani padi pada sawah beririgasi sederhana lebih efisien dari usahatani padi pada sawah beririgasi semiteknis yaitu dinamika dari kelompok tani dan peran aktif dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Pada daerah penelitian dengan sawah beririgasi teknis dan pada daerah penelitian dengan sawah beririgasi sederhana kelompok tani berperan sangat besar terutama dalam hal pemecahan persoalan yang terkait dengan usahatani mereka, sedangkan pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis keberadaan kelompok tani belum dimanfaatkan secara optimal. Pertemuan rutin sebanyak sekali dalam sebulan yang dilakukan oleh kelompok tani pada daerah penelitian dengan sistem irigasi teknis dan sederhana biasanya juga disertai dengan mengundang PPL, dalam forum tersebut petani mengungkapkan persoalan yang terjadi pada usahatani mereka, mulai dari aspek budidaya sampai pada pemasaran. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) akan memberikan saran, inovasi atau teknologi pada

petani pada pertemuan tersebut. Jadi semakin sering pertemuan kelompok tani akan semakin menambah pengetahuan dan pengalaman, baik dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) maupun dari sesama petani. Keaktifan kelompok tani tersebut ternyata tidak terjadi pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis. Kenyataan ini terjadi karena masa transisi proses pergantian Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang terjadi di daerah penelitian sehingga menyebabkan belum terjalinya proses interaksi antara penyuluh dan petani, hal itu juga menyebabkan sedikitnya kegiatan petani dan kelompok tani terutama dalam forum penyuluhan, diskusi, dan pengarahan dalam kegiatan pertanian.

Selain ketiga hal diatas, ada faktor lain yang menyebabkan tingkat profitabilitas usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi teknis dan usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi sederhana lebih tinggi dibandingkan profitabilitas usahatani padi pada lahan sawah dengan sistem irigasi semiteknis yaitu sistem penjualan dari hasil usahatani padi di daerah penelitian. Pada daerah penelitian dengan sawah beririgasi teknis sebesar 70% petani gabahnya dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) kepada tengkulak. Pada daerah penelitian dengan sawah beririgasi sederhana sebesar 80% petani menjual gabahnya dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) kepada tengkulak. Namun menjual pada saat Gabah Kering Panen (GKP) pada tengkulak masih lebih baik dari pada sistem penjualan hasil usahatani padi di daerah penelitian dengan sawah beririgasi semiteknis. Pada daerah penelitian dengan sawah beririgasi semiteknis sebesar 90% petani menjual hasil usahatannya atau padi dengan sistem "tebasan", sehingga harga yang petani peroleh lebih rendah jika dibandingkan dengan menjual gabah pada saat kering panen atau kering sawah. Salah satu pertimbangan petani menjual dengan cara tebasan adalah untuk menghemat biaya panen dan lebih praktis dalam hal penanganan. Namun pertimbangan tersebut seringkali kurang tepat karena petani sering menerima harga yang tidak sesuai.

5.2 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetitif Usahatani Padi Berbagai Sistem Irigasi

Untuk mengetahui keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif digunakan indikator-indikator dalam Matrik Analisis Kebijakan seperti yang terdapat dalam Tabel 28.

Tabel 28. Hasil Matrik Analisis Kebijakan Usahatani Padi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domestik			Total	Keuntungan
			TK	Modal	Tanah		
Irigasi Teknis							
Privat	7389386,28	826144,81	2125540,56	196877,41	1650900,00	3973317,97	2589923,50
Sosial	8712813,25	939219,67	2125540,56	157423,22	1650900,00	3933863,77	3839729,80
Divergensi	-1323426,97	-113074,86	0,00	39454,19	0,00	39454,19	-1249806,31
			PCR = 0,605			DRC = 0,506	
Irigasi Semiteknis							
Privat	4031845,33	1131651,79	907860,00	129805,61	1319500,00	2357165,60	636438,74
Sosial	536746,28	769755,73	907860,00	103792,59	1319500,00	2331152,59	1904641,90
Divergensi	-1335590,95	-93400,80	0,00	26013,02	0,00	26013,02	-1268203,16
			PCR = 0,787			DRC = 0,550	
Irigasi Sederhana							
Privat	5964023,33	769755,73	1946400,00	181167,59	2137275,00	4264842,59	929425,02
Sosial	7038580,50	891293,76	1946400,00	144861,64	2137275,00	4228536,64	1918750,10
Divergensi	-1074557,17	-121538,04	0,00	36305,95	0,00	36305,95	-989325,08
			PCR = 0,821			DRC = 0,688	

Sumber: Data Primer diolah Tahun 2004, Lampiran 10

5.2.1 Keunggulan Komparatif Usahatani Padi

Keunggulan komparatif yang merupakan keunggulan dalam usahatani padi yang disebabkan oleh rendahnya biaya sumber daya domestik diukur dengan menggunakan indikator rasio sumber daya domestik (*Domestic Resource Cost/DRC*). Tingkat keunggulan komparatif ini ditunjukkan oleh nilai DRC itu sendiri pada tingkat harga sosial. Dalam hal ini bila nilai $DRC < 1$ memberi arti bahwa usahatani padi memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya jika $DRC > 1$ memberi arti bahwa usahatani padi tidak memiliki keunggulan komparatif. Pada Tabel 28 tampak bahwa DRC sebesar 0,506 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, dan 0,550 untuk usahatani yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, serta 0,688 untuk usahatani padi yang menggunakan

sistem irigasi sederhana menunjukkan bahwa usahatani padi pada berbagai sistem irigasi mempunyai keunggulan komparatif dimana nilai DRC-nya lebih kecil dari satu. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menghasilkan satu satuan *output* pada harga sosial diperlukan korbanan biaya sumber daya domestik pada harga sosial lebih kecil dari satu, atau dengan kata lain untuk menghemat satu satuan devisa harus mengorbankan biaya imbang sumber daya domestik yang lebih kecil. Tabel 28 memberikan informasi bahwa usahatani padi pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi teknis mempunyai keunggulan komparatif yang lebih kuat dibandingkan dengan usahatani padi pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana.

Keunggulan komparatif usahatani padi pada lahan dengan sistem irigasi teknis disebabkan oleh ketersediaan air yang optimal yang didukung dengan kesesuaian lahan untuk ditanami padi sehingga mampu memperoleh hasil produksi yang cukup tinggi. Selain itu kemajuan teknologi pertanian di daerah penelitian dengan sistem irigasi teknis jika dibandingkan dengan daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis, hal tersebut tercermin dalam hal tatacara bercocok tanam. Petani pada daerah penelitian dengan sistem irigasi teknis sudah mulai menerapkan tatacara pemupukan yang sesuai serta pemberantasan hama yang sesuai dengan kondisi yang ada. Selain itu keunggulan komparatif ini disebabkan oleh *economic of scale* artinya bahwa keuntungan atau efisiensi akan semakin bertambah dengan ditambahkan jumlah produksi. Dalam hal ini semakin luas lahan yang dikerjakan petani maka akan meningkatkan atau menambah keuntungan yang diperoleh.

Pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis keunggulan komparatif disebabkan oleh relatif rendahnya biaya yang digunakan untuk memperoleh faktor produksi domestik khususnya lahan dan tenaga kerja. Dengan kata lain bahwa keunggulan komparatif yang ada pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis disebabkan oleh faktor bawaan (*endowment factor*) yaitu faktor rendahnya biaya tenaga kerja dan rendahnya harga sewa lahan. Biaya sewa lahan pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis ini relatif lebih rendah dibandingkan pada daerah penelitian lainnya.

Pada daerah irigasi teknis sewa lahan kurang lebih sebesar Rp 1.650.000 per hektar dalam satu musim tanam, sedangkan pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis kurang lebih sebesar Rp 1.319.500 per hektar dalam satu musim tanam, dan pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi sederhana kurang lebih sebesar Rp 2.137.275 per hektar dalam waktu satu musim tanam. Bervariasinya nilai sewa lahan ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain, produktivitas lahan atau kesuburan lahan yang berbeda. Semakin produktif lahan pertanian semakin tinggi nilai sewa lahan tersebut. Pada daerah penelitian dengan sistem irigasi sederhana merupakan daerah subur sehingga nilai sewa tanah di daerah tersebut lebih tinggi dari nilai sewa tanah pada sistem irigasi yang lain. Hal tersebut ditandai dengan sedikitnya jumlah *input* (benih dan pupuk), yang digunakan untuk usahatani padi. Namun kalau dilihat dari sisi produksi, rata-rata produksi pada saat penelitian berlangsung hanya berkisar 5,4 ton padahal berdasarkan hasil laporan Balai Penyuluh Pertanian pada Tahun 2003 produksi rata-rata berkisar 6,7 ton. Rendahnya produksi ini dikarenakan adanya serangan hama, hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan obat-obatan oleh petani yang biasanya tidak digunakan jika tidak ada hama dan penyakit tumbuhan. Faktor lain yang menyebabkan nilai sewa tanah yang tinggi adalah posisi atau tata letak lahan juga mempengaruhi besarnya nilai sewa lahan itu. Tata letak lahan ini bisa dilihat dari keterkaitan dari sisi produksi dan dari sisi ekonomi. Dari sisi produksi, lahan yang terletak di daerah dengan topografi datar lebih tinggi nilai sewanya jika dibandingkan dengan daerah dengan topografi pegunungan atau daerah dengan topografi perbukitan, karena akan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Sedangkan dari sisi ekonomi, lahan yang dekat dengan pusat pemerintahan, sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan raya atau pasar, nilai sewanya lebih tinggi jika dibandingkan dengan lahan yang terletak jauh dari sarana dan prasarana ekonomi karena untuk kegiatan pemenuhan *input* pertanian, *output* pertanian, serta pemenuhan kebutuhan akan informasi pertanian lebih mudah. Sehingga dengan kemudahan tersebut nilai sewa lahan menjadi lebih tinggi.

Keunggulan komparatif pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis juga disebabkan oleh faktor tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis, lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya tenaga kerja pada daerah penelitian dengan sistem irigasi teknis dan sistem irigasi sederhana. Tingkat upah di daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis kurang lebih sebesar Rp. 6000; per orang untuk 5 jam kerja, sedangkan pada daerah penelitian dengan sistem irigasi teknis dan sistem irigasi sederhana upah tenaga kerja kurang lebih Rp 10.000; per orang untuk 5 jam kerja. Dengan lebih rendahnya biaya upah tenaga kerja dan sewa lahan tersebut maka juga menyebabkan relatif rendahnya biaya yang dikeluarkan khususnya untuk faktor domestik. Namun dari sisi produksi usahatani padi dengan sistem irigasi semiteknis produksi yang diperoleh lebih rendah jika dibandingkan dengan usahatani padi pada sistem irigasi teknis dan sistem irigasi sederhana. Hal tersebut telah dibahas pada permasalahan efisiensi usahatani. Sedangkan pada daerah penelitian dengan sistem irigasi sederhana keunggulan komparatif disebabkan oleh produktivitas lahan yang juga didukung dengan lebih rendahnya biaya *input tradable* yang dikeluarkan sehingga untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah *output* pada harga sosial diperlukan 0,688 biaya sumber daya domestik.

Biaya modal, para petani pada umumnya menggunakan modal sendiri. Mengingat tidak tersedianya kredit bersubsidi, maka petani diasumsikan menggunakan biaya dengan bunga modal privat yang lebih tinggi (20% per tahun) dari bunga modal sosialnya (16% per tahun).

5.2.2 Keunggulan Kompetitif Usahatani Padi

Keunggulan kompetitif merupakan ukuran aktual yaitu mengukur daya saing pada kondisi pasar yang berlaku tanpa mempermasalahkan ada tidaknya distorsi pasar. Keunggulan kompetitif dalam usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember disebabkan oleh pengelolaan/usahatani padi yang optimal. Keunggulan kompetitif ini dapat diketahui melalui indikator *Privat Cost Ratio* (PCR) dimana dalam usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di

Kabupaten Jember diperoleh nilai seperti pada Tabel 34. Nilai PCR sebesar 0,605 untuk usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sebesar 0,787 untuk usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis, dan sebesar 0,821 untuk usahatani padi pada sistem irigasi sederhana, menunjukkan bahwa usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember mempunyai keunggulan kompetitif. Artinya untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah *output* pada harga privat hanya diperlukan kurang dari satu satuan biaya sumber daya domestik. Dapat juga berarti untuk menghemat satu satuan devisa pada harga privat hanya diperlukan korbanan kurang dari satu-satuan biaya sumber daya domestik, yaitu sebesar 0,605 untuk usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sebesar 0,787 untuk usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan sebesar 0,821 untuk usahatani padi pada sistem irigasi sederhana. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai PCR untuk usahatani padi pada sistem irigasi teknis lebih kecil daripada nilai PCR usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan usahatani padi pada sistem irigasi sederhana.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa usahatani padi pada sistem irigasi teknis mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih baik dari usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana karena nilai tambah *output* yang dihasilkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai tambah *output* pada sistem irigasi yang lain. Keunggulan kompetitif yang lebih baik ini disebabkan karena produksi yang dihasilkan oleh usahatani padi pada sistem irigasi teknis lebih baik dari segi produktivitas maupun kualitasnya, sehingga menghasilkan produk yang lebih baik dan memiliki nilai jual yang lebih baik pula.

Sedangkan keunggulan kompetitif pada daerah penelitian dengan sistem irigasi semiteknis lebih tinggi jika dibandingkan dengan keunggulan kompetitif pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi sederhana. Hal tersebut disebabkan oleh biaya faktor domestik pada usahatani padi dengan sistem irigasi semiteknis lebih rendah dari pada biaya faktor domestik pada usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis dan sederhana.

5.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usahatani Padi

5.3.1 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap *Output*

Terjadinya penerimaan privat yang lebih besar dari penerimaan sosial merupakan dampak kebijakan harga dan mekanisme pasar yang berpengaruh positif terhadap harga aktual komoditas padi di tingkat petani. Penerimaan petani yang lebih tinggi dari penerimaan petani pada harga sosial akan meningkatkan daya saing padi. Sebaliknya kebijakan pemerintah akan berdampak negatif terhadap penerimaan dan daya saing padi melemah, jika arah dari kebijakan harga dan mekanisme pasar menyebabkan harga padi dunia/di tingkat sosial lebih tinggi dari harga padi di tingkat petani. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan terhadap harga *output* padi didekati dengan indikator *Nominal Protection Coefficient Output* (NPCO) dimana hasilnya disajikan pada Tabel 29

Tabel 29. Transfer Output Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Total Penerimaan	NPCO
Sistem Irigasi Teknis		
Privat	7389386,28	
Sosial	8712813,25	0,848
Divergensi	-1323426,97	
Sistem Irigasi Semiteknis		
Privat	4031855,33	
Sosial	5367446,28	0,751
Divergensi	-1335590,95	
Sistem Irigasi Sederhana		
Privat	596402,33	
Sosial	703858,50	0,847
Divergensi	-107456,17	

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2004, Lampiran 10.

Berdasarkan pada Tabel 29 tampak bahwa nilai NPCO baik untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana lebih kecil dari satu. Nilai NPCO sebesar 0,848 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sebesar 0,751 untuk usahatani padi yang menggunakan

sistem irigasi semiteknis, dan sebesar 0,847 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap *output* karena nilai NPCO < 1. Nilai NPCO lebih kecil dari 1 disebabkan oleh lebih kecilnya penerimaan yang diterima oleh petani jika dibandingkan dengan penerimaan yang dihitung dengan harga sosialnya atau penerimaan yang seharusnya diterima. Petani memperoleh penerimaan yang lebih kecil dari penerimaan yang seharusnya diperoleh petani yaitu sebesar Rp 7.389.386,28 sedangkan penerimaan yang seharusnya diterima petani sebesar Rp 8.712.813,25 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sebesar Rp 4.031.855,33 sedangkan penerimaan yang seharusnya diterima petani Rp 5.367.446,28 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, dan sebesar Rp 5.964.023,33 sedangkan penerimaan yang seharusnya diterima Rp 7.038.580,50 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana. Hal ini berarti petani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis menerima harga *output* 15,2% lebih rendah dari harga sosialnya (harga yang seharusnya diterima) sedangkan petani yang menggunakan sistem irigasi semiteknis menerima harga *output* 24,9% lebih rendah dari harga sosialnya (harga yang seharusnya diterima), serta petani yang menggunakan sistem irigasi sederhana menerima harga *output* 15,3% lebih rendah dari harga sosialnya (harga yang seharusnya diterima).

Terkait dengan nilai NPCO untuk usahatani padi pada sistem irigasi teknis, semiteknis, dan sistem irigasi sederhana diketahui bahwa petani tidak mendapatkan harga yang seharusnya disebabkan oleh beberapa faktor. Terbatasnya akses pasar petani menyebabkan harga yang dibeli tengkulak jauh lebih rendah dari harga yang seharusnya diterima petani. Hal itu diperparah dengan sistem penjualan "tebasan" sehingga harga gabah jauh di bawah harga gabah yang dibeli tengkulak. Faktor berikutnya yang menyebabkan petani menerima harga yang lebih rendah dari harga yang seharusnya adalah lembaga pemasaran *output* yang belum berfungsi secara efektif, sehingga rantai pemasaran menjadi panjang dan biaya untuk pemasaran tinggi. Faktor berikutnya adalah kelembagaan dan keberadaan kelompok tani yang belum dimanfaatkan secara

maksimal sehingga informasi harga, jaringan pasar, skala dan kontinuitas produksi belum menjadi perhatian petani.

Selain itu penyebab rendahnya harga padi di tingkat petani terkait dengan menurunnya kualitas hasil terutama yang terjadi di daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, sebagai akibat semakin kritisnya lahan. Kritisnya lahan yang terjadi pada daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi semiteknis diakibatkan oleh pola tanam satu tahun padi-padi-padi karena air irigasi tersedia melimpah, dan juga disebabkan oleh penggunaan *input* terutama obat-obatan/pestisida dan pupuk kimia yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan obat-obatan/pestisida dan pupuk kimia di daerah penelitian yang menggunakan sistem irigasi teknis dan sederhana. Semakin monotonnya pola tanam dan tingginya *input* kimia yang digunakan akan menyebabkan lahan menjadi jenuh sehingga kualitas dan kuantitas produksi padi menurun sehingga harga padi yang diterima petani menurun.

5.3.2 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap *Input Tradable*

Divergensi dan dampak kebijakan pemerintah yang terdapat pada *input tradable* ditunjukkan oleh NPCI. Bentuk kebijakan pada *input tradable* dapat berupa kebijakan perdagangan serta subsidi dan pajak, sedangkan bentuk divergensi lainnya bisa disebabkan adanya distorsi pasar. Koefisien proteksi *input* nominal (NPCI) sebagai indikasi *transfer input* yang merupakan rasio antara biaya *input tradable* yang dihitung berdasarkan harga privat dengan biaya yang dihitung pada harga sosial. Secara terperinci nilai NPCI untuk usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Transfer Input Tradable Usahatani Padi pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

Penerimaan	Input Tradable							Total	
	Benih (Rp/ha)	Urea	ZA	TSP	NPK	KCL	Obat Obatan		
Irigasi Teknis									
Privat	7389386,28	163920,80	347313,50	49907,82	89213,31	101890,25	58232,45	15666,67	826144,3
Sosial	8712813,25	163920,80	404138,53	68831,08	118843,52	121025,54	49143,53	13316,67	939219,0
Divergensi	-1323426,97	0,00	-56825,03	-18923,26	-29630,21	-19135,29	9088,92	2350,00	-113074,3
NPCI = 0,880									
Irigasi Semiteknis									
Privat	4031853,33	171204,05	484778,60	108865,57	76962,50	0,00	0,00	196440,26	1038250,3
Sosial	5367446,28	171204,05	549149,00	150856,56	93467,96	0,00	0,00	166974,22	1131651,7
Divergensi	-1335590,95	0,00	-64370,39	-41990,99	-16505,46	0,00	0,00	29466,04	-93400,3
NPCI = 0,917									
Irigasi Sederhana									
Privat	5964023,33	147712,50	361728,00	80449,73	76600,00	0,00	20937,50	82328,00	769755,3
Sosial	7038580,50	147712,50	439129,00	117985,21	99434,00	0,00	17054,25	69978,80	891293,3
Divergensi	-1074557,17	0,00	-77401,00	-37535,49	-22834,00	0,00	3883,25	12349,20	-121538,3
NPCI = 0,864									

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2004, Lampiran 10.

Berdasarkan Tabel 36 tampak bahwa nilai NPCI sebesar 0,880 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sebesar 0,917 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, dan sebesar 0,864 untuk usahatani yang menggunakan sistem irigasi sederhana. Nilai tersebut menunjukkan bahwa petani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis dan yang menggunakan sistem irigasi semiteknis serta petani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana mendapatkan proteksi dari pemerintah atau dengan kata lain kebijakan pemerintah terhadap *input* memberikan dampak positif terhadap usahatani padi yang ditunjukkan dengan nilai NPCI yang kurang dari satu. Hal ini menunjukkan bahwa petani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, petani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, dan petani yang menggunakan sistem irigasi sederhana sama-sama membayar *input tradable* dengan harga yang lebih rendah bila dibandingkan dengan harga sosialnya yang harus dibayar yaitu sebesar 8,1% lebih rendah dari harga sosial untuk irigasi teknis, 5,8% lebih rendah dari harga sosialnya untuk irigasi semiteknis dan sebesar 10,8% lebih rendah dari harga sosial untuk irigasi sederhana. Lebih rendahnya harga *input* di tingkat petani

ini disebabkan oleh diberlakukannya kembali subsidi pupuk pertanian. Pupuk pertanian yang bersubsidi antara lain pupuk Urea, TSP, ZA, dan NPK.

Kondisi yang berbeda yang dialami oleh petani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana terletak pada penggunaan jenis *input* dan berbedanya harga *input* di tingkat petani. Pada sistem irigasi sederhana, petani padi menerima harga beberapa *input* pertanian (Urea dan ZA) yang lebih rendah dari pada harga *input* pertanian pada sistem irigasi teknis dan semiteknis. Pada daerah dengan sistem irigasi sederhana jenis pupuk yang banyak digunakan adalah pupuk Urea.

Berdasarkan Tabel 36 menunjukkan bahwa untuk *input tradable* berupa benih mempunyai nilai divergensi nol yang berarti bahwa harga sosial dan harga privat besarnya sama. Hal ini karena petani menggunakan benih yang diusahakan sendiri sehingga pendugaan harga sosial sama dengan harga privatnya. Secara keseluruhan petani padi yang berada pada semua sistem irigasi (teknis, semiteknis, sederhana) memperoleh harga privat untuk *input tradable* yang lebih murah dari harga sosialnya. Adapun *input tradable* yang harga privatnya lebih rendah/murah dari harga sosialnya yaitu Urea, ZA, TSP, NPK. Hal itu dikarenakan subsidi pemerintah terhadap pupuk tersebut diberlakukan kembali yang pada akhir tahun 1998 pernah dicabut. Untuk *input tradable* yang berupa pupuk KCL dan obat-obatan pemerintah tidak menetapkan harga subsidi sehingga petani padi pada seluruh sistem irigasi memperoleh harga privat/harga di tingkat petani yang lebih tinggi dari harga sosialnya.

Mahalnya harga *input* (KCL, Obat-obatan) yang digunakan dalam usahatani padi ini disebabkan karena untuk penjualan *input* tersebut dibebani pajak oleh pemerintah. Pembebanan pajak dari pemerintah tersebut oleh distributor pupuk langsung dikenakan/ditambahkan pada harga pupuk sehingga menyebabkan harga *input* pada tingkat petani lebih tinggi dari harga pupuk yang sebenarnya. Divergensi yang cukup besar pada pembelian *input* bisa juga disebabkan oleh struktur pasar yang tidak terintegrasi dengan baik yang mengakibatkan disparitas harga yang cukup besar antara Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah dengan harga di tingkat petani. Disamping itu

perbedaan harga pupuk di kota dan di desa akibat dari biaya distribusi pupuk dan sistem pembayaran tertunda (yarnen) juga bisa memberikan kontribusi terhadap tingginya harga *input* di tingkat petani.

5.3.3 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap *Input - Output*

Untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap *input-output* secara keseluruhan digunakan indikator Transfer Bersih Kebijakan (NPT), Koefisien Keuntungan (PC), Koefisien Proteksi Efektif (EPC) dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP). NPT menunjukkan ada tidaknya surplus produsen yang disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah, PC menunjukkan apakah kebijakan pemerintah mampu memberikan insentif pada usahatani padi, EPC menunjukkan tingkat proteksi simultan terhadap *output* dan *input tradable* dan SRP merupakan indikator yang menunjukkan proporsi penerimaan pada harga sosial yang diperlukan apabila subsidi atau pajak digunakan sebagai pengganti kebijakan. Untuk mengetahui Transfer Bersih Kebijakan (NPT), Koefisien Keuntungan (PC), dan Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP) dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Nilai NPT, PC dan SRP Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domestik	Profit	PC	SRP
Irigasi Teknis						
Privat	7389386,28	826144,81	3973317,97	2589923,50		
Sosial	8712813,25	939219,67	3933863,77	3839729,80	0,675	-0,143
Divergensi	-1323426,97	-113074,86	39454,19	-1249806,31		
Irigasi Semiteknis						
Privat	4031855,33	1038250,99	2357165,6	636438,74		
Sosial	5367446,28	1131651,79	2331152,59	1904641,90	0,334	-0,236
Divergensi	-1335590,95	-93400,80	26013,02	-1268203,16		
Irigasi Sederhana						
Privat	5964023,33	769755,73	4264842,59	929425,02		
Sosial	7038580,50	891293,76	4228536,64	1918750,10	0,484	-0,141
Divergensi	-1074557,17	-121538,04	36305,95	-989325,08		

Sumber : Data Primer diolah Tahun 2004, Lampiran 10.

produksi, sebab biaya yang diinvestasikan petani lebih besar dari pada nilai tambah keuntungan yang dapat diterimanya.

Selanjutnya untuk melihat pengaruh dari keseluruhan kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar *input-output*, apakah memberikan insentif atau disinsentif terhadap usahatani padi didekati dengan angka koefisien proteksi efektif (EPC = *Effective Profitability Coefficient*). Bila nilai EPC lebih besar dari satu berarti dampak bersih kebijakan pemerintah dalam pembentukan harga dan mekanisme pasar komoditas padi telah memberi insentif (perlindungan) terhadap petani untuk mengembangkan usahanya. Sebaliknya jika EPC lebih kecil dari satu berarti dampak bersih kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar menimbulkan disinsentif (menghambat) terhadap pengembangan usahatani padi. Nilai EPC (*Effective Profitability Coefficient*) untuk usahatani padi pada sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana dapat di lihat pada Tabel 32.

Tabel 32. Koefisien Proteksi Efektif Usahatani Padi Pada berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Penerimaan	Input Tradable	EPC
Irigasi Teknis			
Privat	7389386,28	826144,81	0,844
Sosial	8712813,25	939219,67	
Divergensi	-1323426,97	-113074,86	
Irigasi Semiteknis			
Privat	4031855,33	1038250,99	0,707
Sosial	5367446,28	1131651,79	
Divergensi	-1335590,95	-93400,80	
Irigasi Sederhana			
Privat	5964023,33	769755,73	0,845
Sosial	7038580,50	891293,76	
Divergensi	-1074557,17	-121538,04	

Sumber : Data primer diolah, 2004, Lampiran 10.

Berdasarkan pada Tabel 32 tampak bahwa besarnya nilai EPC untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, dan sistem irigasi sederhana bernilai EPC < 1 yaitu berturut turut sebesar 0,844 dan 0,707 serta sebesar 0,845. Nilai EPC tersebut menunjukkan tidak adanya perlindungan atau proteksi pemerintah terhadap petani padi bahkan petani harus

menerima harga *output* yang lebih rendah dari pada harga *output* yang seharusnya diterima petani, sehingga nilai tambah yang dinikmati oleh petani padi lebih kecil dari nilai tambah secara sosial yang ditunjukkan pada Tabel 32.

Berdasarkan nilai NPT, PC, SRP dan EPC diketahui bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak positif/tidak berpihak baik dari segi *output*, *input tradable* maupun *input non tradable* terhadap usahatani padi. Artinya pengaruh dari kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar seperti yang sekarang berdampak negatif terhadap struktur biaya produksi, sebab biaya yang diinvestasikan petani lebih besar dari pada keuntungan sosial yang diterima petani (keuntungan yang seharusnya diterima). Lebih rendahnya nilai tambah yang diterima petani dari harga sosial yang seharusnya diterima adalah disebabkan oleh beberapa faktor.

Kurang lebih ada enam faktor yang ada pada daerah penelitian yang menyebabkan petani produsen menerima harga *input* ataupun *output* yang tidak sesuai dengan aturan atau kebijakan pemerintah, yaitu: (1) Faktor kelembagaan yang masih terbatas. Keberadaan sarana prasarana dan manajemennya, baik kelembagaan pemasaran hasil, lembaga penyedia saprodi, maupun penunjangnya masih kurang memadai, sehingga jargon tujuh syarat tepat (tepat waktu, tepat harga, tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat layanan) masih jauh dari kenyataan, (2) Tingkat permodalan (kapital) petani terbatas. Dampaknya dalam pemenuhan harga *input* modern, dan harga penjualan *output* masih ditentukan dan dikuasai oleh pedagang, sehingga posisi daya tawar petani jadi lemah, dan sistem demokratisasi “bermitra usaha” menjadi kecil dan semakin jauh dari apa yang diharapkan, (3) Tingkat pendidikan dan persatuan kelompok petani kurang kuat, sehingga baik dari skala usaha, maupun kualitas dan kontinuitas produksi menjadi tidak pasti dan selalu terabaikan, (4) Semangat beragribisnis rendah oleh karena persepsi keharusan atau budaya turunan lebih dominan, sehingga rekomendasi anjuran, hasil penelitian, dan inovasi baru, lamban teradopsi, (5) Mental usaha masih bermental “subsidi” sehingga terkendala untuk maju, mandiri, dan mapan dalam menyikapi iklim kompetitif usaha yang rasional, dan (6) Tujuan usaha masih bersifat lokalit, tidak kosmopolit sehingga tidak dapat

menerawang jauh ke sistem usaha yang lebih baik, dan pasar global yang sedang berkembang. Oleh sebab itu, sudah melembaganya keenam faktor tersebut, maka dampak akhir dari kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar yang berlaku saat ini secara ekonomi belum mendukung pengembangan usahatani padi.

Berdasarkan hasil Matrik Analisis Kebijakan, diketahui bahwa efisiensi, keunggulan kompetitif serta keunggulan komparatif usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sistem irigasi semiteknis, sistem irigasi sederhana mempunyai nilai yang berbeda. Sistem irigasi yang baik harus diimbangi dengan cara bercocok tanam yang baik untuk menjamin tingginya produksi dan kualitas yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pada usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis hasil yang diperoleh lebih rendah dari hasil usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana. Faktor tingkat teknologi, dan adopsi inovasi, serta sarana dan prasarana *input* dan *output* mempengaruhi tingkat produksi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang menyangkut beberapa hal. Bentuk-bentuk penyuluhan dalam rangka introduksi teknologi baru bagi petani perlu diadakan reorientasi kembali, karena petani saat ini memiliki kebebasan untuk menolak dan menuntut manakala teknologi yang diintroduksi tidak memiliki efektifitas terhadap peningkatan produksi dan pendapatan. Dengan demikian bentuk penyuluhan pada saat ini lebih dituntut memberikan contoh bukan hanya teori dan intruksi.

Jaminan pemasaran hasil-hasil pertanian, tampaknya suatu kondisi yang diharapkan oleh petani. Hal ini karena petani sekarang lebih kebal jika harga *input* produksi naik, dari pada harus menerima harga *output* yang terus turun. Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang lebih bijaksana terhadap komoditas padi masih mutlak diperlukan. Kebijakan tidak hanya menjamin harga dan pemasaran tetapi juga mengkondisikan agar sistem agribisnis pertanian menjadi kondusif baik dari jaminan ketersediaan *input* seperti benih, pupuk, obat-obatan hingga penyediaan pasar *output*.

5.3.4 Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Sistem Irigasi

Peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis. Kegiatan pertanian tidak terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran yang sangat penting. Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom memberikan kewenangan yang lebih kepada Propinsi sebagai daerah otonom untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya kegiatan keirigasian yang bersifat lintas.

Adanya pergeseran nilai air dari sumberdaya milik bersama (*public goods*) yang melimpah dan dapat dikonsumsi tanpa biaya menjadi sumberdaya ekonomi (*economic goods*) yang mempunyai fungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional, adanya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, dan adanya konversi lahan beririgasi untuk kepentingan lainnya, menimbulkan adanya kebijakan pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas irigasi serta menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

Pengelolaan irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang meliputi:

1. Redefinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi
2. Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air
3. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air
4. Pembiayaan pengelolaan irigasi
5. Penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien maka pemerintah melakukan pengaturan kembali (redefinisi) tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat petani, dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air

sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk melaksanakan desentralisasi dan otonomi yang luas, maka Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyediaan air, pelayanan dan fasilitas bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya.

Pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya untuk mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonom, mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial ekonomi, budaya berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota perkumpulan petani pemakai air untuk secara demokratis membentuk organisasi/unit usaha ekonomi tingkat usahatani sesuai dengan pilihannya, sehingga dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumberdaya produksi termasuk sumberdaya air dan pengelolaan irigasi sesuai asas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan prinsip satu sistem Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi. Pemerintah Daerah memfasilitasi di bidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Sesuai dengan kewenangannya, perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan. Pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawab petani dibiayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber lainnya (bantuan Pemerintah). Penetapan, pengumpulan, penggunaan dan pertanggungjawaban iuran pengelolaan irigasi, dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan, sedangkan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi maka petani/masyarakat setempat diikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi.

Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang menekankan pada peran serta dari petani pemakai air dalam mengelola irigasi merupakan suatu kebijakan pemerintah di era otonomi daerah. Kebijakan ini secara teknis di lapangan mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari kebijakan ini yaitu petani diberi kewenangan atas pengelolaan irigasi di daerahnya. Kelemahan kebijakan ini antara lain: *pertama*, sumberdaya air yang semakin langka menyebabkan air sebagai sumberdaya milik bersama menjadi sumberdaya ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak (pembagi air, petani lahan luas) untuk kepentingan individu. Langkanya air terutama pada musim kemarau membuat petani yang berlahan luas berupaya untuk mencukupi kebutuhan akan air dengan mengabaikan prinsip keadilan. Petani lahan luas biasanya memiliki kemampuan untuk memberi insentif yang lebih besar kepada pengatur air yang berarti bahwa petani lahan luas sering mendominasi pengaliran air ke lahannya, dan petani lahan sempit tidak bias mencukupi kebutuhan akan air secara optimal.

Kedua, perkumpulan petani pemakai air jatuh ke dalam perangkap sistem yang tidak memiliki semangat maupun spontanitas untuk berbuat. Perkumpulan petani pemakai air bergerak kalau digerakkan. Para petani pemakai air sebagai anggotanya tidak merasa terikat batin dan terikat di dalam organisasi itu. Petani umumnya berpendapat bahwa perkumpulan petani pemakai air adalah bentukan pemerintah yang dikendalikan dari atas oleh Kepala Desa, Camat dan seterusnya,

dan bukan membentuk mereka sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka rasa memiliki dan sifat solidaritas dengan semangat kegotongroyongan tidak serta ada dalam tubuh perkumpulan petani pemakai air.

Ke tiga, kelestarian sarana irigasi yang mulai terancam, hal ini disebabkan oleh iuran pemeliharaan yang tidak berjalan dengan baik. Iuran irigasi di daerah penelitian umumnya dilakukan ketika panen dan bersifat subyektif. Iuran irigasi tersebut dinilai sebagai balas jasa kepada pengatur air atas jasanya mengalirkan air ke lahan pertaniannya, sedangkan iuran irigasi untuk pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kenyataan tersebut, sangat penting bagi pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap jalannya pengelolaan air oleh perkumpulan petani pemakai air, sehingga prinsip adil dan merata dapat tercapai. Pendekatan partisipatif merupakan keadaan yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kelembagaan yang mampu mengelola dan mengatur irigasi secara mandiri. Kebijakan pemerintah diharapkan tidak terbatas pada penyerahan wewenang pengelolaan irigasi tetapi juga menyangkut pembinaan dan penyuluhan terhadap kelembagaan yang ada di dalamnya, sehingga kelembagaan dalam irigasi dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan petani terhadap air.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Usahatani padi pada sistem irigasi teknis di Kabupaten Jember lebih efisien daripada usahatani padi pada sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana.
2. Usahatani padi pada berbagai sistem irigasi di Kabupaten Jember mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang ditunjukkan dengan DRC dan PCR sebesar 0,506 dan 0,605 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, sebesar 0,550 dan 0,787 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, dan sebesar 0,688 dan 0,821 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana.
3. Kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap *output* usahatani padi yang ditunjukkan dengan NPCO sebesar 0,848 untuk sistem irigasi teknis, sebesar 0,751 untuk sistem irigasi semiteknis, dan sebesar 0,847 untuk sistem irigasi sederhana, sedangkan terhadap *input tradable* kebijakan pemerintah memberikan dampak positif terhadap usahatani padi yang ditunjukkan dengan NPCI secara berturut-turut sebesar 0,880 sebesar 0,917 dan sebesar 0,864, dan secara keseluruhan kebijakan pemerintah tidak memberikan dampak positif terhadap *input* dan *output* usahatani padi yang ditunjukkan dengan NPT sebesar -1.249.806,31 PC sebesar 0,675, SRP sebesar -0,143, EPC sebesar 0,844 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi teknis, dan NPT sebesar -1.268.203,16 PC sebesar 0,334, SRP sebesar -0,136, EPC sebesar 0,707 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi semiteknis, serta NPT sebesar -989.325,08 PC sebesar 0,484 SRP sebesar -0,141 dan EPC sebesar 0,845 untuk usahatani padi yang menggunakan sistem irigasi sederhana.

6.2 Saran

1. Untuk meningkatkan efisiensi, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif maka petani hendaknya memperbaiki jaringan irigasi atau memperbaiki pengadaan dan ketersediaan air. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sistem irigasi teknis memiliki efisiensi usahatani, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif lebih tinggi jika dibandingkan dengan sistem irigasi semiteknis dan sistem irigasi sederhana.
2. Untuk mendapatkan dampak positif dari kebijakan terhadap *output*, petani hendaknya mengusahakan tanaman padi dengan lebih baik sehingga hasilnya dapat meningkat lagi baik dari kualitas dan kuantitas, sedangkan pemerintah perlu mengontrol kebijakan yang telah ditetapkan terhadap harga *output* melalui peninjauan secara langsung terhadap sistem kelembagaan pemasaran padi di Kabupaten Jember.
3. Untuk mendapatkan harga *output* yang lebih baik, sebaiknya petani tidak menjual *output* dengan sistem tebasan atau sistem ijon.

DAFTAR PUSTAKA

- AAK. 1990. **Budidaya Tanaman Padi**. Yogyakarta: Kanisius.
- Aji, J.M.M.1997. **Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Nilai Tambah Agroindustri Kedelai Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Laporan Penelitian**. Jember: Fakultas Pertanian.
- Amang, B. 1993. **Ekonomi Perberasan, Jagung, dan Minyak Sawit**. Jakarta: PT Dharma Karya Utama.
- , 1995. **Kebijaksanaan Pangan Nasional**. Jakarta: PT Dharma Karya Utama.
- Badan Pusat Statistik. 2002. **Jember Dalam Angka**. Jember: Badan Pusat Statistik.
- Baharsjah, S. 1999. Naskah Pidato Sebagai sambutan Tertulis Pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional Popmasepi Bandung. Dalam Bambang, S. 1999. **Analisis Kebijakan Agroindustri Gula Kelapa**. Jember: Universitas Jember.
- Boediono. 2001. **Ekonomi Internasional**. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 2003. **Laporan Tahunan**. Jember: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- Downey, W.D dan Steven P.E. 1989. **Manajemen Agribisnis** Alih Bahasa: Rochidayat, G. S. an Alfonsus, S. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 1996. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta: Erlangga.
- Gittinger, J.P. 1986. **Analisis Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian**. Jakarta: UI Press.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. 1999. **Garis-Garis Besar Haluan Negara**. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Monke, E.A and Scott R Pearson. 1989. **The Policy Analysis Matrix Agriculture Development**. United States of Amerika: Cornell University Press.
- Mulyadi. 1999. **Akuntansi Biaya**. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nazir, M. 1999. **Metodologi Penelitian**. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Noor, M. 1996. **Padi Lahan Marginal**. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Noor, M. 1997. **Keragaan Peluang dan Prospek Agribisnis Dalam Pertanian Jawa Timur**. Jember : Dalam Seminar Agribisnis Universitas Jember.
- Pasandaran, E. 1991. **Irigasi di Indonesia (Strategi dan Pengembangan)**. Jakarta: LP3ES.
- Pearson, S.R., Gotsch, C., Bahri, S. 2003. **Application of the Policy Analysis Matrix in Indonesia Agriculture**. Available at: [http:// www.macrofoodpolicy.com](http://www.macrofoodpolicy.com). (diakses 20 Agustus 2003).
- Pitojo, S. 2000. **Budidaya Padi Sawah Tabela**. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pujiastutik, Y. 1999. **Peranan Pola Tanam Pada Berbagai Sistem Irigasi Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani**. *Skripsi*. Jember: jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember
- Purwadi, B. 2000. **Riset Pemasaran: Implementasi Dalam Saluran Pemasaran**. Jakarta: Grafindo
- Pusposutardjo, S. 2001. **Pengembangan Irigasi Usahatani Berkelanjutan dan Gerakan Hemat Air**. Jakarta: DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS.
- Rachman, A. 1990. **Analisa Kebijakan Pangan Antara Tujuan dan Kendala**. Jakarta: Bulog
- Rahardja, P dan Manurung, M. 1999. **Teori Ekonomi Mikro (Suatu Pengantar)**. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- , 2000. **Teori Ekonomi Makro**. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Rasahan, A. 1999. **Refleksi Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara)**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Reksoprayitno, S. 2000. **Pengantar Ekonomi Makro**. Yogyakarta: BPFE
- Rijanto. 1994. **Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Produksi Beras di Indonesia**. Jember: Lemlit-Unej.
- , 1997. **Kebijakan Pemerintah Dalam Produksi Beras di Indonesia**. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Rosyidi, S. 1991. **Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro**. Surabaya: Duta Jasa.
- Saptana, Supena, dan Purwantini. 2002. **Efisiensi dan Daya Saing Usahatani Tebu dan Tembakau di Jawa Timur dan Jawa Tengah**. Bogor : CASER Bogor.

- Shinici, I. 1992. **Pembangunan Ekonomi Indonesia**. Jakarta: UI-Press.
- Simatupang dan Purwoto. 1990. **Pengembangan Agroindustri Sebagai Penggerak Pembangunan Daerah**. Bogor: Pusat Penelitian Agroekonomi.
- Siregar, M. 2003. **Tinjauan Kebijakan Perdagangan Komoditas Kedelai**. Dalam *SOCA*.(Juli III) No. 2. Bali : Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Siskel S.E dan Hutapea. 1996. **Irigasi di Indonesia (Peran Masyarakat dan Penelitian)**. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Inconesia.
- Soekartawi. 1995. **Analisis Usahatani**. Jakarta: UI-Press.
- Sopater, S dkk. 1998. **Mengembangkan Strategi Ekonomi**. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Soetrisno. 1998. **Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Komoditas Padi Dalam Mendukung Agroindustri**. *Laporan Penelitian*. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.
- Sukandarrumidi. 2002. **Metodologi Penelitian**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sukirno, S. 2001. **Makro Ekonomi**. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sumaryanto, S dan Supena, F. 2003. **Analisis Keunggulan komparatif dan Kompetitif Komoditas Kentang dan Kubis di Wonosobo Jawa Tengah**. Dalam *SOCA*. (Januari, III) No. 1. Bali: Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Sumodiningrat, G. M. Kuncoro. 1990. **Strategi Pembangunan Pertanian dan Industri**. Dalam *PRISMA*. (April, XIX). No. 2. Jakarta: LP3ES
- Suparyono dan A. Setyono. 1994. **Padi**. Jakarta: Penebar Swadaya.
- , 1997. **Mengatasi Permasalahan Budidaya Padi**. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sutawi. 2002. **Manajemen Agribisnis**. Malang: UMM.
- Suwandari A, dkk. 2002. **Pengantar Ilmu Pertanian**. Jember: Universitas Jember.
- Varley R.C.G, 1995. **Masalah dan Kebijakan Irigasi**. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Wibowo, R. 1993. **Corak dan Prospek Pembangunan Pertanian dalam era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II**. Makalah disampaikan pada Seminar Regional HIMASETA. Jember: Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Wirawan, B dan S.N Wahyuni. 2002. **Memproduksi Benih Bersertifikat (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau)**. Jakarta: Penebar Swadaya.



Lampiran 1. Data Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004 (per Hektar).

No	Nama	1		2			3			4		
		Luas Lahan (Ha)	Konversi	Kebutuhan (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Biaya Bibit (Rp)	Kebutuhan (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp)	Kebutuhan (Kg)	Harga (Rp/Kg)	Biaya (Rp)
1	P. Sujud	0.25	1.00	60.00	3000.00	180000.00	400.00	1150.00	460000.00	80.00	1600.00	128000.00
2	P. Sahrowi	0.30	3.33	83.33	3000.00	250000.00	333.33	1350.00	450000.00	0.00	0.00	0.00
3	P. H. Ariphon	3.00	0.33	55.00	2500.00	137500.00	266.67	1050.00	280000.00	50.00	1400.00	70000.00
4	P. Jamal	1.50	0.67	53.33	3000.00	160000.00	233.33	1188.57	277333.00	100.00	1550.00	155000.00
5	P. Sudibyo	0.40	2.50	50.00	2800.00	140000.00	500.00	1250.00	625000.00	125.00	1400.00	175000.00
6	P. Mahfid	1.00	1.00	60.00	3000.00	180000.00	250.00	1280.00	320000.00	100.00	1600.00	160000.00
7	P. Supangat	0.20	5.00	50.00	3000.00	150000.00	175.00	1200.00	210000.00	0.00	0.00	0.00
8	P. Saeri	0.54	1.85	55.56	3000.00	166666.67	231.48	1200.00	277777.78	92.59	1400.00	129629.63
9	P. Rahmad	1.00	1.00	50.00	2600.00	130000.00	300.00	1050.00	315000.00	50.00	1500.00	75000.00
10	P. Adi Sutrisno	0.50	2.00	50.00	3000.00	150000.00	200.00	1300.00	260000.00	0.00	0.00	0.00
Rata-rata Irigasi Teknis				56.72	2890	163927.22	288.98	1201.86	347314.42	59.76	1492.86	89212.04
1	P. Karnam	0.25	4.00	80.00	2750.00	220000.00	200.00	1300.00	260000.00	40.00	1675.00	67000.00
2	P. Asmara	1.00	1.00	50.00	2600.00	130000.00	500.00	1144.00	572000.00	0.00	0.00	0.00
3	P. Salwi	0.50	2.00	60.00	2500.00	150000.00	600.00	1226.67	736002.00	0.00	0.00	0.00
4	P. Moh. Romli	0.50	2.00	60.00	2700.00	162000.00	400.00	1340.00	536000.00	60.00	1600.00	96000.00
5	P. Asmadi	0.25	4.00	60.00	2700.00	162000.00	200.00	1240.00	248000.00	40.00	1400.00	56000.00
6	P. H. Umar	0.25	4.00	48.00	2600.00	124800.00	400.00	1250.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
7	P. Sukari	0.25	4.00	80.00	2500.00	200000.00	600.00	1220.00	732000.00	120.00	1700.00	204000.00
8	P. Suli	0.13	8.00	80.00	2500.00	200000.00	160.00	1200.00	192000.00	160.00	1750.00	280000.00
9	P. Zaenal	0.75	1.33	66.67	2600.00	173333.33	266.67	1200.00	320000.00	0.00	0.00	0.00
10	P. Murawi	1.00	1.00	70.00	2700.00	189000.00	600.00	1225.00	735000.00	50.00	1700.00	85000.00
Rata-rata Irigasi Semiteknis				65.47	2615	171195.33	392.67	1234.57	484773.31	47.00	1637.50	76962.50
1	P. Halima	0.25	4.00	60.00	3000.00	180000.00	600.00	1300.00	780000.00	0.00	0.00	0.00
2	P. Saeri	0.25	4.00	60.00	3000.00	180000.00	400.00	1200.00	480000.00	0.00	0.00	0.00
3	P. H. Ahmd Mustofa	0.15	6.67	33.33	2750.00	91666.67	266.67	1100.00	293333.33	0.00	0.00	0.00
4	P. H. Saiful Bahri	2.00	0.50	40.00	3000.00	120000.00	300.00	1020.00	306000.00	100.00	1460.00	146000.00
5	P. Sati	0.25	4.00	40.00	2500.00	100000.00	240.00	1200.00	288000.00	0.00	0.00	0.00
6	P. Eko/Svaefudin	0.75	1.33	35.00	3000.00	105000.00	250.00	1050.00	262500.00	100.00	1500.00	150000.00
7	P. Holil	0.20	5.00	60.00	3000.00	180000.00	333.33	1350.00	337500.00	50.00	1700.00	85000.00
8	P. Is Masiran	0.30	3.33	56.67	3000.00	170000.00	333.33	1220.00	406666.67	0.00	0.00	0.00
9	P. Amat	1.00	1.00	60.00	3000.00	180000.00	200.00	1040.00	208000.00	150.00	1500.00	225000.00
10	P. Muarif	1.00	1.00	60.00	3000.00	180000.00	300.00	1040.00	312000.00	100.00	1500.00	150000.00
Rata-rata Irigasi Sederhana				50.5	2925	147712.50	314	1152	361728.00	50	1532	76600.00

Lanjutan Lampiran 1.

13			14		15	16			17		
Kebutuhan (ml)	Reagent		Total Biaya Obat (Rp)	Total Biaya Saprodi (Rp)	Total Biaya Saprodi (Rp)	Pembibitan		Pengolahan Tanah			
	Harga (Rp/ml)	Biaya (Rp)				Harga (Rp)	HKP	Biaya (Rp)	Harga (Rp)	HKP	Biaya (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00	814000.00	814000.00	10000.00	8.20	82000.00	10000.00	41.00	410000.00
66.67	200.00	13333.33	13333.33	946666.67	946666.67	10000.00	8.25	82500.00	10000.00	51.25	512500.00
166.67	200.00	33333.33	33333.33	652333.33	652333.33	10000.00	7.40	74000.00	10000.00	45.02	450200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	662333.00	662333.00	10000.00	8.00	80000.00	10000.00	44.90	449000.00
150.00	200.00	30000.00	30000.00	1336250.00	1336250.00	10000.00	8.50	85000.00	10000.00	48.75	487500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	660000.00	660000.00	10000.00	7.60	76000.00	10000.00	43.25	432500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	780000.00	780000.00	10000.00	9.00	90000.00	10000.00	40.00	400000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	883333.33	883333.33	10000.00	7.80	78000.00	10000.00	32.76	327555.55
0.00	0.00	0.00	0.00	692500.00	692500.00	10000.00	7.40	74000.00	10000.00	47.60	476000.00
400.00	200.00	80000.00	80000.00	840000.00	840000.00	10000.00	7.80	78000.00	10000.00	54.40	544000.00
78.33	200.00	15666.67	15666.67	826152.36	826152.36	10000.00	8.00	79950.00	10000.00	44.89	448925.56
270.00	200.00	54000.00	134000.00	681000.00	681000.00	6000.00	8.00	48000.00	6000.00	33.33	200000.00
0.00	0.00	0.00	125500.00	827500.00	827500.00	6000.00	4.00	24000.00	6000.00	41.33	248000.00
800.00	120.00	96000.00	112000.00	998002.00	998002.00	6000.00	6.00	36000.00	6000.00	45.33	272000.00
135.00	192.59	25999.65	237999.65	1143999.65	1143999.65	6000.00	4.00	24000.00	6000.00	45.33	272000.00
0.00	0.00	0.00	316000.00	848000.00	848000.00	6000.00	8.00	48000.00	6000.00	41.33	248000.00
400.00	200.00	80000.00	200000.00	1064800.00	1064800.00	6000.00	8.00	48000.00	6000.00	49.33	296000.00
340.00	200.00	68000.00	255996.80	1591996.80	1591996.80	6000.00	8.00	48000.00	6000.00	37.33	224000.00
0.00	0.00	0.00	264000.00	1112000.00	1112000.00	6000.00	16.00	96000.00	6000.00	56.00	336000.00
333.33	200.00	66666.67	237333.33	1024000.00	1024000.00	6000.00	3.11	18640.00	6000.00	44.44	266666.67
400.00	200.00	80000.00	145000.00	1154000.00	1154000.00	6000.00	3.75	22500.00	6000.00	48.33	290000.00
267.83	187.51	50222.19	196440.26	1038233.63	1038233.63	6000.00	6.89	41314.00	6000.00	44.21	265266.67
0.00	0.00	0.00	0.00	960000.00	960000.00	10000.00	7.50	75000.00	10000.00	32.10	321000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	860000.00	860000.00	10000.00	7.00	70000.00	10000.00	33.40	334000.00
166.67	200.00	33333.33	156666.67	608333.33	608333.33	10000.00	8.90	80000.00	10000.00	45.33	453333.33
625.00	200.00	125000.00	176000.00	811000.00	811000.00	10000.00	7.20	72000.00	10000.00	47.30	473000.00
200.00	200.00	40000.00	58000.00	666000.00	666000.00	10000.00	7.60	76000.00	10000.00	52.80	528000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	672500.00	672500.00	10000.00	7.50	75000.00	10000.00	15.57	155666.67
0.00	0.00	0.00	47500.00	795000.00	795000.00	10000.00	7.00	70000.00	10000.00	85.25	852500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	576666.67	576666.67	10000.00	7.20	72000.00	10000.00	41.80	418000.00
135.00	200.00	27000.00	191000.00	867000.00	867000.00	10000.00	7.80	78000.00	10000.00	48.30	483000.00
540.00	200.00	108000.00	190000.00	936000.00	936000.00	10000.00	7.20	72000.00	10900.00	48.20	482000.00
166.67	200.00	33333.33	82328.00	769752.25	769752.25	10000.00	7.40	74000.00	10009.00	45.01	450050.00

Lanjutan Lampiran 1.

18			19			20			21		22	
Penanaman			Pemeliharaan Tanaman			Pemanenan dan Pasca Panen			Total Biaya Tenaga Kerja (Rp)		Biaya Lahan	
Harga (Rp)	HKP	Biaya (Rp)	Harga (Rp)	HKP	Biaya (Rp)	Harga (Rp)	HKP	Biaya (Rp)	Sewa Lahan (Rp/Musim/Ha)	Biaya Pengairan (Rp)	Sewa Lahan (Rp/Musim/Ha)	Biaya Pengairan (Rp)
10000.00	48.40	484000.00	10000.00	57.60	576000.00	10000.00	37.68	376800.00	1928800.00	1500000.00	1500000.00	150000.00
10000.00	65.42	654166.67	10000.00	78.50	785000.00	10000.00	58.25	582500.00	2616666.67	1750000.00	1750000.00	20000.00
10000.00	43.33	433333.33	10000.00	52.33	523333.33	10000.00	26.11	261133.33	1742000.00	1450000.00	1450000.00	110000.00
10000.00	51.20	512000.00	10000.00	61.33	613333.33	10000.00	39.19	391866.67	2046200.00	1600000.00	1600000.00	90000.00
10000.00	62.50	625000.00	10000.00	74.50	745000.00	10000.00	54.80	548000.00	2490500.00	1500000.00	1500000.00	24000.00
10000.00	45.89	458900.00	10000.00	55.00	550000.00	10000.00	31.84	318400.00	1835800.00	1800000.00	1800000.00	40000.00
10000.00	48.45	484500.00	10000.00	58.00	580000.00	10000.00	38.35	383500.00	1938000.00	1600000.00	1600000.00	10000.00
10000.00	43.70	437037.04	10000.00	52.50	524953.70	10000.00	38.30	382962.96	1750509.25	1650000.00	1650000.00	20000.00
10000.00	51.20	512000.00	10000.00	61.49	614900.00	10000.00	37.29	372900.00	2049800.00	1750000.00	1750000.00	50000.00
10000.00	68.40	684000.00	10000.00	78.80	788000.00	10000.00	60.87	608700.00	2702700.00	1500000.00	1500000.00	30000.00
10000.00	52.85	528493.70	10000.00	63.01	630052.04	10000.00	42.27	422676.3	2110097.59	1610000.00	1610000.00	40900.00
6000.00	40.00	240000.00	6000.00	44.00	264000.00	0.00	0.00	0.00	752000.00	1400000.00	1400000.00	25000.00
6000.00	28.33	170000.00	6000.00	54.00	324000.00	0.00	0.00	0.00	766000.00	1300000.00	1300000.00	50000.00
6000.00	53.33	320000.00	6000.00	34.00	204000.00	6000.00	50.67	304000.00	1136000.00	1400000.00	1400000.00	15000.00
6000.00	40.00	240000.00	6000.00	84.00	504000.00	0.00	0.00	0.00	1040000.00	1300000.00	1300000.00	20000.00
6000.00	53.33	320000.00	6000.00	58.67	352000.00	0.00	0.00	0.00	968000.00	1350000.00	1350000.00	5000.00
6000.00	32.67	196000.00	6000.00	16.00	96000.00	0.00	0.00	0.00	636000.00	1400000.00	1400000.00	20000.00
6000.00	46.67	280000.00	6000.00	16.00	96000.00	6000.00	66.67	400000.00	1048000.00	1200000.00	1200000.00	20000.00
6000.00	53.33	320000.00	6000.00	80.00	480000.00	6000.00	28.00	168000.00	1400000.00	1300000.00	1300000.00	5000.00
6000.00	15.56	93333.33	6000.00	14.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	462640.00	1200000.00	1200000.00	10000.00
6000.00	50.00	300000.00	6000.00	42.917	257500.00	0.00	0.00	0.00	870000.00	1150000.00	1150000.00	25000.00
6000.00	41.32	247933.33	6000.00	44.36	266150.00	6000.00	14.53	87200.00	967864.00	1300000.00	1300000.00	19500.00
10000.00	39.00	390000.00	10000.00	46.80	468000.00	10000.00	30.60	306000.00	1560000.00	2000000.00	2000000.00	20000.00
10000.00	41.20	412000.00	10000.00	49.80	498000.00	10000.00	34.48	344800.00	1658800.00	2200000.00	2200000.00	20000.00
10000.00	51.00	510000.00	10000.00	61.20	612000.00	10000.00	38.47	384666.67	2040000.00	2500000.00	2500000.00	10000.00
10000.00	61.25	612500.00	10000.00	73.50	735000.00	10000.00	55.75	557500.00	2450000.00	2000000.00	2000000.00	100000.00
10000.00	51.20	512000.00	10000.00	61.20	612000.00	10000.00	32.40	324000.00	2052000.00	2300000.00	2300000.00	15000.00
10000.00	56.78	567800.00	10000.00	68.00	680000.00	10000.00	42.67	426666.67	1905133.34	2000000.00	2000000.00	25000.00
10000.00	38.00	380000.00	10000.00	45.80	458000.00	10000.00	28.48	284750.00	2045250.00	2000000.00	2000000.00	28750.00
10000.00	39.33	393333.33	10000.00	47.20	472000.00	10000.00	23.70	237000.00	1592333.33	2000000.00	2000000.00	15000.00
10000.00	52.80	528000.00	10000.00	63.30	633000.00	10000.00	38.93	389250.00	2111250.00	2000000.00	2000000.00	69000.00
10000.00	51.20	512000.00	10000.00	61.40	614000.00	10000.00	36.80	368000.00	2048000.00	2000000.00	2000000.00	70000.00
10000.00	48.18	481763.33	10000.00	57.82	578200.00	10000.00	36.23	362263.33	1946276.67	2100000.00	2100000.00	37275.00

Lanjutan Lampiran 1.

23	24	25			26
		Penerimaan			
Biaya Pengangkutan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Harga (Rp)	Satuan (Kg)	Total (Rp)	Pendapatan (Rp)
9000.00	4266800.00	1050.00	6800.00	7140000.00	2873200.00
4000.00	5373333.33	1100.00	8333.33	9166666.67	3793333.33
0.00	3954333.33	1180.00	5333.33	6293333.33	2339000.00
44650.00	4443183.00	1080.00	5953.33	6429600.00	1986417.00
10000.00	5360750.00	1120.00	7500.00	8400000.00	3039250.00
0.00	4335800.00	1080.00	5500.00	5940000.00	1604200.00
0.00	4328000.00	1120.00	5500.00	6160000.00	1832000.00
0.00	4303842.59	1050.00	7740.741	8127777.78	3823935.19
0.00	4542300.00	1050.00	6800.00	7140000.00	2597700.00
50000.00	5122700.00	1150.00	7908.00	9094200.00	3971500.00
15365.00	4602514.95	1098.00	6729.86	7389386.37	2786871.42
0.00	2858000.00	1000.00	3600.00	3600000.00	742000.00
0.00	2943500.00	700.00	4000.00	2800000.00	-143500.00
0.00	3549002.00	1000.00	4000.00	4000000.00	450998.00
0.00	3503999.65	900.00	4400.00	3960000.00	456000.35
0.00	3171000.00	1075.00	2792.00	3001400.00	-169600.00
0.00	3120800.00	1000.00	3200.00	3200000.00	792000.00
0.00	3859996.80	1100.00	3600.00	3960000.00	100003.20
0.00	3817000.00	1000.00	7200.00	7200000.00	3383000.00
0.00	2696640.00	1000.00	4266.67	4266666.67	1570026.67
0.00	3199000.00	950.00	4400.00	4180000.00	981000.00
0.00	3265597.63	972.50	4145.87	4031855.33	766257.70
0.00	4540000.00	1100.00	4000.00	4400000.00	-140000.00
0.00	4738800.00	1100.00	4400.00	4840000.00	101200.00
0.00	5158333.33	1050.00	6666.67	7000000.00	1841666.67
0.00	5361000.00	1050.00	7000.00	7350000.00	1989000.00
0.00	5033000.00	1000.00	6800.00	6800000.00	1767000.00
0.00	4602633.34	1150.00	4333.33	4983333.33	380700.00
0.00	4869000.00	1150.00	4250.00	4887500.00	18500.00
0.00	4184000.00	1070.00	4666.67	4993333.33	809333.33
0.00	5047250.00	1150.00	6250.00	7187500.00	2140250.00
0.00	5054000.00	1150.00	6000.00	6900000.00	1846000.00
0.00	4853303.92	1097.00	5436.67	5964023.33	1110719.42

Lampiran 2. Tabel Asumsi *Policy Analysis Matrix* Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

Tabel Asumsi	Tingkat
Asumsi Ekonomi Makro	
Tingkat Suku Bunga Nominal (% tahun)	20%
Tingkat Suku Bunga Nominal (% musim)	6.67%
Tingkat Suku Bunga Sosial (% tahun)	16%
Tingkat Suku Bunga Sosial (% musim)	5.33%
Tingkat Nilai Tukar Resmi (Rp/\$)	8900



Lampiran 3. Input Output Fisik per Hektar Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Kuantitas	Padi			
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana	
Input Tradable	a. Benih (Kg/ha)	56.72	65.47	50.50	
	b. Pupuk				
	Urea	288.98	392.67	314.00	
	TSP	59.76	47.00	50.00	
	MA	45.02	98.67	77.17	
	KCL	36.02	0.00	12.50	
	NPK	60.83	0.00	0.00	
	c. Obat-obatan	1.00	1.00	1.00	
	Faktor Domestik	a. Tenaga Kerja (HKP)			
1. Pembibitan		8.00	6.89	7.40	
2. Pengolahan Tanah		44.89	44.21	45.01	
3. Penanaman		52.85	41.32	48.18	
4. Pemeliharaan		63.01	44.36	57.82	
5. Panen & Pasca Panen		42.27	14.53	36.23	
6. Pengangkutan (paket)		1.00	0.00	0.00	
b. Lahan :					
1. Sewa Lahan (ha)		1.00	1.00	1.00	
2. Pengairan (ha)		1.00	1.00	1.00	
c. Modal Kerja		2951685.36	1946110.99	2716155.73	
Output		Produksi (kg/ha)	6729.86	4145.87	5436.67

Lampiran 4. Harga Privat Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.

	Kuantitas	Padi		
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana
Input Tradable	a. Benih (Rp/Kg)	2890.00	2615.00	2925.00
	b. Pupuk (Rp/Kg)			
	Urea	1201.86	1234.57	1152.00
	TSP	1492.86	1637.50	1532.00
	ZA	1108.57	1103.33	1042.50
	KCL	1616.67	0.00	1675.00
	NPK	1675.00	0.00	0.00
	c. Obat-obatan (Rp/Ha)	15666.67	196440.26	82328.00
	Faktor Domestik	a. Tenaga Kerja (Rp/hkp)		
	1. Pembibitan	10000.00	6000.00	10000.00
	2. Pengolahan Tanah	10000.00	6000.00	10000.00
	3. Penanaman	10000.00	6000.00	10000.00
	4. Pemeliharaan	10000.00	6000.00	10000.00
	5. Panen & Pasca Panen	10000.00	6000.00	10000.00
	6. Pengangkutan (paket)	15365.00	0.00	0.00
	b. Lahan (Rp/Ha/Musim) :			
	1. Sewa Lahan	1610000.00	1300000.00	2100000.00
	2. Pengairan	40900.00	19500.00	37275.00
	c. Modal Kerja	6.67%	6.67%	6.67%
Output	Harga Output (Rp/Kg)	1098.00	972.50	1097.00

Lampiran 5. Anggaran Privat Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Kuantitas	Padi			
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana	
Input Tradable	a. Benih (Rp/Ha)	163920.80	171204.05	147712.50	
	b. Pupuk (Rp/Ha)				
	Urea	347313.50	484778.60	361728.00	
	TSP	89213.31	76962.50	76600.00	
	ZA	49907.82	108865.57	80449.73	
	KCL	58232.45	0.00	20937.50	
	NPK	101890.25	0.00	0.00	
	c. Obat-obatan (Rp/Ha)	15666.67	196440.26	82328.00	
	Total Tradable Input (Rp/Ha)	826144.81	1038250.99	769755.73	
	Faktor Domestik	a. Tenaga Kerja (Rp/Ha)			
1. Pembibitan		79950.00	41340.00	74000.00	
2. Pengolahan Tanah		448925.56	265260.00	450100.00	
3. Penanaman		528500.00	247920.00	481800.00	
4. Pemeliharaan		630100.00	266160.00	578200.00	
5. Panen & Pasca Panen		422700.00	87180.00	362300.00	
6. Pengangkutan (paket)		15365.00	0.00	0.00	
Total Tenaga Kerja (Rp/Ha)		2125540.56	907860.00	1946400.00	
b. Lahan (Rp/Ha/Musim):					
1. Sewa Lahan		1610000.00	1309000.00	2100000.00	
2. Pengairan		40900.00	19500.00	37275.00	
Total Lahan (Rp/Ha/Musim)		1650900.00	1319500.00	2137275.00	
c. Modal Kerja		196877.41	129805.60	181167.59	
Output		Penerimaan (Rp/Ha)	7389386.28	4031855.33	5964023.23
		Kuntungan kotor	4240823.50	1955938.74	3066700.02
	Kuntungan bersih	2589923.50	636438.74	929425.02	

Nilai Output 7389386.28 4031855.33 5964023.23

Modal Kerja 2951685.36 1946110.99 2716155.73

Lampiran 6. Penyesuaian Harga Ekspor/Impor Untuk Output dan Input Usahatani Padi di Kabupaten Jember Tahun 2004

Penyesuaian Harga Impor Untuk Output

No		Padi
1	Harga FOB (US\$/ton)	218.00
2	Freight and Insurance (US\$/ton)	12.10
3	Harga CIF (US\$/ton)	230.10
4	Nilai tukar resmi (Rp/US\$)	8900.00
5	Harga CIF (Rp/kg)	2047.89
6	Transportasi dan penanganan (Rp/kg) :	
	a. Pelabuhan - Provinsi	30.00
	b. Provinsi - Kabupaten	40.00
	c. Penanganan	30.00
7	Nilai Sebelum pemrosesan (Rp/kg)	2147.89
8	Faktor konversi proses (%)	0.64
10	Ongkos Penggilingan (Rp/kg)	50.00
9	Penyesuaian impor di tingkat pedagang (Rp/kg)	1324.65
10	Biaya distribusi untuk pertanian (Rp/kg)	30.00
11	Harga sosial di tingkat petani (Rp/kg)	1294.65

Penyesuaian Harga Ekspor Untuk Input

No		Urea
1	Harga FOB (US\$/ton)	165.00
2	Nilai tukar resmi (Rp/US\$)	8900.00
3	Harga FOB (US\$/ton)	1468.50
4	Transportasi dan penanganan (Rp/kg) :	
	a. Pelabuhan - Provinsi	30.00
	b. Provinsi - Kabupaten	40.00
	c. Penanganan	30.00
5	Nilai sebelum pemrosesan (Rp/kg)	1368.50
6	Faktor konversi proses (%)	100%
7	Penyesuaian ekspor di tingkat pedagang (Rp/kg)	1368.50
8	Biaya distribusi untuk pertanian (Rp/kg)	30.00
9	Harga sosial di tingkat petani (Rp/kg)	1398.50

Lanjutan Lampiran 6.

Penyesuaian Harga Impor Untuk Input

No		TSP	ZA	KCL	NPK
1	Harga FOB (US\$/ton)	180.70	136.00	120	189.00
2	Freight and Insurance (US\$/ton)	28.14	21.18	18.69	19.94
3	Harga CIF (US\$/ton)	208.84	157.18	138.69	208.94
4	Nilai tukar resmi (RP/US\$)	8900.00	8900	8900	8900.00
5	Harga CIF (Rp/kg)	1858.68	1398.90	1234.34	1859.57
6	Transportasi dan penanganan (Rp/kg) :				
	a. Pelabuhan - Provinsi	30.00	30.00	30	30.00
	b. Provinsi - Kabupaten	40.00	40.00	40	40.00
	c. Penanganan	30.00	30.00	30	30.00
7	Nilai sebelum pemrosesan (Rp/kg)	1958.68	1498.90	1334.34	1959.57
8	Faktor konversi proses (%)	100%	100%	100%	100%
9	Penyesuaian impor di tingkat pedagang (Rp/kg)	1958.68	1498.90	1334.34	1959.57
10	Biaya distribusi untuk pertanian (Rp/kg)	30.00	30.00	30.00	30.00
11	Harga sosial di tingkat petani (Rp/kg)	1988.68	1528.90	1364.34	1989.57

Lampiran 7. Harga Sosial Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.

	Kuantitas	Padi			
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana	
Input Tradable	a. Benih (Rp/Kg)	2890.00	2615.00	2925.00	
	b. Pupuk (Rp/Kg)				
	Urea	1398.50	1398.50	1398.50	
	TSP	1988.68	1988.68	1988.68	
	ZA	1528.90	1528.90	1528.90	
	KCL	1364.34	0.00	1364.34	
	NPK	1989.57	0.00	0.00	
	c. Obat-obatan (Rp/Ha)	13316.67	166974.22	69978.80	
Faktor Domestik	a. Tenaga Kerja (Rp/HKP)				
	1. Penbibitan	10000.00	6000.00	10000.00	
	2. Pengolahan Tanah	10000.00	6000.00	10000.00	
	3. Penanaman	10000.00	6000.00	10000.00	
	4. Pemeliharaan	10000.00	6000.00	10000.00	
	5. Panen & Pasca Panen	10000.00	6000.00	10000.00	
	6. Pengangkutan (paket)	15365.00	0.00	0.00	
	b. Lahan (Rp/Ha/Musim) :				
	1. Sewa Lahan	1610000.00	1300000.00	2100000.00	
	2. Pengairan	40900.00	19500.00	37275.00	
	c. Modal Kerja	5.33%	5.33%	5.33%	
	Output	Harga Output (Rp/Kg)	1294.65	1294.65	1294.65

Lampiran 8. Anggaran Sosial Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Kuantitas	Padi			
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana	
Input Tradable	a Benih (Rp/Ha)	163920.80	171204.05	147712.50	
	b. Pupuk (Rp/Ha)				
	Urea	404138.53	549149.00	439129.00	
	TSP	118843.52	93467.96	99434.00	
	ZA	68831.08	150856.56	117985.21	
	KCL	49143.53	0.00	17054.25	
	NPK	121025.54	0.00	0.00	
	c. Obat-obatan (Rp/Ha)	13316.67	166974.22	69978.80	
	Total Tradable Input (Rp/Ha)	939219.66	1131651.79	891293.76	
	Faktor Domestik	a. Tenaga Kerja (Rp/Ha)			
1. Pembibitan		79950.00	41340.00	74000.00	
2. Pengolahan Tanah		448925.56	265260.00	450100.00	
3. Penanaman		528500.00	247920.00	481800.00	
4. Pemeliharaan		630100.00	266160.00	578200.00	
5. Panen & Pasca Panen		422700.00	87180.00	362300.00	
6. Pengangkutan (paket)		15363.00	0.00	0.00	
Total Tenaga Kerja (Rp/Ha)		2125540.56	907860.00	1946400.00	
b. Lahan (Rp/Ha/Musim):					
1. Sewa Lahan		1610000.00	1300000.00	2100000.00	
2. Pengairan		40900.00	19500.00	37275.00	
Total Lahan (Rp/Ha/Musim)		1650900.00	1319500.00	2137275.00	
c. Modal Kerja		157423.22	103792.59	144861.64	
Output		Penerimaan (Rp/Ha)	8712813.25	5367446.28	7038580.50
		Keuntungan kotor	5490629.81	3224141.90	4056025.10
	Keuntungan bersih	3839729.81	1904641.90	1918750.10	

Lampiran 9. Tabel Policy Analysis Matrix Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Penerimaan	Input Tradable					Total	Faktor Domestik			Total	Keuntungan	
		Berth (Rp/ha)	Urea	ZA	TSP	NPK		KCL	Obat-obatan	Tenaga Kerja			Modal
Padi Irigasi Teknis	Privat	7389386.28	347313.50	49907.82	89213.31	101890.25	58232.45	15666.67	2125540.56	196877.41	1650900.00	3973317.97	2589923.50
	Sosial	8712813.25	404138.53	68831.08	118843.52	121025.54	49143.53	13316.67	2125540.56	157423.22	1650900.00	3933863.77	3839729.80
	Divergensi	-1323426.97	0.00	-18923.26	-29630.21	-19135.29	9088.92	2350.00	0.00	0.00	39454.19	0.00	39454.19
Irigasi Semiteknis	Privat	4031855.33	171204.05	484778.60	76962.50	0.00	0.00	196440.26	907860.00	129805.60	1319500.00	2357165.60	636438.74
	Sosial	5367446.28	171204.05	549149.00	93467.96	0.00	0.00	166974.22	907860.00	103792.59	1319500.00	2331152.59	1904641.90
	Divergensi	-1335590.95	0.00	-64370.39	-16505.46	0.00	0.00	29466.04	0.00	0.00	26013.02	0.00	26013.02
Irigasi Sederhana	Privat	5964023.33	147712.50	361728.00	76600.00	0.00	20937.50	82328.00	1946400.00	181167.59	2137275.00	4264842.59	929425.02
	Sosial	7038580.50	147712.50	439129.00	99434.00	0.00	17054.25	69978.80	1946400.00	144861.64	2137275.00	4228536.64	1918750.10
	Divergensi	-1074557.17	0.00	-77401.00	-22834.00	0.00	3883.25	12349.20	0.00	0.00	36305.95	0.00	36305.95

Lampiran 10. Tabel Policy Analysis Matrix Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004

	Penerimaan	Input Tradable	Faktor Domestik			Keuntungan	
			Tenaga Kerja	Modal	Tanah		
					Total		
Padi Irigasi Teknis	Privat	7389386.28	2125540.56	196877.41	1650900.00	3973317.97	2589923.50
	Sosial	8712813.25	2125540.56	157423.22	1650900.00	3933863.77	3839729.80
	Divergensi	-1323426.97	-113074.86	0.00	39454.19	0.00	39454.19
Irigasi Semiteknis	Privat	4031855.33	907860.00	129805.60	1319500.00	2357165.60	636438.74
	Sosial	5367446.28	907860.00	103792.59	1319500.00	2331152.59	1904641.90
	Divergensi	-1335590.95	-93400.80	0.00	26013.02	0.00	26013.02
Irigasi Sederhana	Privat	5964023.33	1946400.00	181167.59	2137275.00	4264842.59	929425.02
	Sosial	7038580.50	1946400.00	144861.64	2137275.00	4228536.64	1918750.10
	Divergensi	-1074557.17	-121538.04	0.00	36305.95	0.00	36305.95

**Lampiran 11. Rasio PAM Usahatani Padi Pada Berbagai Sistem
Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004**

		Padi		
		Irigasi Teknis	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana
1	NPCO [A/E]	0.848	0.751	0.847
2	NPCI [B/F]	0.880	0.917	0.864
3	PCR [C/ A-B]	0.605	0.787	0.821
4	DRC [G/(E-F)]	0.506	0.550	0.688
5	EPC [(A-B)/(E-F)]	0.844	0.707	0.845
6	PC [D/H]	0.675	0.334	0.484
7	SRP [L/E]	-0.143	-0.236	-0.141

Lampiran 12. Data Pemasaran Gabah Petani Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.

No	Nama Petani Irigasi Teknis	Sistem Penjualan		Nama Petani		Sistem Penjualan		Sistem Penjualan	
		Output	Output	Irigasi Semiteknis	Irigasi Sederhana	Output	Output	Output	Output
1	P. Sujud	Dikonsumsi	P. Karnam	P. Halima	Tebasan	P. Halima	Tengkulak	Tengkulak	
2	P. Sahrowi	Tengkulak	P. Asmara	P. Saeri	Tebasan	P. Saeri	Tengkulak	Tengkulak	
3	P. H. Aripson	Mitra Usaha	P. Salwi	P. H. Ahd. Mustofa	Tebasan	P. H. Ahd. Mustofa	Ter.gkulak	Ter.gkulak	
4	P. Jamal	Tengkulak	P. Moh. Romli	P. H. Saiful Bahri	Tebasan	P. H. Saiful Bahri	Mitra Usaha	Mitra Usaha	
5	P. Sudibyo	Tengkulak	P. Asmadi	P. Sati	Tebasan	P. Sati	Tengkulak	Tengkulak	
6	P. Mahfud	Tengkulak	P. H. Umar	P. Eko/Syaefudin	Tebasan	P. Eko/Syaefudin	Mitra Usaha	Mitra Usaha	
7	P. Supangat	Tengkulak	P. Sukari	P. Holil	Tebasan	P. Holil	Tengkulak	Tengkulak	
8	P. Saeri	Dikonsumsi	P. Suli	P. Is Masiran	Dikonsumsi	P. Is Masiran	Tengkulak	Tengkulak	
9	P. Rahmad	Tengkulak	P. Zaenal	P. Amat	Tebasan	P. Amat	Tengkulak	Tengkulak	
10	P. Adi Sutrisno	Tengkulak	P. Murawi	P. Muarif	Tebasan	P. Muarif	Tengkulak	Tengkulak	

Empiran 13. Persentase Pemasaran Gabah Petani Pada Berbagai Sistem Irigasi di Kabupaten Jember Tahun 2004.

Sistem Penjualan <i>Output</i>	Irigasi Teknis		Irigasi Semiteknis		Irigasi Sederhana	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Dikonsumsi	2	20	1	10	0	0
Tebasan	0	0	9	90	0	0
Tengkulak	7	70	0	0	8	80
Mitra Usaha	1	10	0	0	2	20
Jumlah	10	100	10	100	0	100



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

KUISIONER

JUDUL : ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
DAYA SAING KOMODITAS PADI (*Oriza sativa L.*) PADA
BERBAGAI SISTEM IRIGASI DI KABUPATEN JEMBER

LOKASI : DESA TISNOGAMBAR, DESA LANGKAP KECAMATAN
BANGSALSARI, DAN DESA PRINGGOWIRAWAN KECAMATAN
SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

A. IDENTITAS PEWAWANCARA

Nama : Ahmad Efendi
NIM : 001510201238

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Nama Kelompok Tani :
Alamat :
Jumlah keluarga :
Pengalaman sebagai petani:

C. ANALISIS USAHATANI PADI (*Oriza sativa L.*)

1. Musim Tanam : (MH / MK I/ MK II) / Tahun.....
2. Pola Tanam Setahun :
3. Sistem Tanam : Monokultur/Tumpangsari
4. Sistem Irigasi : Irigasi Teknis/Irigasi Semiteknis/Irigasi Sederhana
5. Luas Lahan : Ha

6. Status Lahan : Milik/Sewa/Sakap

7. Ditanam bulan :

Dipanen bulan :

8. Penggunaan Sarana Produksi :

a. **Bibit, Pupuk, dan Obat-obatan**

No	Jenis	Satuan(Kg/ liter)	Harga per satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Bibit/ Biaya Pembibitan			
2	Pupuk a. Urea b. TSP c. KCL d. KS e. f.			
3	Obat-obatan a. b. c.			
	Jumlah			

c. **Pengeluaran / Biaya lain-lain**

1. Sewa alat/ traktor : Rp
2. Sewa ternak : Rp
3. Sewa tanah/Sakap : Rp
4. Pajak tanah : Rp
5. Biaya pengairan : Rp
6. : Rp
- Jumlah** : Rp

D. HASIL PRODUKSI PENERIMAAN

No	Jumlah Produk si Padi	Harga per (kg, kuintal, ton)	Penerimaan (Rp)	Keterangan (dijual kepada)
1.
2.

E. PENDAPATAN BERSIH

1. Pengeluaran

a. Biaya Tetap

- ❖ Sewa alat/ traktor : Rp
- ❖ Sewa ternak : Rp
- ❖ Sewa tanah : Rp
- ❖ Pajak tanah : Rp
- ❖ Pengairan : Rp
- ❖ Lain – lain (Alat pertanian) : Rp
- Jumlah : Rp

b. Biaya Variabel

- ❖ Biaya sarana produksi : Rp
- ❖ Biaya tenaga kerja : Rp
- ❖ Biaya transportasi : Rp
- ❖ Biaya lain-lain : Rp
- Jumlah : Rp

2. Pendapatan Bersih

Penerimaan – Pengeluaran : Rp

F. LAIN – LAIN

1. Apa yang mendorong bapak mengusahakan tanaman padi?
 - a. Keinginan sendiri
 - b. Ikut-ikutan petani lain
 - c. Tradisi turun temurun dari orang tua
 - d.
2. Sejak kapan bapak mengusahakan tanaman padi ?
3. Tergantung pada apa bapak dalam menanam padi ?
 - a. Pesanan
 - b. Keinginan sendiri
 - c. Musim
 - d.
4. Apakah setiap tahun bapak mengusahakan tanaman padi ?
5. Apakah bapak pernah menerima bantuan untuk perbaikan saluran irigasi ?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
6. Bagaimana proses irigasi disawah bapak ?
 - a. Ada pengaturan air
 - b. Air mengalir terus menerus
 - c. Tidak di aliri air irigasi tetapi dari sumber mata air
 - d.
7. Siapakah yang mengatur air di sawah bapak dan bagaimana sistem upahnya ?
.....
8. Apakah ada tambahan biaya pengairan (perawatan saluran) ?
 - a. Ada, untuk..... sebesar Rp.....
 - b. Tidak ada
 - c.
9. Apakah pernah terjadi kelangkaan air pada sawah bapak saat menanam padi ?
.....
10. Dari manakah bapak memperoleh benih, obat-obatan, dan pupuk tanaman padi ?
 - a. Toko pertanian
 - b. KUD
 - c. Petani lain
 - d.
11. Dengan sistem apa bapak menjual hasil padi ?
 - a. Tebasan
 - b. Dijual gabah kering
 - c. Dijual dalam bentuk beras
 - d.

12. Jika dijual dalam bentuk beras, berapakah hasil gabah yang diperoleh ketika jadi dalam bentuk beras ?
- b.Kg Gabah menjadiKg Beras
- c.
13. Jika dijual dalam bentuk gabah, dalam bentuk yang bagaimanakah gabah dijual ?
- a. Gabah kering panen b. Gabah kering simpan c. Gabah kering giling
- d.
14. Kepada siapa biasanya bapak menjual hasil panen padi ?
- a. Tengkulak
- b. Pedagang besar
- c. Pengepul
- d.
15. Mengapa bapak menjual secara tebasan hasil padi ?
- a. Karena lebih mudah
- b. Karena untungnya lebih besar
- c. Karena birokrasinya tidak berbelit
- d.
16. Dalam menjual tebasan, umur padi berusia berapa ?
- a. 2 bulan
- b. 3 bulan
- c. 4 bulan
- d.
17. Berapa lama bapak melakukan pemanenan ?
- a. 2 hari b. 3 hari c. 4 hari d.
18. Berapa lama bapak melakukan proses pasca panen dari mulai panen, pengeringan sampai dijual ?
- a. 1 minggu b. 2 minggu c. 3 minggu d.
19. Apakah dalam menentukan harga padi bapak menggunakan patokan harga pasar ?
- a. Ya b. Tidak
20. Apakah hasil jual padi di pasar berpengaruh terhadap pendapatan bapak ?
- a. Sangat berpengaruh b. Berpengaruh
- c. Tidak berpengaruh d.

21. Menurut bapak siapakah yang lebih banyak berperan untuk meningkatkan usahatani padi di desa bapak ?
- a. Bapak sendiri b. Pemerintah melalui PPL c.
22. Jika dilakukan oleh pemerintah melalui PPL, apakah upaya tersebut sudah sesuai keinginan bapak ?
- a. Ya b. Tidak
- Mengapa.....
-
23. Apakah bapak juga mengikuti kegiatan kelompok tani ?
- a. Ya, dengan nama.....
- b. Tidak
- Mengapa.....
-
24. Dalam Usahatani padi, apakah pernah menerima bantuan dari pemerintah baik kredit atau bantuan lain ?
- a. Pernah, yaitu.....
- b. Tidak pernah
25. Dari manakah modal usahatani padi yang bapak gunakan dan berapa besarnya ?
- d. Tabungan sendiri sebesar Rp...../musim
- e. Bank..... sebesar Rp...../musim dengan bunga...../bulan
- f. Lembaga perkreditan lain yaitu.....sebesar Rp...../musim dengan bunga...../bulan
- g. Petani lain sebesar Rp...../musim dengan bunga...../bulan
- h.
26. Apakah selain memberi upah tenaga kerja, bapak juga menanggung biaya makan ?
- a. Ya sebesar Rp...../musim
- b. Tidak
27. Dalam 2 tahun terakhir, berapakah harga padi tertinggi dan harga padi terendah yang pernah bapak terima ?
- Harga terendah Rp / kg
- Harga tertinggi Rp / kg.